LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN TANAH LAUT

https://disnakerind.tanahlautkab.go.id

disnakerind_tala Disnakerind Kabupaten Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3/001/DTKP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023
DILINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH ALUT

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 Pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 Diingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 8 Januari 2024

an. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 100.3.3/001/DTKP/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala SKPD	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
6.	Kabid Perindustrian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPT BLK	Anggota
10.	Subkor Hubungan Industrial	Anggota
11.	Subkor Persyaratan Kerja	Anggota
12,	Subkor Pengupahan dan Jamsostek	Anggota
13.	Subkor Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Subkor Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
15.	Subkor Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Anggota
16.	Subkor Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
17.	Subkor Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota
18.	Subkor Pemberdayaan Industri	Anggota

an. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang….. Aamiin.

Pelaihari, 31 Januari 2024

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TANAH LAUT

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

disnakerind KOMPETENSI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tentang capaian kinerja, sasaran selama tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023.

Pada Tahun 2023 secara keseluruhan akuntabililtas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut rata-rata capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 84,12% dari 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan. Dari 5 (lima) indikator tersebut 1 (satu) indikator yang capaiannya dibawah 50% atau sebesar 47,06%, 2 (dua) indikator yang capaiannya sesuai dengan yang ditargetkan atau sebesar 100%, dan 2 (dua) indikator lagi yang capaiannya kurang dari yang ditargetkan atau rata-rata 86,94%. Dari 5 (lima) indiaktor tersebut didukung dengan 8 (delapan) program yang terdiri atas 15 (lima belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.022.040.677,- dan realisasi sebesar Rp. 11.368.038.491,- atau tercapai 87,30%. Berdasarkan penjelasan diata maka secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2023 sudah cukup baik.

Demikian dengan disusunnya LKj ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, 31 Januari 2024

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

disnakerind KOMPETITIF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

Bab I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Dasar Hukum 3

D. Cascaing Kinerja 5

E. Proses Bisnis, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 6

F. Isu Strategis Perangkat Daerah 22

G. Dukungan SDAM, Sarana, Prasarana dan Anggaran 26

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya 34

E. Sistematika Penyajian 36

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA **38**

A. Visi RPJMD 38

B. Misi RPJMD 41

C. Tujuan dan Sasaran Strategis 44

D. Indikator Kinerja Utama 48

E. Perjanjian Kinerja 2023 51

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 55

disnakerind KOMPETITIF

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 60

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi 60

B. Akuntabilitas Keuangan 155

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023 155

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program 156

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023 167

Bab IV PENUTUP 179

A. Kesimpulan 179

B. Strategi Peningkatan Kinerja 180

LAMPIRAN

1) IKU
2) Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2022
3) Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4) Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
5) Monev Renstra
6) Matrik Keselarasan

disnakerind KOMPETITIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas dan Asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat

disnakerind KOMPETITIF

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan sebuah tekad seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daaerah yang ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan yang seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kinerjanya ditahun – tahun berikutnya.

3. Dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan dating sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

C. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

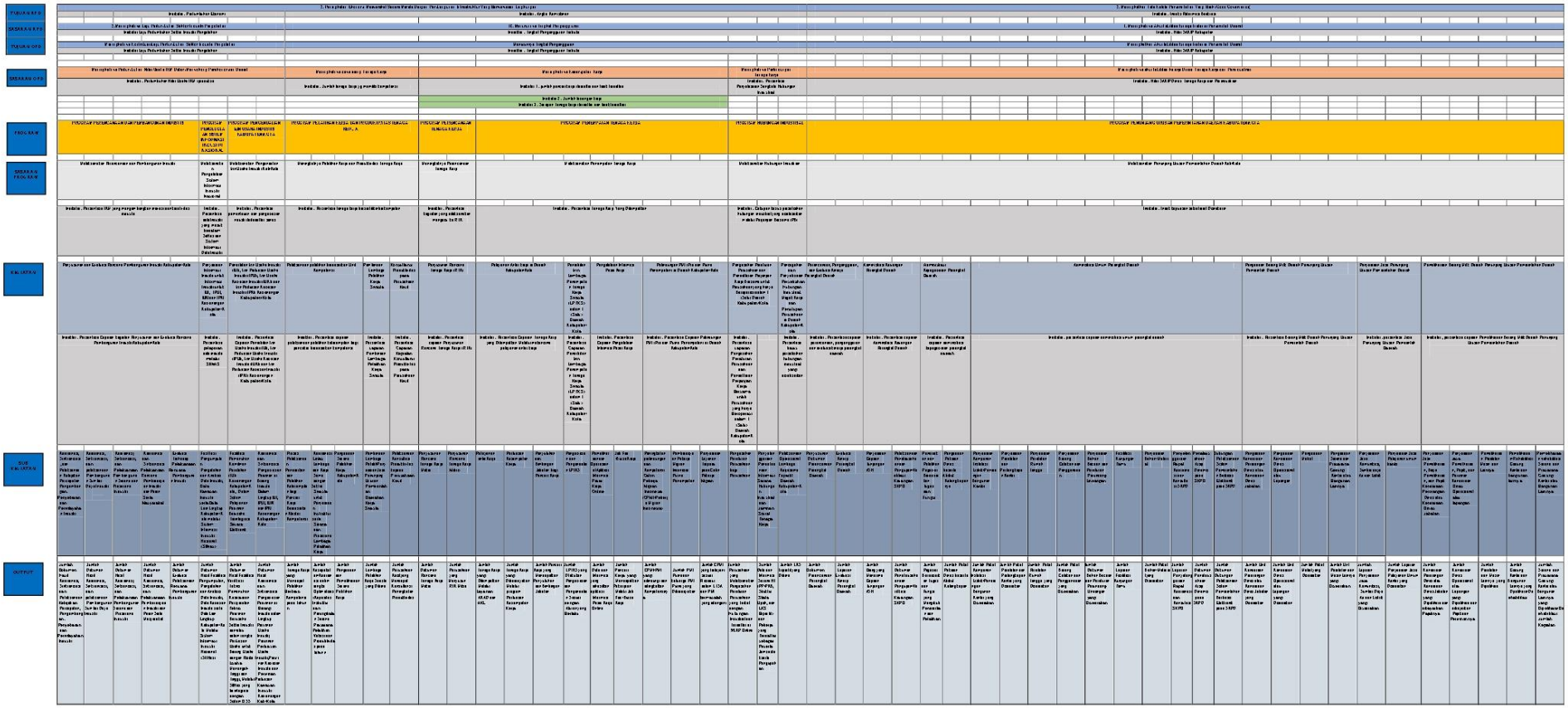
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

D. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

CASCADING DISNAKERIND



E. PROSES BISNIS, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

1. Proses Bisnis

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis dilingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

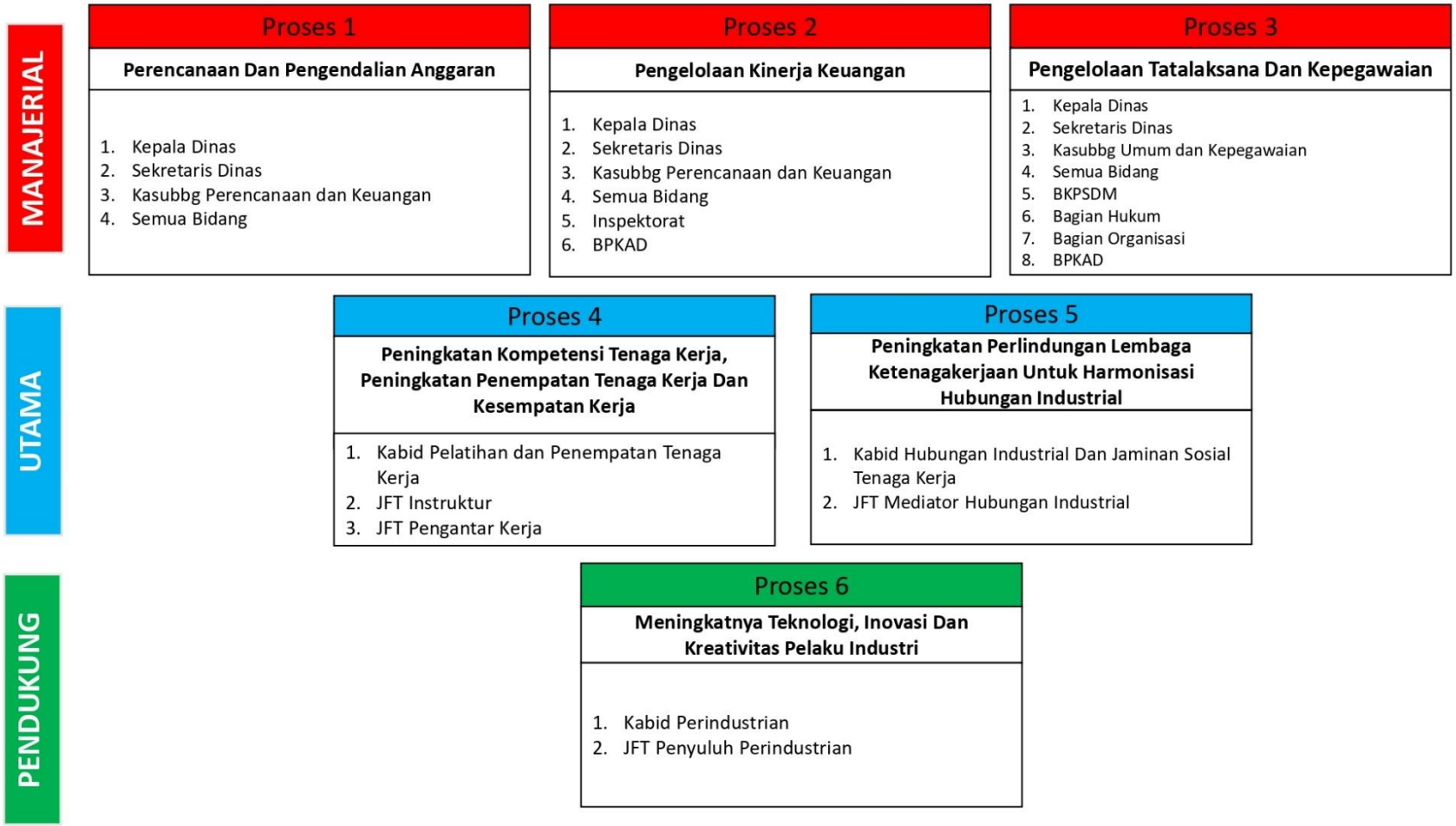
Berdasarakan hal tersebut diatas maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut membuat Peta Proses Bisnis sebagaimana dibawah ini :

disnakerind
KOMPETITIF

Gambar 1.1 Peta Proses Bisnis Disnakerind



Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut



2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Darah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
f. pelaksanaan administrasi dinas;
g. pembinaan UPTD Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

disnakerind
KOMPETITIF

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :

a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

b. Sekretariat terdiri dari :

   1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

   2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

e. Bidang Perindustrian.

f. UPTD Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri :

A. Sekretariat terdiri dari :

   1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

   2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

C. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:

disnakerind KOMPETITIF

D. Bidang Perindustrian, terdiri dari:

E. UPT Dinas; dan

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut diuraikan sebagaimana penjelasan dibawah ini, yaitu :

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;

b) pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;

c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;

d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;

disnakerind KOMPETITIF

e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;

f) pelaksanaan administrasi dinas;

g) pembinaan UPTD Dinas; dan

h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas sekretariat, bidang dan sub bagian, sebagaimana Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu kepala dinas yang dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. yang uraian tugas adalah sebagai berikut :

a) menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;

b) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;

c) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

d) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

disnakerind KOMPETITIF

e) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;

f) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

g) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

h) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;

i) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;

j) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan

k) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

a) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;

b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;

c) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;

disnakerind KOMPETITIF

d) menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
e) menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
f) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
h) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
i) melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
j) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
k) melaksanakan urusan gaji pegawai;
l) melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
m) melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
n) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dang anti rugi;
o) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

dishakerind KOMPETITIF

p) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangnan; dan

q) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepeagwaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

a) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;

b) melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

c) melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, berkala, pemberhentian dan pension pegawai;

d) melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

e) melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;

f) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;

g) menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;

h) menyiapkan bahan dan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara (LHKASN);

i) melaksnakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

disnakerind KOMPETITIF

j) melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol;

k) melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

l) melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan produk hokum daerah di lingkungan dinas;

m) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);

n) melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

o) melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;

p) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian dat dan statistic dinas;

q) menyiapkan bahan dan pentunjuk teknis penyelenggaraan administrasi perkantoran dan tata naskah dinas lainnya;

r) melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub kegiatan umum dan kepegawaian; dan

s) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tuga dan kewenangannya.

dishakerind
KOMPETITIF

4. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

a) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
6. pelaksanaan administrasi bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

disnakerind KOMPETITIF

8. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamenyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

disnakerind KOMPETITIF

6. pelaksanaan administrasi bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Perindustrian

a) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya

disnakerind KOMPETITIF

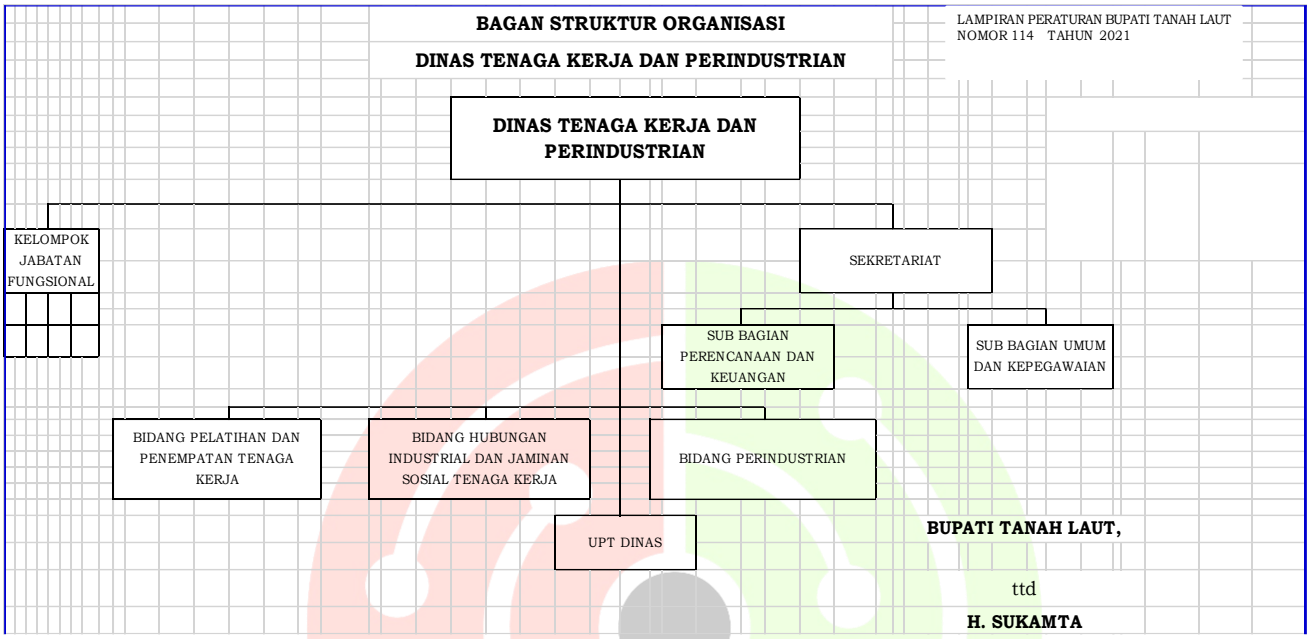
industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
6. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

disnakerind
KOMPETITIF

Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Disnakerind



F. ISU STRATEGIS

Ada beberapa isu strategis terkait pembangunan ketenagakerjaan, dan perindustrian.

Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian antara lain :

1. **Peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan untuk kompetensi tenaga kerja untuk menwujudkan Program Unggulan 500 Orang Siap Kerja .**

   Pelatihan kerja sebagai keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja

disnakerind KOMPETITIF

yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindutrian perlu mendorong terbentuknya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta selain UPT BLK yang sudah ada. Lembaga-lembaga tersebut perlu program penguatan kelembagaan, standarisasi kompetensi, peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan. Bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi dalam program pemagangan.

2. Peningkatan Pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pelayanan penempatan tenaga kerja dipandang sebagai proses kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, sementara pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya. Peningkatan pelayanan tersebut dibangun melalui pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu (SISNAKER TERPADU) sebagai kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, perangkat lunak dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja, pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan. Dalam pelayanan penempatan tenga kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

disnakerind KOMPETITIF

untuk menyelenggarakan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten, penerbitan ijin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) daerah Kabupaten, pengelolaan IPK (Informasi Pasar Kerja) dan pemberian tanda daftar BKK (Bursa Kerja Khusus).

Pembinaan terhadap LPTKS dan BKK perlu diintensifkan mengingat urgensi dan cakupan layanan dapat diperluas, karena BKK dapat dibentuk pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di dalamnya terdapat pasal Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA). Perpanjangan Penggunaan TKA juga harus didampingi oleh Tenaga Kerja Indonesia sesuai peraturan yang berlaku sehingga tenaga kerja daerah dapat diberdayakan.

3. Perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan jumlah peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja, diperlukan jaminan sosial sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah daerah turut mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan

disnakerind KOMPETITIF

Kesehatan kepada para pekerja formal, tenaga kerja informal (mandiri), Perangkat Desa, tenaga non ASN (PTT) dan tenaga kerja konstruksi, berdasarkan MoU antara pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Banjarmasin.

4. **Harmonisasi hubungan industrial melalui peningkatan jumlah penyelesaian kasus melalui Perjanjian Bersama (PB).**

Meningkatnya jumlah sengketa atau perselisihan hubungan industrial menuntut upaya maksimal tenaga fungsional mediator HI, agar penyelesaian perselisihan dapat dicapai melalui Perjanjian Bersama (PB) sebelum pilihan terakhir melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut belum memiliki tenga fungsional mediator, sehingga pelayanan penanganan perselisihan HI bekerja sama dengan tenaga mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan. Selain itu untuk meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dilakukan melalui pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartite, deteksi dini penanganan mogok kerja, PHK, dan penutupan perusahaan.

5. **Peningkatan Industri kecil dan menengah.**

Kebijakan yang berpihak kepada IKM mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, meliputi perumusan

dishakerind KOMPETITIF

kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas bagi IKM. Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri daerah dilakukan melalui strategi pemanfatan potensi bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreatifitas.

Pemerintah Daerah menggalakkan program penumbuhan wirausaha baru. Dengan meningkatnya jumlah wirausaha baru, maka diharapkan juga meningkatnya jumlah IKM di Kab. Tala . tindak lanjut dari meningkatnya IKM dan jumlah perusahaan, maka jumlah IKM yang terfasilitasi TDI dan IUI juga turut bertambah.

6. **Terbangunnya kawasan industri Jorong**

Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwa Kawasan Industri Jorong masuk dalam proyek Strategis Nasional (PSN). Kementrian Perindustrian telah memfasilitasi dalam pembuatan master plan dan RDTR.

disnakerind
KOMPETITIF

7. **Tumbuhnya sentra IKM.**

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM), berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 bahwa disetiap wilayah Kabupaten terutama di luar Pulau Jawa memiliki minimal satu sentra IKM, yang dapat berada didalam atau di luar Kawasan Industri. Pada Tahun 2019 melalui dana DAK telah dibangun Gedung Sentra IKM di Kecamatan Tambang Ulang.

G. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2023 didukung dengan 71 orang pegawai, yang terdiri dari PNS sebanyak 40 orang, PTT sebanyak 24 orang dan TA sebanyak 7 orang, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinakerind dan UPT BLK Tahun Anggaran 2023

	PNS	PTT	TA
Dinas	25 orang	18 orang	6 orang
UPT BLK	15 orang	6 orang	1 orang

disnakerind KOMPETITIF

Adapun dari jumlah tersebut dapat dijabarkan lagi sebagai berikut :

- **Berdasarkan Pendidikan**

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	PNS	PTT	TA
S2	6 orang	-	-
S1	20 orang	9 orang	orang
D3	8 orang	1 orang	orang
SMA	6 orang	11 orang	orang
SMP	-	2 orang	orang
SD	-	1 orang	1 orang
Total	40 orang	24 orang	-

- **Berdasarkan Golongan**

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah PNS
IV c	1 orang
IV b	2 orang
IV a	4 orang
III d	8 orang
III c	4 orang
III b	6 orang
III a	10 orang
II d	4 orang
I c	1 orang

disnakerind
KOMPETITIF

➢ **Berdasarkan Jabatan Struktural / Fungsional adalah** :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah PNS
Kepala Dinas (Eselon II b0	1 orang
Sekretaris (Eselon III a)	1 orang
Kepala Bidang (Eselon III b)	3 orang
Kasubbag/Kepala UPT (Eselon IV a)	3 orang
Kasubbag TU BLK (Eselon IV b)	4 orang
Jabatan Fungsional/Instruktur JFT	1 orang
Non Jabatan/Staf	13 orang

Sedangkan kondisi sarana prasarana yang dimilki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5
Kondisi Sarana Prasarana Disnakerind Kab. Tanah Laut TA 2023

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah Kantor	2265 m^2	v		
2.	Tanah BLK	20.000 m^2	v		
3.	Gedung Kantor	1 buah	v		
4.	Gedung BLK	1 buah	v		
5.	Kendaraan Roda 2	9	6	3	
6.	Kendaraan Roda 4	4	4	-	-
7.	Global Positioning system (GPS)	1	1	-	-
8.	Air Conditioning Unit	2			

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
9.	Filling Besi/metal	21	21		
10.	Papan Pengumuman	4	4	-	-
12.	Genset	6	6	-	-
13.	Bangku Tunggu	6	6	-	-
14.	Meja Rapat	46	33	-	13
15.	Kursi Tamu	6	3	-	3
16.	Meja Komputer	5	5	-	-
17.	Lemari Es	7	5	-	2
18.	AC Split	42	28	-	14
19.	Kipas Angin	8	2	-	6
20.	P.C unit/ Komputer PC	47	36	-	11
21.	Laptop	25	20	-	5
22.	Note Book	1	-	-	1
23.	LCD	2	1	-	-
24.	Printer	30	23	-	7
25.	UPS	12	5	-	7
26.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
27.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-	-
28.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	8	-	2
29.	Meja Kerja	37	35	-	2
30.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	-	-
31.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9	-	-
32.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	25	21	-	4
33.	Camera + Attachment	5	3	-	2

disnakerind KOMPETITIF

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
34.	Proyektor + Attachment	3	2	-	1
35.	Handycam	1	-	-	1
36.	Televisi	3	2	-	1
37.	Camera Electronic	4	2	-	2
38.	Wireless Portable (Sound System)	1	1	-	-
39.	Mesin Gerinda	7	5	-	2
40.	Mesin Kompresor	2	2	-	-
41.	Mesin Gerinda Tangan	2	-	-	2
42.	Mesin Bor Tangan	4	2	-	2
43.	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain	89	83	-	6
44.	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	95	85	-	10
45.	Mesin Gergaji	1	1	-	-
46.	Mesin Ketam	1	1	-	-
47.	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	7	7	-	-
48.	Perkakas Bengkel Kerja lainnya	1	1	-	-
49.	Peralatan Las Lain-lain	35	32	-	3
50.	Receiver	1	1	-	-
51.	Tang	1	v	1	-
52.	Alat Processing Lainnya	14	14	-	-
53.	Alat Pengemas Makanan	2	2	-	-
54.	Mesin Kontrol/Jaga	8	8	-	-
55.	Meja Panjang	2	2	-	-
56.	Meja Biro	2	2	-	-
57.	Oven Listrik	2	-	-	2

disnakerind KOMPETITIF

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
58.	Tabung Gas	2	2	-	-
59.	Dispenser	1	1	-	-
60.	Alat Penggiling Daging	3	3	-	-
61.	Mesin Jahit	37	37	-	-
62.	Tangga Alumunium	1	1	-	-
63.	Tong Sampah	2	2	-	-
64.	Tabung Pemadam	1	1	-	-
65.	Scanner	3	3	-	-
66.	Hardisk Eksternal	7	6	1	-
67.	Pressure Gauge	2	-	-	2
68.	Water Jet Spray	3	3	-	-
69.	Mixer	1	1	-	-
70.	Mesin Jahit Pasangan Kancing	2	2	-	-
71.	Mesin Jahit 3 Pasha	1	1	-	-
72.	Lead Detector	2	-	-	2
73.	Meja PNS Non Struktural	2	2	-	-
74.	Mesin Proses (Pengolah Batu Akik)	2	2	-	-
75.	Modem	1	1	-	-
76.	Papan Tulis	4	4	-	-
77	Software	1	1	-	-
78	PC Server	1	-	-	-
79	Food Prosesor	2	2	-	-
80	Oven Gas	1	1	-	-
81	Panci Presto	1	1	-	-

disnakerind KOMPETITIF

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
82	Pisau Set	8	8	-	-
83	Frezer Kulkas	2	2	-	-
84	Meja Resepsionis	1	1	-	-
85	Lemari 3 Pintu	1	1	-	-
86	Rak Kayu	5	5	-	-
87	Gantungan Kain	5	5	-	-
88	Meja Rapat	46	33	-	13
89	Kursi Rapat	100	100	-	-
90	Lemari Etalase	3	3	-	-
91	Manekin Fullbody	5	4	-	1
92	Manekin Halfbody	5	5	-	-
93	Rangka Spanduk	1	1	-	-
94	Vacum Cleaner	1	1	-	-
95	Karpet	10	10	-	-
96	Televisi 43 inc	1	1	-	-
97	Televisi 55 inc	1	1	-	-
98	Televisi 29 Inc	2	1	-	1
99	Handy Talky	5	4	-	1
100	Kursi Putar	20	7	-	2
101	Meja Kerja Instruktur	9	9	-	-
102	Kursi Rapat BLK	59	59	-	-
103	Mesin Las	2	2	-	-
104	Mobil EXPO	1	1	-	-
105	CCTV	2	2	-	-

disnakerind KOMPETITIF

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
106	Lampu Pipa	1	1	-	-
107	Leter Box	1	1	-	-
108	Neon Box	2	1	-	-
109	Showcase	2	2	-	-
110	Sliding Flat Glass	2	2	-	-
111	Tanah Persil Lainnya	180.000 m^2	-	-	-
112	Tanah untuk Jalan Lainnya	260.000 m^2	-	-	-
113	Tanah Kampung	5.414 m^2	-	-	-
114	Rumah Kemasan	1	-	-	-
115	Lemari Besi	2	2	-	-
116	Rak Arsip	2	2	-	-
117	Lemari Arsip	2	2	-	-
118	Rangka Baleho	1	1	-	-
119	Shofa Minimalis	2	2	-	-
120	Alat Semprot Rumput Elektrik	2	2	-	-

disnakerind KOMPETITIF

Tahun anggaran 2023 total anggaran yang diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 13.022.040.677,- (Tiga Belas Milyar Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian untuk Dinas sebesar Rp. 11. 418.463.846,- (Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh

Enam Rupiah) dan untuk UPT BLK sebesar Rp. 1.603.576.831,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.6
Total Anggaran Disnakerind Tahun Anggaran 2023

	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Dinas	10.577.508.613	11.418.463.846	840.955.233
UPT BLK	1.569.421.978	1.603.576.831	34.154.853

H. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Nomor 700/247/LHE AKIP-Insp/2022 tanggal 1 Agustus 2022, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai SAKIP untuk Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah dengan nilai **83,20 dengan kategori A (Memuaskan).**

Dari LHE tersebut ada beberapa rekomendasi yang disampaikan untuk ditindak lanjuti guna perbaikan laporan kinerja kedepannya. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil rekomendasi tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.7
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas AKIP Disnakerind tahun 2022

NO	KOMPONEN	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
a.	Perencanaan Kinerja	1. Agar dokumen perencanaan yang telah diperbaiki tetap dipertahankan dan dilakukan penyempurnaan untuk meningkatkan nilai hasil evaluasi AKIP.	Perbaikan dan penyempurnaan dalam pembuatan dokumen perencanaan telah dilaksanakan sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP.
b.	Pengukuran Kinerja	1. Agar dilakukan pengukuran data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan) 2. Agar hasil pencapaian target kerja dapat dimanfaatkan dalam penilaian kinerja yang mengarah pada penilaian prestasi kinerja individu dan pemberian reward dan punishment.	1. Telah dilakukan Pengukuran Data Kinerja secara berkala (bulanan dan triwulan). 2. Telah memanfaatkan hasil pencapaian target kerja dalam penilaian kinerja yang mengarah pada penilaian prestasi kinerja individu dan pemberian *reward* dan *punishment.*
c	Pelaporan Kinerja	1. Dokumen laporan kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sejak tahun awal Renstra. 2. Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	1. Dokumen laporan kinerja sudah menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. 2. Laporan kinerja sudah dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Agar monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja dilaksanakan secara bulanan. 2. Agar menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan upaya perbaikan dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja. 3. Agar rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang diberikan oleh APIP segera ditindaklanjuti dan didokumentasikan.	1. Monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala (bulanan maupun triwulan) 2. Telah menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan secara berkala (bulanan maupun triwulan) 3. Telah menindaklanjuti dan mendokumentasikan apa yang menjadi rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP yang diberikan oleh APIP

disnakerind KOMPETITIF

I. SISTEMATIKA PENYAJIAN

1. KATA PENGANTAR

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

3. DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum

D. Cascaing Kinerja

E. Proses Bisnis, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

G. Dukungan SDAM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya

E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

A. Visi RPJMD

B. Misi RPJMD

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

D. Perjanjian Kinerja 2023

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

disnakerind KOMPETITIF

2. Eselon II

3. Eselon III

4. Eselon IV

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

1) IKU
2) Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2021
3) Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4) Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
5) Monev Renstra
6) Matrik Keselarasan

disnakerind
KOMPETITIF

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

disnakerind KOMPETITIF

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang samakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjaringan dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

disnakerind KOMPETITIF

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna "tertata" adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

disnakerind KOMPETITIF

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. MISI RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **"Tanah Laut yang BERINTERAKSI"**, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

disnakerind KOMPETITIF

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan Tabel di bawah ini.

disnakerind
KOMPETITIF

Gambar 2.1
Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	**MISI**
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	**MISI**
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan dan daya saing yang tinggi menuju **" Tanah Laut *yang BERINTERAKSI*".**

Keunggulan ini dapat diwujudkan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai

tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan komplek. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan mayarakat Kabupaten Tanah Laut menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan

disnakerind KOMPETITIF

bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya *"Sense of responsibility and professionally"* dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. *Sense of responsibility,* menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara professionally lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

disnakerind
KOMPETITIF

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang diserahkan kepada SKPD. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana berikut :

1. Meingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja.
2. Meningkatkan Kesempatan Kerja.

3. Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial.
4. Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri.
5. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Keterkaitan Tujuan Renstra dengan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023:

A. Untuk tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dan tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat selaras dengan **Misi 1** yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

B. Untuk Tujuan 2 dan 3 : Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial selaras dengan **Misi 5** yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Untuk Tujuan 4 : Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri selaras dengan **Misi 2** yaitu Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

disnakerind KOMPETITIF

1. Untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja"** ditetapkan sasaran "Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja".
2. Untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Kesempatan Kerja"** ditetapkan sasaran "Meningkatnya Kesempatan Kerja".
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial** ditetapkan sasaran "Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial "
4. Untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri."** ditetapkan sasaran "Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri**"**.
5. Untuk mencapai tujuan **"Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat."** ditetapkan sasaran "Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**"**.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	1 Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,90%	70,30%	71,00%	71,12%	71,90%
2.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1 Tingkat kesempatan kerja	3,00%	3,5%	4%	90%	92,00%
3.	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	1 Persentasi penurunan kasus perselisihan	32,50%	35%	37,5%	40%	42,5%
4.	Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13,50%	14,17%	14,87%	15,57%	16,35%
5.	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu :

disnakerind
KOMPETITIF

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{Jumlah\ angkatan\ kerja}{Jumlah\ penduduk\ 15 >} x\ 100\%$	Bidang PPTK dan UPT. BLK / BPS
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{Jumlah\ penduduk\ bekerja}{Jumlah\ angkatan\ kerja} x\ 100\%$	Bidang PPTK/BPS
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{Jumlah\ kasus\ perselisihan\ HI\ tahun\ n-1 -(\ jumlah\ kasus\ perselisihan\ tahun\ n)}{Jumlah\ kasus\ perselisihan\ HI\ tahun\ n-1} x\ 100\%$	Bidang HIJSTK
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	$\frac{PDRB\ tahun\ N-PDRB\ tahun\ N-1}{PDRB\ Tahun\ N} x\ 100\%$	Bidang Perindustrian/ BPS
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sekretariat

disnakerind KOMPETITIF

Adapun Indikator Kinerja Eseleon 3 dan 4 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON 3

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.	1 Nilai Sakip Disnakerind 2 Nilai Reformasi Birokrasi	Sekretariat
1.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja	1 Persentase peserta latih yang berkompeten	Bidang P2TK
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	
1.	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	1 Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	Bidang HIJSTK
1. 2.	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri Menguatnya struktur industri	1. Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri 1 Cakupan fasilitasi tahapan pemgembangan Kawasan Peruntukkan Industri	Bidang Perindustrian

disnakerind
KOMPETITIF

Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Penanggung Jawab
1.	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	1 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan 2 Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2	Menyusun administrasi keuangan SKPD	1 Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	
3	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM	1 Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan 2 Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Melaksanakan p pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	1 Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	
5	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	1 Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	Kepala UPT BLK
6	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM	1 Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan 2 Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7	Melaksanakan p pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	1 Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	

E. PERJANJIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2022 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Tanah Laut, Kepala Dinas dan Para Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tabel 2.6
Target Indikator Kinerja Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,90 %
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	6,5 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	42,5 %
4	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,35 %
5	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik

2. Eselon 3

Tabel 2.7
Target Indikator Kinerja Eselon 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggungjawab
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	1 Nilai Sakip Disnakerind	A	Sekretaris
		2 Nilai Reformasi Birokrasi	AA	
2	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja	1 Persentase peserta latih yang berkompeten	32,90%	Kabid P2TK
3	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1 Persentase tenaga kerja yang	6,50%	

			ditempatkan		
4	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	1	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	32 %	Kabid HIJSTK
5	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	1	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	100 %	Kabid Perindustrian
6	Menguatnya struktur industri	1	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukkan industri	65 %	

3. Eselon 4

Tabel 2.8
Target Indikator Kinerja Eselon 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Indikator	Penanggung Jawab
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
		2	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	
2	Menyusun Administrasi Keuangan SKPD	1	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	5 Dokumen	
3	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	1	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

disnakerind KOMPETITIF

		2	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	40 Orang PNS, 23 Orang PTT dan 7 Orang TA	
4	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	
5	Melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	1	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan pdoduktivitas pada tahun n	192 Orang 11 Lembaga	Kepala UPT BLK
6	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	1	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	3 Buah Mobil Dinas Operasional	Kasubbag TU UPT BLK
		2	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	16 Orang PNS, 6 Orang PTT dan 1 Orang TA	
7	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	

disnakerind KOMPETITIF

E. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut perlu didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan :

Tabel 2.9
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan

No		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
A	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**14.933.460,00**
	1	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**14.933.460,00**
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	14.933.460,00
B	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**147.119.845,00**
	1	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**24.778.500,00**
	1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	24.778.500,00
	2	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**119.341.345,00**
	1	Pelayanan antar Kerja	69.422.145,00
	2	Perluasan Kesempatan Kerja	39.919.830,00
	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.999.370,00
	3	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.000.000,00**
	1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3.000.000,00
C	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**901.360.429,00**
	1	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**901.360.429,00**

disnakerind KOMPETITIF

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran
		1	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	23.240.219,00
		2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	878.120.210,00
D	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**898.842.600,00**
	1	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**836.842.600,00**
		1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	821.682.600,00
		2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.160.000,00
	2	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**62.000.000,00**
		1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	62.000.000,00
Jumlah				**245.919.797**

B. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian :

Tabel 2.10
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran
A	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**824.060.253,00**
	1	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		**824.060.253,00**
		1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	11.550.000,00
		2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	310.000.045,00
		3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	36.726.380,00

		4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	456.311.880,00
		5	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	9.471.948,00
B	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**80.016.376,00**
	1	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**80.016.376,00**
		1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	80.016.376,00
C	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**16.320.000,00**
	1	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**16.320.000,00**
		1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	9.480.000,00
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	6.840.000,00
Jumlah				**103.496.629,00**

C. Urusan Penunjang Kesekretariatan :

- Dinas

Tabel 2.11
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Kesekretariatan Dinas

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.500.999.192,00**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**11.234.260,00**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.506.327,00
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.727.933,00
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**7.215.545.221,00**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.209.532.981,00
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.012.240,00
	3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**513.766.885,00**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.712.737,00
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.056.928,00
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.075542,00
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.451.678,00
		5	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.470.000,00
	4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**634.527.016,00**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.200.000,00
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.327.016,00
	5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**125.925.810,00**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.075.810,00
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.850.000,00
				8.500.999.192,00

- **UPT. BLK**

Tabel 2.12
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Kesekretariatan UPT BLK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**478.279.272,00**
	1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**124.619.526,00**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.901.944,00
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.490.913,00
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.464.964,00
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.656.705,00
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.105.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran
	3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**53.408.552,00**
		1	Pengadaan Mebel	23.726.052,00
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.682.500,00
	4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**266.478.505,00**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.840.000,00
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.775.672,00
	5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**49.635.522,00**
		1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.635.522,00
B	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**1.125.297.559,00**
	1	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		**1.125.297.559,00**
		1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Komptenesi	1.070.355.407,00
		2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	54.942152,00
Jumlah				**1.603.576.831,00**

disnakerind KOMPETITIF

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini menyampaikan capaian kinerja sasaran dan hasil (outcome) yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2023.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja yang menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai.Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja

sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1. Indikator Kinerja Utama SKPD

Dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara membandingkan antara nilai target terhadap realisasi, apabila target terpenuhi maka dikatagorikan tercapai, dan begitu juga sebaliknya apabila nilai target tidak tercapai maka dikatagorikan tidak terpenuhi.

a) Target dan Capaian IKU SKPD

Target dan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.1
Target dan Capaian IKU SKPD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,9%	69,61%	96,82%
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	6,5 %	96,42%	100 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	42,5%	20%	47,06%
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	16,35 %	12,6%	77,06%

5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	90.33	100%

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian IKU SKPD Tahun 2019 s/d 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,19%	72,03%	72,27%	70,92%	71,9%	69,61%	96,82%	71,9%	96,82%
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan Kerja	5,13%	7,29%	96,48%	95,83%	6,5 %	96,42%	100.00%	92%	108,70%
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	2,28%	19.0%	44.0%	40.0%	42,5%	20%	47,06%	42,5%	47,06%
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Indutri Terhadap PDRB	12,85%	12,49%	12,56%	12,60%	16,35 %	12,6%	77,06%	16,35%	77,06%
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,59 (Baik)	87,71 (Baik)	90,33 (Memuaskan)	Sangat Baik	90.66 (Memuaskan)	100%	Sangat Baik	100%

Analisa Capaian Sasaran Strategis SKPD

Capaian sasaran organisasi diukur berdasarkan capaian SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, adapun capaian sasaran organisasi mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu

disnakerind KOMPETITIF

organisasi. Berikut uraian dan analisa sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2023.

1. Sasaran 1 (Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja).

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 1

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,19%	72,03%	72,27%	70,92%	71,9%	69,61%	96,82%	71,9%	96,82%

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja ditandai dengan Indikator "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)". Dalam memformulasikan TPAK, yang dihitung adalah jumlah Angkatan Kerja dibagi jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas dikalikan 100%. Penghitungan TPAK ini berguna untuk mengindikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia

$$TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Jumlah Angkatan Kerja

b = Jumlah penduduk 15thn keatas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 terealisasi sebesar 69,61% dari yang ditargetkan sebesar 71,9% atau mengalami penurunan sebesar 1,31% dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 70,92%.

Sedangkan kalau dibandingkan dengan TPAK Provinsi Kalimantan Selatan yang terealisasi sebesar 69,76% sedikit lebih rendah yaitu sebesar 0,15%.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Tanah Laut Tahun 2019 s/d Tahun 2023

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
ANGKATAN KERJA (Orang)	172.161	181.817	185.049	184.133	185.267
BEKERJA (Orang)	166.334	175.337	178.543	176.458	178.635
PENGANGGURAN (Orang)	5.827	6.490	6.506	7.675	6.632
TPAK (%)	69.19	72,03	72,27	70,92	69,61
TPT (%)	3,38	3,57	3,52	4,17	3,58
PENDUDUK USIA 15th ke atas (orang)	248.819	252.428	256.054	259.629	266.148
TINGKAT KESEMPATAN KERJA (%)	96,62	96,44	96,48	95,83	96,42

Tabel 3.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Prov. Kalsel Tahun 2021 s/d Tahun 2023

Kabupaten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
	2021		2022		2023	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
KALIMANTAN SELATAN	69,08	69,26	69,64	67,55	69,53	69,76
TANAH LAUT	-	72,27	-	70,92	-	69,61

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam memaknai persentase TPAK yang tinggi perlu memperhatikan variabel berikut :

1. **Pendidikan**.

   Implementasi dari program pendidikan dasar 9 tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas angkatan kerja secara umum.

2. **Usia**.

   Berdasarkan usia, maka TPAK untuk kelompok usia 15-19 tahun perlu diperhatikan supaya tetap rendah karena kelompok usia ini termasuk usia sekolah dan kategori anak.

disnakerind KOMPETITIF

3. **Jenis kelamin.**

Umumnya laki-laki lebih banyak terjun ke dunia kerja dibandingkan perempuan, dimana perempuan lebih mempertimbangkan pilihan sebagai ibu rumah tangga dibanding sebagai wanita karir.

Untuk mendukung sasaran ini maka didukung juga dengan indikator **"Persentase Peserta Latih Yang Kompeten"** yang ada pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Peserta latih yang kompeten ini dapat dilihat dari pencari kerja yang terlatih yang mengikuti UJK/Uji Komentensi sesuai dengan kejuruan yang dipilih oleh peserta latih tersebut. Diharapkan dengan banyaknya pencari kerja yang kompeten maka dapat bersaing dengan pencari kerja dari luar Kabupaten Tanah Laut sehingga akan memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.

Adapun cara menghitung persentase peserta latih yang kompeten dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$PK = \frac{\Sigma a}{\Sigma b} \times 100\%$$

disnakerind KOMPETITIF

Keterangan:

PK : Peserta yang Kompeten

a : Jumlah Peserta Latih yang Lulus Uji Kompetensi

b : Jumlah Latih Seluruh Paket Kejuruan

Pada tahun 2023 realisasi capaian persentase peserta latih yang kompeten adalah sebesar 47,68% atau dengan capaian 63,57%, kalau dibandingkan dengan

tahun 2022 dengan capaian sebesar 32,90%, tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,78%. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Bidang P2TK Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase peserta latih yang kompeten	40,79%	66,19%	38,66%	32,90%	75%	47,68%	63,57%	75%	84,76%

Hal ini bisa dikatakan bahwa banyaknya yang berminat mengikuti pelatihan/pemagangan baik yang diselenggarakan oleh dinas maupun yang diselenggarakan oleh BLK, selain mengikuti pelatihan/pemagangan yang diselenggarakan oleh dinas dan BLK, mereka juga banyak yang mengikuti pelatihan di LPK-LPK swasta yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan mengikuti pelatihan di BLK Komunitas yang ada.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan mengusung Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu 500 orang siap kerja per tahun berhasil meningkatkan kompetensi pencari kerja dari 12 paket pelatihan yang sumber dana dari APBD dan 9 paket pelatihan yang sumber dananya APBN Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pelatihan dengan menggunakan APBD sebanyak 12 kejuruan :

1) Service Sepeda Motor Injeksi (pelaksanaan di BLK)
2) Tukang pasang rangka atap baja ringan (pelaksanaan desa Gunung Raja)
3) Tata kecantikan (pelaksanaan desa Ujung Baru)
4) Menjahit pakaian Wanita dewasa (pelaksanaan Desa Bati-Bati)
5) Fillet Welder SMAW 2F/PB (pelaksanaan Desa Sumber Makmur)

disnakerind KOMPETITIF

6) Tukang rumah kayu (pelaksanaan Desa Kayu Abang)

7) Fillet Welder SMAW 2F/PB (pelaksanaan Desa Suka Ramah)

8) Almunium (pelaksanaan Desa Batu Tungku)

9) Digital Marketing (pelaksanaan Desa Ujung Batu)

10) Pembuatan Roti dan Kue (pelaksanaan BLK Pelaihari)

11) Tukang pasang rangka atap baja ringan (pelaksanaan desa Kintap)

12) Fillet Welder SMAW 2F/PB (pelaksanaan Desa Asam-Asam)

Sedangkan pelatihan dengan menggunakan APBN sebanyak 9 kejuruan :

1) Pembuatan Roti dan Kue (pelaksanaan BLK Pelaihari)

2) Pembuatan Roti dan Kue (pelaksanaan BLK Pelaihari)

3) Menjahit pakaian Wanita dewasa (pelaksanaan BLK Pelaihari)

4) Computer Operator Assistant (pelaksanaan BLK Pelaihari)

5) Pembuatan Roti dan Kue (pelaksanaan BLK Pelaihari)

6) Menjahit pakaian Wanita dewasa (pelaksanaan BLK Pelaihari)

7) Practical Office Advance (pelaksanaan BLK Pelaihari)

8) Pemasangan instalasi otomasi industry (pelaksanaan BLK Pelaihari)

9) Plate Welder AMAW 3G-UP PF (pelaksanaan BLK Pelaihari)

dishakerind
KOMPETITIF

Dari sejumlah pelatihan-pelatihan yang diadakan baik oleh dinas maupun BLK Pelaihari diatas yang diikuti sebanyak 336 orang pencari kerja dan yang mengikuti Uji Kompetensi/UJK yaitu sebanyak 144 orang pada tahun 2023.

Selain pelatihan di dinas maupul di BLK Pelaihari, mereka juga mengikuti pelatihan di BLK Komunitas Ubudiyah Bati-Bati dan BLK Komunitas Darussalam juga berhasil meningkatkan kompetensi 55 orang pencari kerja dari pelatihan dengan

Kejuruan Komputer dengan sumber pembiayaan Mandiri, sedangkan 15 LPK Swasta berhasil melatih dengan peserta sebanyak 706 orang pencari kerja dan yang mengikuti Uji Kompentensi/UJK sebanyak 64 orang.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga telah melaksanakan kegiatan Pemagangan (Pelatihan Berbasis Kompetensi/ On The Job Training) dengan sumber dana APBD bagi 29 pencari kerja pada 3 perusahaan yaitu PT. Batu Gunung Mulia Putra Agro (PT. BGMPA), PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., PT. Maju Perkasa Indonesia (PT.MPI). Untuk pencari kerja dengan sumber dana APBN dari Kementerian Ketenagakerjaan diikuti oleh 2 orang pencari kerja dari dan PT. Sinar Nusantara Industries. Peserta magang yang lulus dan kompeten nantinya akan direkrut dan ditempatkan di perusahaan yang diikuti.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Data Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja
Disnakerind Kab. Tanah Laut Tahun 2023

No	Lembaga Penyelenggara	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Org)			Jumlah Kelulusan (Org)		Sumber Dana	Keterangan
			L	P	Jumlah	Pelatihan / Pemagangan	Uji Kompetensi		
1	BBPLK Kementerian Ketenagakerjaan RI	PBK Institutional Boarding	0	0	0	0	0	APBN	Tidak ada pengiriman peserta
2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	PBK Boarding	16	0	16	16	16	APBD	Pelatihan Operator Alat Berat (LPK PT. Alkon Best Mandiri)
3	BLK Pelaihari	PBK Institutional non Boarding	41	103	144	144	144	APBN	9 Paket
		Pelatihan yang dilaksanakan di Desa	136	56	192	192	0	APBD	12 Paket
JUMLAH Pelatihan oleh BLK Pelaihari			**177**	**159**	**336**	**336**	**144**		
4	BLK Komunitas	PBK Institutional non Boarding	28	32	60	55	0	Mandiri	Mandiri
5	LPK Swasta	PBK Institutional Boarding	165	541	706	703	64	Mandiri	
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kal-Sel	Pemagangan Dalam Negeri	2	0	2	2	2	APBN	

disnakerind KOMPETITIF

7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Pemagangan Dalam Negeri	26	3	29	29	29	APBD	3 Paket (PT. MPI, PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT. BGMPA
JUMLAH PBK			**278**	**679**	**957**	**949**	**255**		
JUMLAH PBK & PELATIHAN DI DESA OLEH BLK PELAIHARI			**414**	**735**	**1149**	**1141**	**255**		

Gambar 3.1
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi





Kemudian pada sasaran ini juga didukung dengan indikator UPT BLK yaitu **"Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n",** dimana pada tahun 2023 mampu terealisasi sebanyak 192 orang tenaga kerja juga sebanyak 192 orang atau dengan capaian 100%. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Pada UPT BLK Tahun 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	20201	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1248 Orang	496 Orang	464 Orang	352 Orang	192 Orang	192 Orang	100%	2500 Orang	7,68%

Adapaun kegiatan – kegiatan yang dilakukan di UPT BLK Pelaihari diantaranya Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja pada tahun 2023 yang dilaksanakan di BLK dengan dana APBD sebanyak 2 paket yaitu pelatihan

Pembuatan Roti dan Kue sebanyak 1 paket dan pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi sebanyak 1 paket. Sedangkan yang dilaksanakan di BLK dengan dana APBN sebanyak 9 paket yaitu pelatihan Pembuatan Roti dan Kue sebanyak 3 paket, pelatihan menjahit pakaian wanita dewasa sebanyak 2 paket, pelatihan computer operator assistant 1 paket, pelatihan pratical office advance sebanyak 1 paket, pelatihan pemasangan instalasi otomasi listruk industri sebanyak 1 paket dan pelatihan plate welder SMAW 3G UP PF sebanyak 1 paket.

Kemudian 10 paket yang dilaksanakan di desa dengan dana APBD yaitu pelatihan pemasangan baja ringan ada di 2 desa, Desa gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang dan Desa Kintap Kecamatan Kintap. Pelatihan tukang rumah kayu di Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang. Pelatihan Potong Rambut dan Kecantikan di Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati. Pelatihan Digital Marketing di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari. Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati. Pelatihan Fillet Welder SMAW 2F/PB ada di 3 desa, Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung, Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan dan Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong. Pelatihan Aluminium di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan.

dishakerind
KOMPETITIF

A. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan didukung dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
    a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.

a.1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Komptensi (Dinas dan BLK).

a.2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

B. Permasalahan

Sasaran **"meningkatnya daya saing tenaga kerja"** diukur melalui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menggambarkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu wilayah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK diantaranya :

a) *Faktor demografi yaitu pertambahan jumlah penduduk, dimana terjadi penambahan jumlah jumlah penduduk usia kerja (PUK) tahun 2023 yaitu sebanyak 6.525 orang*. Datanya adalah PUK tahun 2023 sebanyak 266.148 orang, di bandingkan dengan jumlah PUK tahun 2022 sebanyak 259.623 orang.

b) *Pada tahun 2023 terjadi peningkatan 5.391 orang Penduduk Bukan Angkatan Kerja (PBAK).* Adapun datanya adalah sebagai berikut yaitu jumlah total PBAK pada tahun 2023 sebanyak 80.881 orang, dibandingkan tahun 2022 yaitu 75.490 orang

c) *Jumlah lulusan sekolah cukup tinggi sehingga pencari Kerja cukup banyak akan tetapi lapangan pekerjaan baik dari informal dan formal belum*

dishakerind
KOMPETITIF

sepenuhnya mampu menyerap tenaga Kerja. Datanya adalah pada tahun 2023 jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebanyak 1.156 orang, lowongan kerja terdaftar sebanyak 299 jabatan dan penempatan sebanyak 281 orang pada jabatan. Dapat disimpulkan bahwa 24,31 % pencari kerja terdaftar yang dapat memenuhi lowongan pekerjaan tersedia.

C. Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas yaitu :

a) Secara umum perlu peningkatan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal melalui ***kebijakan, program dan strategi yang sesuai dengan perkiraan persediaan tenaga kerja (Angkatan kerja) dan kebutuhan tenaga kerja***, termasuk di dalamnya pencari kerja dengan kondisi ekonomi sejahtera, pra sejahtera dan dengan kesejahteraan ektrim dibawah garis kemiskinan (kemiskinan ekstrem) serta pencari berkebutuhan khusus

b) Secara khusus perlu didorong terjunnya ***Penduduk Bukan Angkatan Kerja (PBAK)*** masuk ke dunia kerja sehingga akan terjadi peningkatan angka TPAK.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Membuka dan menginformasikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat terkait rencana pelatihan dan pemagangan yang diselenggarakan baik oleh dinas maupun BLK. Juga menginformasikan terkait beberapa LPK-LPK Swasta yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut, untuk bisa mengikuti pelatihan di LKP swasta secara mandiri.

disnakerind KOMPETITIF

2. Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna berbiaya dana APBD (kabupaten Tanah Laut dan provinsi Kal-Sel) maupun dana APBN dari pemerintah pusat.
3. Mendorong pemagangan mandiri yang dilakukan oleh perusahaan melalui Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP)
4. Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) dalam rangka perluasan kesempatan kerja kepada pencari kerja dengan melibatkan pencari dengan kondisi ekonomi sejahtera, pra sejahtera dan dengan kesejahteraan ektrim dibawah garis kemiskinan (kemiskinan ekstrem) serta pencari berkebutuhan khusus.
5. Pelatihan berbasis masyarakat dalam rangka perluasan kesempatan kerja kepada pencari kerja dengan melibatkan pencari dengan kondisi ekonomi sejahtera, pra sejahtera dan dengan kesejahteraan ektrim dibawah garis kemiskinan (kemiskinan ekstrem) serta pencari berkebutuhan khusus.
6. Pelatihan wirausahaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja kepada pencari kerja dengan melibatkan pencari dengan kondisi ekonomi sejahtera, pra sejahtera dan dengan kesejahteraan ektrim dibawah garis kemiskinan (kemiskinan ekstrem) serta pencari berkebutuhan khusus.
7. Meningkatkan produktivitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk melatih pencari kerja.
8. Meningkatkan kerjasama kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mendapatkan paket-paket kegiatan dengan sumber dana APBN yang tujuan nya untuk mempersiapkan pencari kerja terjun ke lapangan kerja.
9. Meningkatkan kerjasama kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel untuk mendapatkan paket-paket kegiatan dengan sumber dana

disnakerind KOMPETITIF

APBD provinsi Kal-Sel yang tujuan nya untuk mempersiapkan pencari kerja terjun ke lapangan kerja.

D. Rencana Aksi Tahun 2024

Pada Tahun 2024 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pemagangan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna
2. Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna.
3. Pelatihan Operator alat berat.
4. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pemagangan dalam negeri berbasis pengguna.
5. Rapat koordinasi pelaksanaan pealtihan operator alat berat,
6. Pelatihan computer.
7. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pelatihan computer
8. Pelatihan peningkatan mutu dan pembinaan SDM Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Sosialisasi peningkatan kapasitas instruktur Lembaga pelatihan kerja.
10. Rapat koordinasi pembinaan LPK
11. Sosialisasi peningkatan produktivitas
12. Sosialisasi pengukuran produktivitas

disnakerind KOMPETITIF

2. Sasaran 2 (Meningkatnya Kesempatan Kerja)

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 2

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan Kerja	5,13%	7,29%	96,48%	95,83%	6,5 %	96,42%	100.00%	92%	108,70%

Salah satu Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Dimana untuk menentukan besaran TKK dengan rumus sebagai berikut :

$$TKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

a = Jumlah Penduduk Bekerja

b = Jumlah Angkatan Kerja

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Angka persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2023 adalah 96,42% meningkat 0,59 poin jika dibandingkan dengan TKK tahun 2022 yaitu 95,83%.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) diatas 95% menggambarkan kondisi kesempatan kerja penuh (full employment) yaitu suatu keadaan dimana seseorang sekitar 95 persen dari angkatan kerja mampu dan bersedia sepenuhnya untuk bekerja dalam suatu waktu. Pengangguran sebanyak 5 dari 95% inilah yang dinamakan pengangguran alamiah.

Adapun jika dibandingkan dengan TKK Provinsi Kalimantan Selatan, TKK Kabupaten Tanah Laut lebih tinggi, dengan selisih 0,73% hal ini menggambarkan bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Tanah Laut lebih baik dibandingkan dengan kesempatan kerja tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

disnakerind KOMPETITIF

Perbandingan TKK Kabupaten Tanah Laut dengan TKK Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan TKK Kab. Tanah Laut dengan Prov. Kalsel Tahun 2021 s/d 2023

	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Bekerja	2.109.427	2.092.225	2.079.681
Jumlah Angkatan Kerja	2.219.395	2.196.250	2.079.257
TKK (%) Prov. Kalsel	95,04	95,26	95,69
TKK (%) Kab. Tanah Laut	96,48	96,83	96,42

Adapun perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 s/d Tahun 2023

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
ANGKATAN KERJA (Orang)	172.161	181.817	185.049	184.133	185.267
BEKERJA (Orang)	166.334	175.337	178.543	176.458	178.635
TINGKAT KESEMPATAN KERJA (%)	96,62	96,44	96,48	95,83	96,42

Angka persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2023 adalah 96,42% meningkat 0,59 poin jika dibandingkan dengan TKK tahun 2022 yaitu 95,83%. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) diatas 95% menggambarkan kondisi kesempatan kerja penuh (full employment) yaitu suatu keadaan dimana seseorang sekitar 95 persen dari angkatan kerja mampu dan bersedia sepenuhnya untuk bekerja dalam suatu waktu. Pengangguran sebanyak 5 dari 95 persen inilah yang dinamakan pengangguran alamiah.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada Tingkat Kesempatan Kerja adalah :

a. Usia tenaga kerja
b. Jumlah angkatan kerja yang tersedia. Besarnya permintaan total masyarakat.
c. Jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta.
d. Kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan.

Semakin tinggi TKK mengartikan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal maupun sektor informal terbuka luas di Kabupaten Tanah Laut. Jika dibandingkan dengan target pada maka tingkat kesempatan kerja pada tahun 2023 jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan tahun 2022, tahun 2023 terjadi kenaikan kesempatan kerja dimana pelayanan penempatan tenaga kerja diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (pada sektor formal) adalah 24,57% dengan jumah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 281 orang dari total 2045 orang pencari kerja.

Sementara pada tahun 2022 terjadi penurunan dalam jumlah pencari kerja terdaftar yaitu 889 orang dan yang ditempatkan adalah 119 orang pada tahun 2022 atau dengan persentase sebesar 13,38%. Data ini diperoleh berdasarkan perhitungan internal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mendukung sasaran ini maka didukung juga dengan indikator **"Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan"** yang ada pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Dimana pada tahun 2023 mampu

disnakerind KOMPETITIF

terealisasi sebesar 24,57% dari yang ditargetkan sebesar 6,5% atau dengan capaian lebih dari 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mana terealisasi sebesar 11,39% maka ditahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13,18%. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di sektor formal pada tahun 2023 dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di sektor formal tahun 2022. Salah satu faktor yang menyebabkan tren peningkatan ini antara lain adanya pejabat fungsional pengantar kerja sebanyak satu orang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 sehingga fungsi perantaraan kerja mulai berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 s/d Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	6,5%	96,43%	11,36%	11,39%	6,50%	24,57%	100.00%	6,5%	100.00%

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran ini yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan dalam Penyusunan dokumen RTK Mikro, yang diikuti oleh oleh 8 Perusahaan yaitu PT. JBG, PT WPR, PT. CBP Sukses Makmur, Tbk, PT BGMPA, PT. MPI, RSBCM dan RSIA Ibunda. Dokumen ini akan disusun oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyusun rencana tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

2. Melaksanakan sosialisasi dan pencarian lowongan kerja bagi pencaker, memberikan pelatihan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian agar mereka lebih siap memasuki dunia kerja, melakukan penjaringan calon wirausaha baru melalui kegiatan Sinergitas Mitra Tala Preneur.
4. Melakukan pengawasan ke kecamatan atau perusahaan yang ada di kecamatan tersebut terkait dengan keberadaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang didirikan dan beroperasi di Kabupaten Tanah Laut.

A. Program dan Kegiatan :

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan didukung dengan 2 (dua) program, 4 (empat kegiatan) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, didukung dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Tenaga Kerja (RTK) dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan yaitu :
      a.1. Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja.

disnakerind KOMPETITIF

a.2. Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja.

a.3. Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian LPTKS.

c. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

B. Permasalahan

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sasaran ini adalah :

1. Masih banyak Perusahaan yang belum memahami mekanisme penempatan tenaga kerja dalam negeri, salah satunya adalah wajib lapor lowongan pekerjaan.
2. Memerlukan upaya yang kontinyu dalam pendampingan penyusunan perencanaan tenaga kerja di perusahaan – perusahaan.
3. Masih minimnya informasi lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan.
4. Terbatasnya lowongan-lowongan pekerjaan.
5. Masih maraknya pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia secara unprosedural di Kab. Tanah Laut

disnakerind KOMPETITIF

6. Peserta latih dalam kegiatan Mitra Tala Preneur pada acara Manunggal Tuntung Pandang kurang tepat sasaran.
7. Kurang optimal koordinasi dari pihak desa ke peserta terkait kegiatan tentang kewirausahaan (MTP) tersebut.
8. Minimnya pengetahuan pencari kerja terkait persiapan dalam memasuki dunia kerja.

C. Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

a. Diadakannya sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi pemberi kerja. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, proses rekrutmen, proses Penempatan hingga pada pelaporan Penempatan
b. Pelaksanaan pendampingan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut pada Perusahaan untuk menyusun dokumen perencanaan tenaga kerja mikro,
c. Diharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah akan memberikan kemudahan kesempatan kepada para pemberi kerja atau investor dalam berinvestasi yang kemudian akan menetapkan program

disnakerind
KOMPETITIF

perluasan kesempatan kerja dengan tujuan akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

d. Mendorong penempatan yang dilakukan di Bursa Kerja Khusus (BKK) tingkat Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan Kerja, serta di Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (peraturan Bupati Tanah Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2018).

e. Melakukan pembinaan dalam program kewirausahaan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

D. Rencana Aksi Tahun 2024

Pada Tahun 2024 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Pameran Bursa Kerj/Job Fair 2024.
2. Sosialisasi Peluang Kerja dan migrasi aman keluar negeri.
3. Sosialisasi sinergitas dan optimalisasi pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
4. Sosialisasi mekanisme penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD).
5. Sosialisasi Program peningkatan penghidupan penyandang disabilitas melalui akses keja di sektor formal.

disnakerind KOMPETITIF

6. Sosialisasi sinergitas dan optimalisasi pelayanan penempatan dan pelidungan Pekerja Migran Indonesia.
7. Bimbingan Psikologi bagi calon karyawan.
8. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja.
9. Rapat kegiatan pelayanan antar kerja.
10. Rapat pembinaan bursa kerja khusus (BKK).
11. Sosialisasi penyusunan perencanaan RTK mikro di Perusahaan.
12. Sosialisasi pelaporan penyusunan perencanaan RTK mikro di Perusahaan.
13. Rapat FGD dengan SKPD teknis untuk Analisa data teknis dan paparan kebijakan sectoral.
14. Rapat penyusunan awal dokumen RTK Kabupaten Tanah Laut dengan tim pusrenaker Kemnaker RI.
15. Rapat paparan/ekspose dokumen RTK Kabupaten Tanah Laut.
16. Rapat FGD perbaikan hasil ekspose dokumen RTK Kabupaten Tanah Laut.
17. Rapat FGD dengan SKPD teknis dalam rangka kontribusi data statistic dan konsultasi Analisa data (table) dan penyusunan tim RTK kabupaten Tanah Laut.
18. Rapat penyusunan Pengukuran Indeks Pembangunan ketenagakerjaan kabupaten Tanah Laut.
19. Rapat perbaikan ekspose pengukuran indeks Pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Laut.

disnakerind
KOMPETITIF

20. Rapat FGD dengan SKPD teknis terkait review awal pengembangan BLK dan Pembangunan BLK baru.
21. Rapat FGD dengan SKPD teknis pembahasan pertama pengembangan BLK dan Pembangunan BLK baru.
22. Rapat FGD dengan SKPD teknis pembahasan kedua pengembangan BLK dan Pembangunan BLK baru.
23. Rapat FGD dengan SKPD teknis terkait kesimpulan pengembangan BLK dan Pembangunan BLK baru.
24. Setiap perusahaan yang membuat izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyampaikan informasi lowongan pekerjaan-nya ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
25. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi perusahaan dan pemberi kerja perseorangan. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, prores rekrutmen, proses Penempatan hingga pada pelaporan Penempatan. Kegiatan ini juga dalam rangka mempersiapkan perusahaan dalam partisipasinya mengikuti pelaksanaan pameran kesempatan Kerja/*job fair* yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
26. Memperkuat layanan Informasi Pasar Kerja Daerah melalui aplikasi SALAM.
27. Melaksanakan kegiatan Pemagangan Berbasis Pengguna dengan skema dana APBN dan dana APBD.

disnakerind
KOMPETITIF

28. Melakukan kerjasama dengan UPT BP2MI di Banjarbaru serta Kantor Imigrasi kelas I Banjarmasin dalam upaya meningkatkan kesadaran akan layanan Pekerja Migran Indonesia sampai tingkat kelurahan/desa.

3. Sasaran 3 (Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial)

Tabel 3.13
Perbandingan IKU dan Capaian IKU Sasaran 3 Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	2,28%	19.0%	44.0%	40.0%	42,5%	20%	47,06%	42,5%	47,06%

Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial sebagai salah satu kinerja utama dengan indikator persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial merupakan sasaran strategis ke 3 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang didapat dari jumlah pengurangan kasus tahun berjalan dibanding dengan jumlah kasus tahun sebelumnya dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya dikali 100% :

$$\frac{Jumlah\ kasus\ perselisihan\ HI\ tahun\ n-1-(\ jumlah\ kasus\ perselisihan\ tahun\ n)}{Jumlah\ kasus\ perselisihan\ HI\ tahun\ n-1} \times 100\% = Penurunan\ Kasus$$

Pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) kasus yang masuk untuk dibantu penyelesaiannya oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah kasus yang masuk yang

harus diselesaikan mengalami penurunan, dimana untuk tahun 2022 jumlah kasus perselisihan yang masuk yaitu sebanyak 5 (lima) kasus, dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 80% atau mampu terealisasi sebesar 20% dari yang ditargetkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 42,5% dengan capaian sebesar 40,06%

Untuk mengetahui berapa kasus yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama ini dapat dilihat dari indikator "**Cakupan Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Kerjasama (PB)"** pada Bidang Hubungan Industrian dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang didapat dari jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama dibagi jumlah kasus yang difasilitasi dikali 100%. Dengan rumus :

$$\frac{\text{jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama}}{\text{jumlah kasus yang difasilitasi}} \times 100\% = \text{Realisasi}$$

Pada tahun 2023 terdapat 4 kasus masuk mampu diselesaikan sebanyak 1 kasus melalui Perjanjian Bersama atau sebesar 25% dari yang ditargetkan sebesar 32% dengan capaian 78,13%. Dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat 5 kasus masuk yang mampu diselesaikan melalui Perjanjian Bersama sebanyak 2 kasus atau sebesar 40%.

disnakerind
KOMPETITIF

Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Bidang HIJSTK

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	44%	29%	33,3%	25%	32%	25%	78,13%	39%	64,10%

Berikut disajikan data tahapan kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Tanah Laut rentang waktu 2020 sampai dengan 2023.

Tabel 3.15
DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Bo Atby Nuh	PT. Batu Mas Timur		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
2	Joko Supriyanto	PT. Finansia Multi Finance		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
3	H. Ashuri dkk.	PT. Bhakti Keluarga		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama (PB)
4	Mahyudin Fitri dkk	PT. Sinar Nirwana Sari		V		Selesai dengan Anjuran Mediator

Tabel 3.16
DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific			V	Anjuran Mediator/PHI
2	Sdr. Harry Santoso	PT. Sinar Nirwana Sari		V		Perjanjian Bersama / Bekerja kembali
3	Sdr. Zainal Hakim (Perwakilan pekerja PT. SWA)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur			V	Anjuran Mediator/PHI
4	Sdr. Hartono dkk	PT. Sarana Subur Agrindotama		V		Anjuran Mediator/PHI
5	Sdri. Dewi Yana	PT. Mitra Citra Gemilang		V		Perjanjian Bersama

Tabel 3.17

DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Muhammad Abror (Kuasa) Sdri. Bariyah (Yang dikuasakan)	PT. Fresh On Time Seafood		V		Dicabut
2	Sdri. Suharti Sdr. Yusuf Ramadhan (Pengacara)	CV. Bintang Mulia Bara Group			V	Putusan PHI
3	Sdri. Heni Setyowati Sdr. Hermanus Palapessy (Pengacara)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur		V		Perjanjian Bersama
4	Sdr. Suhardi	PT. Sinar Nirwana Sari	V			Perjanjian Bersama
5	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific		V		Mediasi Ke-2

Tabel 3.18

DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Bahri Sdr. Normansyah	PT. Patriot Intan Abadi		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
2	Sdr. Joko Subandrio dkk	PT. Adidaya Alam Borneo PT. Surya Sakti Darma Kencana		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
3	Sdr. Mustamin	PT. Pribumi Citra Megah Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
4	Sdr. Yoyok Rudianto	PT. Darma Henwa			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
5	Sdr. Rusmadi dkk.	PT. Karya Wijaya Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
6	Sdr. Agus Rohendi dkk	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Tengah		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
7	Sdr. Chepy Eko Wahyudi	PT. Karya Wijaya Utama		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
8	Sdr. Fathorahman dkk	PT. Sinar Surya Jorong		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
9	Sdr. H. Ismail, SE, dkk.	PD. Baratala Tuntung Pandang		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama

disnakerind KOMPETITIF

A. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung sasaran ini didukung dengan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Program Hubungan Industrial, dengan 2 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

1.a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

1.b. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Masih rendahnya kepatuhan pelaku HI terhadap peraturan perundang-undanganterutama berkaitan dengan dalam pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya bagi masyarakat rentan.
2. Masih adanya beberapa perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan pihak perusahaan.
3. Masih rendahnya pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten.
4. Masih kurangnya ASN pada Bidang Hubungan Industrial diatas dengan didukung sehingga layanan yang diberikan masih belum optimal.
5. Masih seluruhnya terfasilitasi pembayaran BPJS bagi warga masyarakat rentan.

C. Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjan dan menerbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintah Desa, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem, sebagai dasar dan pedoman dalam memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi masyarakat rentan di wilayan Kabupaten Tanah Laut.
2. Melalui dewan pengupahan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Tanah Laut dalam rangka Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan menyiapkan bahan perumusan pengembangan Sistem Pengupahan Kabupaten.
3. Memberikan layanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja untuk mempersempit celah hukum dimana sering menjadi penyebab perselisihan hubungan industrial.
4. Harus membuka informasi kepada para pihak terkait akan pentingnya peraturan perusahaan.
5. Harus memiliki alat yang berfungsi sebagai rekam jejak digital yang dikemas dalam bentuk register. Selain itu software ini juga berfungsi sebagai pengingat terhadap perusahaan ketika masa kontrak kerja akan berakhir.
6. Memaksimalkan fungsi aplikasi siManja untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih baik.
7. Memaksimalkan fungsi aplikasi wajib lapor online yang saat ini belum semua perusahaan di Kabupaten Tanah Laut mendaftarkan perusahaannya di aplikasi ini.

disnakerind KOMPETITIF

8. Pembentukan dan mengoptimalisasian Lembaga Hubungan Industrial seperti Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit.
9. Memasukkan anggaran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan pada APBD Kabupaten Tanah Laut melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

D. Rencana Aksi Tahun 2024

Bahwa sesuai dengan saran dan solusi yang kami ajukan maka harapan kami kedepan pada tahun 2024 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan dan mengolah data wajib lapor perusahaan di Kabupaten Tanah Laut;
2. Membuat sosialisasi ketenagakerjaan terkait urgensi pengesahan peraturan perusahaan yang dilaksanakan dan didanai penganggarannya melalui APBD tahun berjalan;
3. Memaksimalkan software Sistem Manajemen Norma Kerja (siManja) untuk mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
4. Mengoptimalisasikan kinerja Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit di Kabupaten Tanah Laut.
5. Memasukkan kembali anggaran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan pada APBD Kabupaten Tanah Laut melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

dishakerind KOMPETITIF

4. Sasaran 4 (Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri)

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi IKU dan Realisasi IKU Tahun 2023 Pada Sasaran 4

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Indutri Terhadap PDRB	12,85%	12,49%	12,56%	12,60%	16,35 %	12,6%	77,06%	16,35%	77,06%

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama pada Kontribusi pada Sektor Industri. Dari data BPS terlihat adanya kenaikan kontribusi di sektor Perindustrian. Kenaikan kinerja sektor industri ditandai dengan naiknya Persentase Peranan Industri pengolahan, dimana share PDRB tahun 2022 sebanyak 10,50 diperkirakan naik **naik 2,1 poin** menjadi 12,60 di Tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan mulai stabilnya harga komoditas CPO di Dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sub kategori yang mendominasi kinerja industri di tanah laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan secara keseluruhan di Tanah Laut. Komoditas utama dari Industri Makanan minuman di tanah laut adalah Crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman tanah laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Di Tanah Laut Kinerja Industri CPO ini di dukung oleh kinerja sub kategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Jorong dan Kintap).

disnakerind KOMPETITIF

Tabel 3.20
Peningkatan Produktivitas Sektor Industri

	2020	2021	2022	2023
Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	12,30	12,10	10,50	12,6 (perkiraan)
Pertumbuhan Sektor industri Pengolahan (%)	-4,27	5,01	3,85	4,6 (perkiraan)

Pertumbuhan sektor industri juga selalu tumbuh positif pada kisaran 2,5-7,5 persen dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang terkontraksi (-4,27) persen akibat pandemi Covid-19. Pada 2023 tetap tumbuh positif akan tetapi melambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk 2023 diperkirakan akan tumbuh positif dan mengalami penguatan. Secara umum pertumbuhan sektor industri pengolahan selalu tumbuh positif namun berfluktuasi.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan diantaranya Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan Berbahan Limbah Kayu Ulin berlokasi di Desa Riam Adungan, Kec. Kintap dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari PT. Scala Custom Banjarbaru, pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jamur Tiram di Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang, Pelatihan Teknis Produksi Pembuatan Sasirangan Ringkel berlokasi di Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang dan Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap.
2. Mengadakan Lomba Kreasi Desain Pengembangan Produk Sasirangan,
3. Melaksanakan kegiatan Magang Pengembangan Produk Sasirangan di BBSPJI Kerajinan dan Batik Yogyakarta bagi para pelaku IKM.

4. Melakukan fasilitasi dan pembinaan Industri dalam rangka standarisasi industri
5. Melakukan penilaian Teknologi Tepat Guna di Kab. Tanah Laut.
6. Mengikuti berbagai even pameran untuk mempromosikan produk IKM Kab. Tanah Laut.

Dapat kami informasikan bahwa di bawah Bidang Perindustrian, khususnya berkaitan dengan Promosi Produk IKM, kita memiliki 2 tempat promosi yaitu Dekranasda dan Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang. Pada kedua tempat promosi ini, sistem yang dipakai adalah titip jual, dimana IKM menitipkan produknya untuk dijual dan dipromosikan.

Adapun penjualan produk IKM di kedua tempat tersebut selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Rekafitulasi Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2023
Pada Dekranasda dan Pusat Promosi

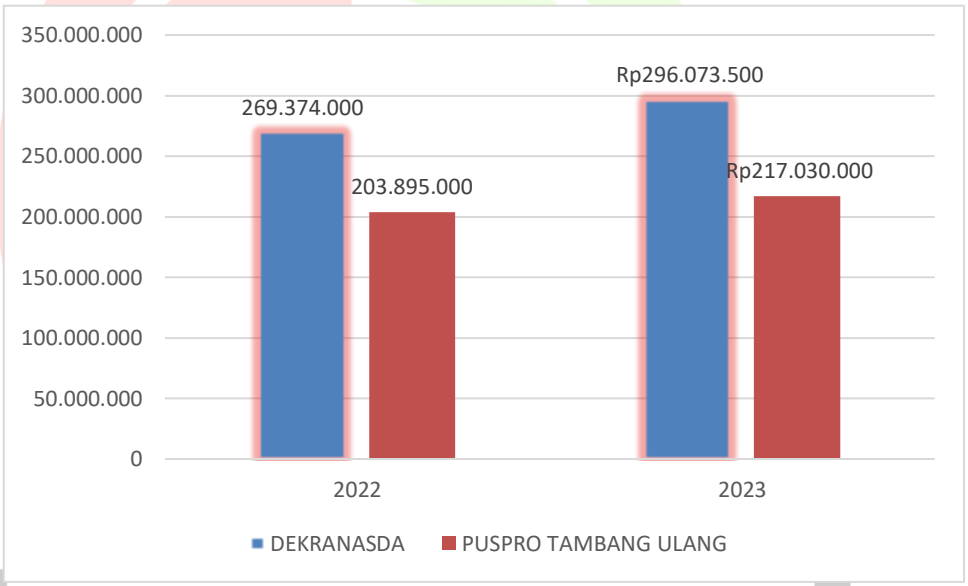
NO	BULAN	DEKRANASDA (Rp)	PUSPRO (Rp)
1	JANUARI	Rp.32.385.000	Rp20.332.000
2	FEBRUARI	Rp26.987.000	Rp9.431.000
3	MARET	Rp16.354.000	Rp19.546.000
4	APRIL	Rp16.329.000	Rp11.922.000
5	MEI	Rp42.283.000	Rp16.814.000
6	JUNI	Rp18.044.000	Rp24.006.000
7	JULI	Rp16.632.000	Rp25.604.000
8	AGUSTUS	Rp27.107.000	Rp20.059.000
9	SEPTEMBER	Rp24.269.500	Rp29.607.000
10	OKTOBER	Rp24.468.000	Rp8.985.000
11	NOVEMBER	Rp26.546.000	Rp17.788.000
12	DESEMBER	Rp24.669.000	Rp12.936.000

disnakerind KOMPETITIF

	TOTAL	**Rp296.073.500**	**Rp217.030.000**
	Rata-rata	**Rp24.672.792**	**Rp18.085.833**

Dari tabel dapat dikatan pada Tahun 2023, Rata-rata penjualan di Dekranasda Rp. 24.672.792/bulan dan di Pusat Promosi rata-rata penjualan Rp. 18.085.833/bulan.

Grafik 3.1
Jumlah Penjualan Produk IKM Tahun 2022 dan 2023 Pada Dekranasda dan Puspro



Selain dari Dekranasda dan Puspro Tambang Ulang, kami juga melakukan promosi produk melalui berbagai event pameran dan juga menggunakan mobil promosi Dekranasda. Hasil Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2023 dari mobil Promosi adalah sebesarRp. 99.663.000, - dan dari berbagai even lain yang di ikuti Rp. 79.021.000,-.

Tabel 3.22
Rekafitulasi Event Yang Diikuti dengan Mobil Promosi Selama Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan Desa	Kecamatan	Hasil Penjualan Produk IKM
1	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 96	Damit Hulu	Batu Ampar	1.692.000

2	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 97	Panggung Baru	Pelaihari	170.000
3	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 98	Martadah	Tambang Ulang	1.490.000
4	Melaksanakan Mobil Expo pada AcaraMuswil Muhammadiyah Se kalsel	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.862.000
5	Melaksanakan Mobil Expo pada AcaraBGMPA	Batu Ampar BGMPA	Batu Ampar	31.415.000
6	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 99	Panggung	Pelaihari	430.000
7	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 100	Batu Tungku	Panyipatan	5.036.000
8	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 101	Kintapura	Kintap	4.205.000
9	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 102	Atu-atu	Pelaihari	732.000
10	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 103	Singai Riam	Pelaihari	820.000
11	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 104	Batilai	Takisung	1.015.000
12	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 105	Damar Lima	Batu Ampar	730.000
13	Melaksanakan Mobil Expo pada Acara Hut Satpol PP	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	411.000
14	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 106	Pemuda	Pelaihari	466.000
15	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 107	Sambangan	Bati-bati	1.186.000
16	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Pasar Murah Oleh Kopdag 2023	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	120.000
17	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 108	Sungai Cuka	Kintap	2.692.000
18	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 109	Ranggang	Takisung	302.000
19	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 110	Sungai Pinang	Tambang Ulang	933.000
20	Mobil Expo pada Partisifasi Pasar Muarah di Kecamatan Kurau	Halaman Kantor Kec. Kurau	Kurau	875.000
21	Melaksanakan Mobile Expo Pada Partisipasi Pelaksanaan Pasar Murah di Lapangan Sepak Bola Dalas Hangit Kodim 1009	Lap Kodim 1009	Pelaihari	305.000
22	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 111	Ujung	Bati-bati	1.143.000
23	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 112	Kurau Utara	Bumi Makmur	1.522.000
24	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 113	Ujung Batu	Pelaihari	275.000
25	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 114	Maluka Baulin	Kurau	1.332.000
26	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 115	Telaga	Pelaihari	1.228.000
27	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 116	Pandahan	Bati-bati	1.560.000
28	Mobil Expo pada Event Tala Educatoan Expo (H+1)	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.871.000
29	Mobil Expo pada Event Tala Educatoan Expo (H+2)	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.957.000
30	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 117	Kintap Kecil	Kintap	3.232.000
31	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 118	Ambungan	Pelaihari	150.000

32	Melaksanakan Mobile Expo Pada Partisipasi Pelaksanaan Pasar Murah di Lapangan Balai Desa Tanjung Dewa	Lap Balai Desa	Panyipatan/ Tanjung Dewa	260.000
33	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 119	Batakan	Panyipatan	1.345.000
34	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 120	Bumi Jaya	Pelaihari	1.160.000
35	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 121	Bentok Kampung	Bati-bati	2.311.000
36	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Rapat Apkasi Prov Kalsel	Best World Kindai Hotel	Banjarmasin	1.873.000
37	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 122	Kunyit	Bajuin	588.000
38	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 123	Kurau	Kurau	983.000
39	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 124	Tampang	Pelaihari	813.000
40	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 125	Jilatan	Batu Ampar	1.784.000
41	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Pembukaan TMMD Ke 117	Lapangan 17 Agustus	Telaga Langsat	658.000
42	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 127	Handil Maluka	Bumi Makmur	496.000
43	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 129	Tambak Karya	Kurau	848.000
44	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 128	Ranggang Dalam	Takisung	692.000
45	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Rapat Apkasi di Tangerang	ICE BSD Tangerang	Banten	8.252.000
46	Melaksanakan Mobile Expo Pada Partisipasi Pasar Murah acara HKKB Murakata	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	1.105.000
47	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Penutupan TMMD Ke 117	Lapangan 17 Agustus	Telaga Langsat	632.000
48	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 129	Pantai Harapan	Bumi Makmur	952.000
49	Mobile Expo pada even Hari Pramuka	Halaman Kantor Bupati	Pemda Tala	754.000
				99.663.000

Tabel 3.23
Pameran Dan Mini Expo Yang Diikuti Selama Tahun 2023

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan Desa	Tempat	Hasil Penjualan Produk IKM
1	01-06 Mar 23	INACRAFT 2023 (Jakarta Covention Center)	JCC	Jakarta	5.430.000
2	10-12 Mar 23	Banjarmasin Sasirangan Festifal (BSF) 2023	Menara Pantau Siring	Banjarmasin	7.100.000
3	Mar-23	Indonesia Tourism & Trade Investment Expo Riorita Batam	Batam	Batam	4.759.000
4	22-23 Mei 2023	Promosi Produk Unggulan Kabupaten pada Kegiatan Rakornas Penumbuhan dan Pengembangan IKM	Galaxy Hotel	Banjarmasin	875.000
5	07 s.d 09 jul 2023	Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XLV Kecamatan Kintap	Desa Kintap	Kintap	6.797.000
6	01 Sept 2023	Mini Expo Pada event lomba kain sasirangan	Sarantang saruntung	pemda Tala	621.000
7	01 Sept 2023	Bazar MTQ Nasional Ke-34 Banjarbaru Tahun 2023 H1	Lapangan Murjani	Banjarbaru	7.355.000
8	05-07 Sep 2023	Gema Al-Qur'an Tanah Laut Tahun 2023 H1	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	15.001.000

9	12-18 Sep 2023	Pameran Kriyanusa Tahun 2023 H1	Jakarta Convention Center, Jakarta	Jakarta	9.120.000
10	21-24 September 2023	Pekan Raya Banjarmasin H1	Siring Pantau Banjarmasin	Banjarmasin	7.908.000
11	15 s.d 20 November 2023	Indokraf Expo 2023	Mataram Mall, Lombok	Lombok Nusa Tenggara Barat	3.747.000
12	30 Nop sd 03 Des 2023	Tala Expo 2023	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.566.000
13	07 sd 13 Des 2023	Festifal Kuliner Tanjung Tabalong	Tanjung Expo Center, Mabuun	Mabuun Tanjung Tabalong	7.742.000
			TOTAL		**79.021.000**

Untuk mendukung sasaran ke 4 diatas, didukung dengan 2 indikator kinerja pada Bidang Perindustrian yaitu indikator **"Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri"** dan indikator **"Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukan industri"** yang capaian selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Bidang Perindustrian

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	20201	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	155	23%	59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menguatnya struktur industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukkan industri	25	17%	17%	83%	65%	83%	>100%	65%	>100%

Analisa "Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri"

Seiring dengan kebijakan nasional Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut terus melakukan pembinaan kepada IKM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan data yang dihimpun jumlah IKM di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 5.523 IKM dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 3.25
Jumlah IKM di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan 2023

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM 2023			
			Data Lama	Data Baru	Tutup/ Tidak Aktif	TOTAL Data Aktif
1	Bajuin	Bajuin	17	6	0	23
		Galam	28	0	0	28
		Ketapang	29	0	0	29
		Kunyit	34	7	0	41
		Pemalongan	14	0	0	14
		Sungai Bakar	49	5	0	54
		Tanjung	13	31	0	44
		Tebing Siring	17	30	0	47
		Tirta Jaya	28	0	0	28
2	Bati-Bati	Banyu Irang	53	0	0	53
		Bati-Bati	43	0	0	43
		Bentok Darat	57	0	0	57
		Bentok Kampung	25	0	0	25
		Benua Raya	15	30	0	45
		Kait-Kait	26	0	0	26
		Kait-Kait Baru	38	0	0	38
		Liang Anggang	72	0	0	72
		Nusa Indah	33	0	0	33
		Padang	39	33	0	72
		Pandahan	139	0	0	139
		Sambangan	17	18	0	35
		Ujung	43	5	0	48
		Ujung Baru	34	8	0	42
3	Batu Ampar	Ambawang	9	23	0	32

disnakerind KOMPETITIF

		Batu Ampar	37	0	0	37
		Bluru	20	0	0	20
		Damar Lima	13	0	0	13
		Damit	44	0	0	44
		Damit Hulu	30	0	0	30
		Durian Bungkuk	52	0	0	52
		Gunung Mas	36	0	0	36
		Gunung Melati	18	21	0	39
		Jilatan	16	0	0	16
		Jilatan Alur	10	19	0	29
		Pantai Linuh	10	0	0	10
		Tajau Mulya	20	0	0	20
		Tajau Pecah	69	0	0	69
4	Bumi Makmur	Bumi Harapan	27	6	0	33
		Handil Babirik	59	5	0	64
		Handil Birayang Atas	13	16	0	29
		Handil Birayang Bawah	3	2	0	5
		Handil Gayam	73	5	0	78
		Handil Labuan Amas	10	0	0	10
		Handil Maluka	20	0	0	20
		Handil Suruk	31	0	0	31
		Kurau Utara	57	0	0	57
		Pantai Harapan	15	0	0	15
		Sungai Rasau	15	2	0	17
5	Jorong	Alur	20	36	0	56
		Asam Asam	18	0	0	18
		Asam Jaya	55	0	0	55
		Asri Mulya	16	0	0	16
		Batalang	4	7	0	11

disnakerind KOMPETIF

		Jorong	27	0	0	27
		Karang Rejo	28	0	0	28
		Muara Asam Asam	17	25	0	42
		Sabuhur	78	16	0	94
		Simpang Empat Sungai Baru	64	0	0	64
		Swarangan	20	5	0	25
6	Kintap	Bukit Mulia	16	0	0	16
		Kebun Raya	36	0	0	36
		Kintap	28	11	0	39
		Kintap Kecil	40	0	0	40
		Kintapura	15	0	0	15
		Mekar Sari	21	29	0	50
		Muara Kintap	25	0	0	25
		Pandan Sari	43	0	0	43
		Pasir Putih	15	24	0	39
		Riam Adungan	4	0	0	4
		Salaman	5	0	0	5
		Sebamban Baru	21	0	0	21
		Sumber Jaya	46	0	0	46
		Sungai Cuka	52	0	0	52
7	Kurau	Bawah Layung	11	60	0	71
		Handil Negara	81	0	0	81
		Kali Besar	35	26	0	61
		Kurau	31	0	0	31
		Maluka Baulin	61	0	0	61
		Padang Luas	50	0	0	50
		Raden	11	11	0	22
		Sarikandi	33	0	0	33

disnakerind KOMPETITIF

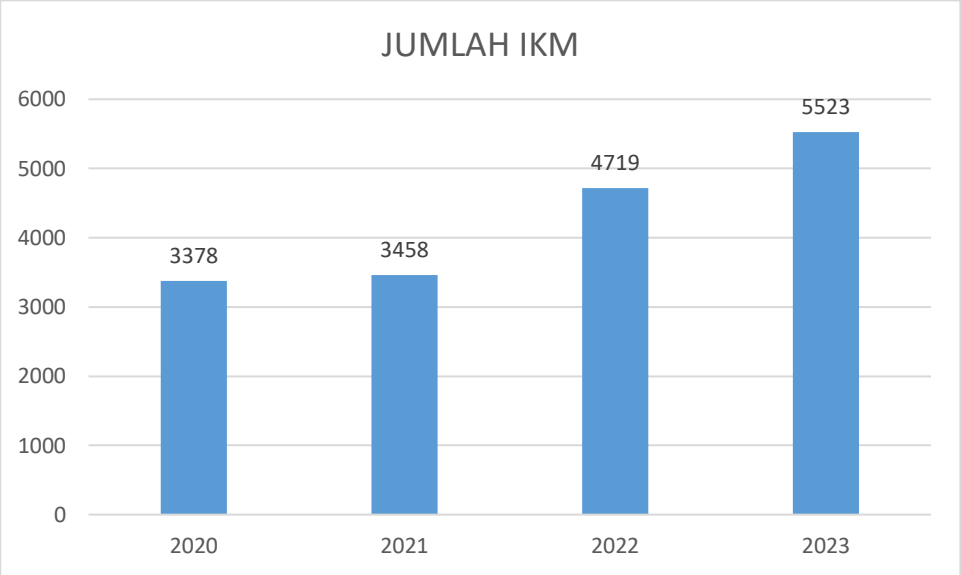
		Sungai Bakau	12	12	0	24
		Tambak Karya	25	0	0	25
		Tambak Sarinah	46	0	0	46
8	Panyipatan	Batakan	173	17	0	190
		Batu Mulya	29	15	0	44
		Batu Tungku	35	0	0	35
		Bumi Asih	19	24	0	43
		Kandangan Baru	36	0	0	36
		Kandangan Lama	41	0	0	41
		Kuringkit	55	10	0	65
		Panyipatan	63	0	0	63
		Suka Ramah	36	0	0	36
		Tanjung Dewa	31	0	0	31
9	Pelaihari	Ambungan	29	0	0	29
		Atu-Atu	11	0	0	11
		Bumi Jaya	46	0	0	46
		Guntung Besar	13	0	0	13
		Kampung Baru	23	0	0	23
		Kelurahan Angsau	14	0	0	14
		Kelurahan Karang Taruna	48	4	0	52
		Kelurahan Pabahanan	38	0	0	38
		Kelurahan Pelaihari	45	0	0	45
		Kelurahan Sarang Halang	19	0	0	19
		Panggung	12	0	0	12
		Panggung Baru	20	0	0	20
		Panjaratan	17	0	0	17
		Pemuda	36	0	0	36
		Sumber Mulia	25	0	0	25
		Sungai Riam	38	0	0	38

disnakerind KOMPETIF

		Tampang	17	0	0	17
		Telaga	27	0	0	27
		Tungkaran	7	0	0	7
		Ujung Batu	29	0	0	29
10	Takisung	Batilai	57	0	0	57
		Benua Lawas	59	0	7	52
		Benua Tengah	61	0	0	61
		Gunung Makmur	53	70	0	123
		Kuala Tambangan	38	0	0	38
		Pagatan Besar	69	0	0	69
		Ranggang	58	0	0	58
		Ranggang Dalam	18	0	0	18
		Sumber Makmur	84	0	0	84
		Tabanio	32	46	0	78
		Takisung	146	40	0	186
		Telaga Langsat	31	8	0	39
11	Tambang Ulang	Bingkulu	14	10	0	24
		Gunung Raja	61	0	0	61
		Kayu Abang	12	17	0	29
		Martadah	22	0	0	22
		Martadah Baru	24	0	0	24
		Pulau Sari	57	14	0	71
		Sungai Jelai	28	0	0	28
		Sungai Pinang	27	0	0	27
		Tambang Ulang	56	2	0	58
TOTAL			**4719**	**811**	**7**	**5523**

disnakerind KOMPETITIF

Grafik 3.2
Jumlah IKM Tahun 2020 sd 2023 di Kab. Tanah Laut



Berdasarkan pendataan tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah IKM dari 4.719 industri menjadi 5.523 industri atau terjadi peningkatan 17,03 % .

Dari total keseluruhan jumlah IKM tersebut sebagaimana tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan pembinaan-pembinaan kepada para IKM agar mereka diharapkan bisa berinovasi dengan memanfaatkan produk-produk unggulan di daerahnya, baik itu hasil laut, perikanan, perkebunan, ataupun bahan-bahan alam disekitarnya.

Untuk membantu dan mendukung IKM agar lebih inovasi dan kreatif, pembinaan yang diberikan yaitu melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan antara lain Fasilitasi Halal, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan fasilitasi TKDN dimana fasilitasi tersebut dapat memberikan nilai tambah dan daya saing produk IKM di pasaran.

disnakerind KOMPETITIF

Kemudian dalam rangka mengembangkan inovasi, juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas para pelaku usaha IKM dan beberapa kegiatan pelatihan yaitu sebagai berikut :

- Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan Berbahan Limbah Kayu Ulin berlokasi di Desa Riam Adungan, Kec. Kintap dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari PT. Scala Custom Banjarbaru.
- Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jamur Tiram di Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang dengan jumlah peserta 20 orang.
- Pelatihan Teknis Produksi Pembuatan Sasirangan Ringkel berlokasi di Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari Feraria Putri Sasirangan.
- Pelatihan Teknis Produksi Pembuatan Sasirangan Ringkel berlokasi di Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari Almanah Sasirangan.
- Kegiatan Lomba Kreasi Desain Pengembangan Produk Sasirangan.
- Kegiatan Magang Pengembangan Produk Sasirangan di BBSPJI Kerajinan dan Batik Yogyakarta.

disnakerind KOMPETITIF

Persentase IKM yang sudah mengembangkan inovasi dan kreativitas industri sebesar 216%, hasil ini dapat dihitung dari jumlah IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri dibagi target IKM mengembangkan inovasi dan kreativitas industri= (54/25)x100%= 216%.

Berdasrkan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi diberikan sebagai upaya untuk meningkat inovasi dan kreativitas industri, tahun 2023 ada 54 IKM

yang sudah mengembangkan inovasi dan kreativitas pada usaha industrinya. Perkembangan jumlah IKM yang mampu mengembangkan inovasi dan kerativitas industri di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

disnakerind
KOMPETITIF

Tabel 3.26
Jumlah IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri di Tahun 2020 s/d Tahun 2023

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	**Industri Kreatif**	**Industri Kreatif**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**
1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan	1	IKM Radita Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari	1	Kelompok Sumber Rezeki Kerupuk Udang	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	1	IKM Q'Chips	Jl. K.H Dewantoro RT.007/RW.002, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan	2	IKM Kambit Jaya Collection	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	2	Kelompok Kenanga Terasi	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	2	IKM Morievera	Jl. Kebun Kopi RT.011/004 Desa Telaga Langsat, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut
3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	3	IKM KA'MCE Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari	3	Kelompok Berkah Mangrove Sirup dan Selai	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	3	IKM Pawon Mlaku Si Suki	Jl. Jaya No.65 RT.004/RW.002, Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut
4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	4	IKM Bungas Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang	4	Kelompok Kayuh Baimbai Kerupuk Udang	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	4	IKM Kin's Kitchen	KOMPLEK SHAKELA PERMATA BLOK 6 NO 68, RT/RW -, SARANG HALANG, PELAIHARI
5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	5	IKM HAYAART	Desa Tampang, Kec. Pelaihari	5	Kelompok Nelayan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	5	IKM Okmalasari Bakery	JL. LUMBUS, GUNUNG MAKMUR, RT/RW -

disnakerind KOMPETIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	**Industri Kreatif**	**Industri Kreatif**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**
							Membangun Ikan Asin				, GUNUNG MAKMUR, TAKISUNG
6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari	6	IKM Yeni Souvenir	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	6	IKM Mama Aisyah Pentol Ikan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	6	IKM Raos Pisan	JL. A. TILAM, RT/RW -, PABAHANAN, PELAIHARI
7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong	7	IKM Karya Mandiri Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	7	IKM Mama Zahro Pentol Ikan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	7	KWT. Dewi Sri	JL.UPT PANDANSARI, RT/RW -, PANDAN SARI, KINTAP
8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	8	IKM Arthadeva Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	8	IKM Berkat Motekar	Ds. Pemuda, Kec. Pelaihari	8	IKM UR. Sukanti	ROMBONGAN 4 RT.011 RW.005, RT/RW -, SUMBER MAKMUR, TAKISUNG
9	IKM Karya Mulia *Creative* Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	9	IKM Ferariaputri Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang	9	IKM Batu Balai	Ds. Batilai, Kec. Takisung	9	IKM Berkah	DESA TANJUNG PASAR RT.006 RW.004, RT/RW -, TANJUNG, BAJUIN
10	IKM Zidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	10	IKM Ari Collection	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	10	IKM Kecap Kelulut	Ds. Gunung Melati, Kec. Batu Ampar	10	IKM Barokah	MARTADAH RT.004 RW.002, RT/RW -, MARTADAH, TAMBANG ULANG

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	**Industri Kreatif**	**Industri Kreatif**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**
11	IKM Amanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	11	IKM 3 Srikandi	Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap	11	IKM Minuman Herbal dan VCO Bu Kokom	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin	11	IKM Mama Kiki	DS. TAMBAK KARYA RT.004 RW.002, RT/RW -, TAMBAK KARYA, KURAU
12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	12	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin	12	IKM Kerupuk Haruan Acil Rapidah	Ds. Benua Raya Kec. Bati - Bati	12	IKM Mama Hendra	DS. TAMBAK KARYA RT.005 RW.002, RT/RW -, TAMBAK KARYA, KURAU
13	IKM El Banjarie Eksklusive	Pelaihari	13	IKM Blok D Sasirangan	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	13	IKM Kerupuk Haruan Acil Rusmanina	Ds. Benua Raya Kec. Bati - Bati	13	IKM Bang Surya	JL. KH. DEWANTARA, RT/RW -, ANGSAU, PELAIHARI
14	IKM Kerajinan Anyaman Purun “Bunga Purun”	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	14	IKM Maswara Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong	14	IKM Perbengkelan Maju Bersama	Ds. Tajau Pecah Kec.Batu Ampar	14	IKM Hafizah	GUNTUNG BESAR RT.002, RT/RW -, GUNTUNG BESAR, PELAIHARI
15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung	15	IKM MIMI Collection	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	15	IKM Kerupuk Udang Harapan Bersama	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	15	IKM Acil A'ah	GANG BAHAGIA PAGATAN BESAR RT.003/RW.001 DESA PAGATAN BESAR PAGATAN BESAR TAKISUNG
16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	16	IKM Penjahit Hafiz	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	16	IKM Kerupuk Parimata	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung	16	IKM Produk Ilmu Tala	JL. SOEPIRMAN, RT/RW -, KUNYIT, BAJUIN

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	**Industri Kreatif**	**Industri Kreatif**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**
								Dewa, Kec. Panyipatan			
17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin	17	IKM Berkah Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	17	IKM Kerupuk Seafood Lestari	Perumahan Putih RT.015/RW.001, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	17	IKM Mama Candra	JL TAQWA RT10 RW4 PABAHANAN, RT/RW -, PABAHANAN, PELAIHARI
18	IKM Faeyza RNH *Collection*	Desa Takisung, Kec. Takisung	18	IKM Rumah Jahit Septia	Karang Jawa, Kec. Pelaihari	18	IKM Alika Cake	Ds. Kintap Kecil, Kec. Kintap	18	IKM H5DU	JL. AMBAWANG RT 3 RW 2 , RT/RW -, SARANG HALANG, PELAIHARI
19	IKM *Cisyl Collection*	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	19	IKM Calap Baimbai	Desa Jorong, Kec. Jorong	19	Bumdes Mandiri Sejahtera (Lahang)	Ds. Guntung Besar, Kec. Pelaihari	19	IKM Kamil	M. ASAM-ASAM, RT/RW -, MUARA ASAM-ASAM, JORONG
20	IKM *Lenn Made Collection*	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang	20	IKM Iyan Jahit	Pasar Tapandang Berseri, Kec. Pelaihari	20	IKM Kerupuk Pantai Indah	Jl. Pahlawan RT.007/RW.002, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	20	IKM 3 Saudara	JL. A. YANI, RT/RW -, KINTAP KECIL, KINTAP
21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	21	IKM Sasirangan Markisa	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	21	IKM Kerupuk Telur Asin	Jl. A. Yani KM. 28 RT.007 RW.002 Desa Pandahan, Kec. Bati-Bati	21	IKM R Food	JL.MAJAPAHIT RT.005/002, RT/RW -, BUMI JAYA, PELAIHARI
22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	22	IKM Comel Sasirangan	Desa Tebing Siring, Kec. Bajuin	22	IKM Kerupuk Budi Bersama	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002, Desa Tanjung	22	IKM Barokah	JL. MAJAPAHIT RT.005 RW.002, RT/RW -, BUMI JAYA, PELAIHARI

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	**Industri Kreatif**	**Industri Kreatif**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**
								Dewa, Kec.Panyipatan			
23	IKM Pondok Jahit	Pelaihari	23	IKM Pondok Cobek	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan	23	IKM Keripik Jaya Makmur	Gunung Melati RT.006/RW.002	23	IKM Misbah Rizki Nurul	JL. GN. TAMBUNI RT.007 RW.002, RT/RW -, RANGGANG DALAM, TAKISUNG
24	IKM Novie Konveksi	Pelaihari	24	IKM Pengolah Limbah Botol Plastik Jailani	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	24	IKM Madu Kelulut Sakatalu	Jl. Goa Marmer RT.005/RW.002, Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin	24	Bumdes Mandiri Sejahtera	JALAN WAHYU HARTOPO RT 1 DESA GUNTUNG BESAR, RT/RW 1/1, GUNTUNG BESAR, PELAIHARI
25	IKM *LuwesCollection*	Pelaihari	25	IKM Bunga Artifisial Sri Wulandari	Desa Ketapang, Kec. Bajuin	25	IKM Kerupuk Cinta Rasa	Jl. Datu Pamalutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	25	IKM Dabfarm (Dua Anak Bunda)	JALAN GOHA RT.004 RW.002 PASIR PUTIH KINTAP
			26	IKM Miniatur Kapal by SKN	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	26	IKM Kerupuk Mercusuar	Jl. Datu Pamalutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	26	Kelompok UPPKA Bajuin	JL. SIDO RUKUN RT.005 RW.003, BAJUIN

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
			27	IKM Kerajinan Paket Hantaran Shavana	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	27	IKM Kerupuk Pulau Datu	Jl. Pelabuhan Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	27	Kelompok Melati	JL. RAYA TAKISUNG, RT/RW -, TAKISUNG, TAKISUNG
			28	IKM Bunga Artifisial Esi Lukas	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	28	IKM Kerupuk Karnita	Jl. Pariwisata RT.021/RW.011, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	28	IKM Telur Asin Cap Enaaak	Desa Panjaratan Pelaihari
			29	IKM Gerah Polo Art Galery	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	29	IKM Kerupuk Mama Zidan	Jl. Muhara RT.002/RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	29	IKM Dapur Berkah	Desa Martadah Baru RT.007/RW.002
			30	IKM Perbengkelan Makmur Berkarya	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	30	IKM Radjamadu	Ds. Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	30	IKM Syabit Taajir	JL. A. YANI RT/RW,- DESA PASIR PUTIH, KINTAP
			31	IKM Kreanov POLITALA	Desa Panggung, Kec. Pelaihari	31	IKM Madu Gunung Katunun	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari	31	IKM Tiga Serangkai	JL. A. YANI RT.5 DESA KINTAP KECIL KEC. KINTAP
			32	IKM Hangit Craft	Desa Bingkulu, Kec. Tambang Ulang				32	Kelompok Tanjung Dewa Anugerah	JL. MUHARA RT.03/RW.01 DESA TANJUNG DEWA, KEC. PANYIPATAN

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
			33	IKM Perbengkelan Karya Bersama Teknologi	Desa Pandan Sari, Kec. Kintap				33	Kelompok Batakan Berkah	JL. PARIWISATA RT.01/RW.05, DESA BATAKAN, KEC. PANYIPATAN
			34	IKM Perbengkelan Maju Jaya	Desa Asam Jaya, Kec. Jorong				34	IKM Keripik Alifa	Desa Sungai Riam RT.01/RW.01, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
			35	IKM Perbengkelan Karya Gemilang	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung				35	IKM Risma Amplang	JL. RAYA TAKISUNG, RT/RW -, TAKISUNG, TAKISUNG
			36	IKM NS Teknik	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung				36	IKM Pinus Permai	Jl. Pariwisata RT.016/RW.004, Desa Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut,
			37	IKM Perbengkelan SMR	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung				37	IKM Oemah Olahan Mbak Dyah	Jl. Kolonel Soepirman RT.07/RW.02, Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
			38	IKM Perbengkelan Abdul Mu'thie	Desa Bentok Kampung, Kec. Bati-Bati				38	IKM Rumaisyah Bakery & Cake	Jalan Pasar Hewan RT.07, Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	**Industri Kreatif**	**Industri Kreatif**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**
			39	KUB Handil Maluka Jaya	Desa Handil Maluka, Kec.Bumi Makmur				39	IKM Rien's Kitchen	Jl. Junjung Buih, Gg. Berkah RT.17, Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
			40	IKM Al Makka Sasirangan	Desa Kayu Habang, Kec. Tambang Ulang				40	IKM Risol Bunda MTS	Jl. KH. Dewantara Gg. Damai RT.07, Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
			41	IKM Ainun Sasirangan	Desa Handil Babirik, Kec.Bumi Makmur				41	IKM Pentol Sempol Aqila	Jl. Purnawirawan AMD. Manunggal RT.03/RW.01, Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
			42	IKM Bintang Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati				42	IKM Kerupuk Udang Acil Jasimah	Jl. Saripul Desa Kurau RT.06/RW.03, Kab. Tanah Laut,
			43	IKM Farid Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati				43	IKM Dapur Mas Muflih	Jl. Rancah No.2 RT.06/03 Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
			44	IKM Pondok Sasirangan	Ds. Gunung Raja, Kec. Bati - Bati				44	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru RT.02 RW.01, Kec. Tambang Ulang

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
			45	IKM Keramat Handicraft	Ds. Takisung, Kec. Takisung				45	IKM Arthadeva Gallery	Desa Martadah Baru RT.02 RW.01, Kec. Tambang Ulang
			46	IKM Zulfa & Yara Collection	Ds. Bentok Kampung, Kec. Takisung				46	PT. Berkah Amanah Décor	Jl. Ki Hajar Dewantara No.28, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
			47	IKM Salsabila Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung				47	IKM Olahan Jamur Poniti	Desa Sungai Jelai RT.03 RW.01, Kec. Tambang Ulang
			48	IKM Art Collection	Ds. Sumber Makmur, Kecamatan Takisung				48	IKM Olahan Jamur Endar Ningsih	Desa Sungai Jelai RT.02 RW.01, Kec. Tambang Ulang
			49	IKM Rossy Collection	Ds. Benua Lawas, Kecamatan Takisung				49	IKM Kancil Sasirangan	Desa Kintap Kecil RT.05 RW.02, Kec. Kintap
			50	IKM Yeyen Shakila Collection	Kel. Karang Jawa, Kecamatan Pelaihari				50	IKM Kerajinan Kayu Ulin UDARA (Ulin Dandaman Riam Adungan)	Desa Riam Adungan RT.04 RW.02, Kec. Kintap
			51	IKM Windy Collection	Ds. Benua Tengah,				51	Fanesya Sasirangan	Desa Banyu Irang, Gg. Rakat Rt. 07 Rw.03

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	**Industri Kreatif**	**Industri Kreatif**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**
					Kecamatan Takisung						Kec.Bati-Bati
			52	IKM Neyney Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung				52	Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru RT.02 RW.01, Kec. Tambang Ulang
			53	IKM N&K Collection	Ds. Takisung, Kec. Takisung				53	Hayaart	Jl A Yani Desa Tampang Dusun 1 RT 1 No 73 Kec. Pelaihari
			54	IKM Purajut	Kelurahan Angsau, Kec, Pelaihari				54	D'Fesyen	Perumahan Aura Megah Tegency no 51, Jln Anggrek desa Panggung Kec. Pelaihari
			55	IKM Makmur Jaya Lestari	Ds. Telaga Langsat, Kec. Takisung						
			56	IKM Perbengkelan Jaya Lestari Teknilk	Ds. Durian Bungkuk, Kec. Batu Ampar						
			57	IKM Sirajul Huda Konveksi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari						
			58	IKM BYHAF Minuman Herbal	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin						

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
			59	IKM Susu Kurma DMM	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari						
			60	IKM BONZEE Food	Ds. Sungai Riam, Kec. Pelaihari						
			61	IKM Keripik Naschips	Ds. Panggung, Kec. Pelaihari						
			62	IKM Peyek PA HAJI	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari						
			63	IKM Kerupuk Karya Bersama	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan						
			64	IKM Kue Kering Sefhia	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari						
			65	IKM Keripik AUDIT	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari						
			66	IKM Sahabat Madu	Ds. Sumber Makmur, Kec. Takisung						
			67	IKM Tahu Tempe RIDHO JAYA 88	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari						

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
			68	IKM Keripik Jamur SYYFA	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari						
			69	IKM Minuman Herbal YOGATAMA	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari						
			70	IKM Kerupuk Udang MAMA RIAN	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur						
			71	IKM Keripik Jamur 3 Ardi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari						
			72	IKM Kue Kering MB-LA	Ds. Liang Anggang, Kec. Bati - Bati						
			73	IKM Kerupuk Amplang PINUS PERMAI	Ds. Batakan, Kec. Panyipatan						
			74	IKM RISMA Amplang	Ds. Takisung Kec. Takisung						
			75	IKM Kerupuk Duitri	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan						
			76	IKM Susu Segar ROJO KOYO	Ds. Ambungan Kec. Pelaihari						
			77	IKM Amplang OMEGA	Ds. Takisung, Kec. Takisung						

disnakerind KOMPETITIF

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	**Industri Kreatif**	**Industri Kreatif**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**	**No**	**Industri Kreatif**	**Alamat**
			78	IKM Kerupuk Nyai Kasnah	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan						

Tahun	Target di RPJMD	Realisasi
2020	10 unit usaha	25 unit usaha
2021	15unit usaha	78 unit usaha
2022	20 unit usaha	31 unit usaha
2023	25 unit usaha	54 unit usaha

Keterangan : **INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) YANG MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIVITAS INDUSTRI (INDUSTRI KREATIF**

disnakerind KOMPETITIF

Analisa Cakupan Fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri Jorong atau biasa kita kenal dengan sebutan Kawasan Industri Jorong (KIJ) memiliki luas sebesar 957,73 Ha. Kawasan Industri Jorong dikelola oleh PT. Wahyu Putra Ramadhan, adapun Lokasi KIJ berada di Desa Swarangan, Desa Karang Rejo, Desa Muara Asam-asam, Desa Asam Jaya, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan Industri Jorong merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Adapun pengelola dan pelaksana PSN Kawasan Industri Jorong yang ditetapkan adalah PT Wahyu Putra Ramadhan. Dengan dasar tersebut, mulai tahun 2022 PT Wahyu Putra Ramadhan menjajaki untuk melengkapi seluruh legalitas usaha yang disyaratkan sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Saat ini PT. WPR sedang mengurus izin Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai kelengkapan dalam memperoleh Izin Usaha kawasan Industri (IUKI).

dishakerind
KOMPETITIF

Pengembangan kawasan untuk industri sudah mencakup 83% yang dapat dihitung dari Tahapan Kawasan Industri yang telah dilaksanakan dibagi 6 tahapan Kawasan Industri = (5/6)x100%=83%. Adapun 6 tahapan menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142 Tahun 2015 pasal 9 adalah sbb :

a. pemilihan lokasi;

Lokasi Kawasan Industri Jorong sesuai dengan Perda RTRW Kab. Tanah Laut nomor 6 Tahun 2023 berlokasi di Desa Swarangan, Desa Karang Rejo, Desa Muara

Asam-asam, Desa Asam Jaya, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 957,73 Ha.

Gambar 3.3
Peta Lokasi Kawasan Industri Jorong



b. perizinan;

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) OSS Nomor 10072310316301001
- Perizinan Usaha Berbasis Resiko (OSS) No izin : 91200049624290007
- Nomor Induk Berusaha : 9120004962429

c. pengadaan tanah;

Tanah yang dimiliki oleh PT. WPR seluas 65 Ha dan saat ini sedang proses perolehan hak atas tanah dan sedang berproses di ATR/BPN.

d. pematangan tanah;

Pematangan tanah adalah proses pembentukan atau pembersihan lahan sebelum digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan perumahan atau proyek konstruksi lainnya. Pematangan tanah meliputi antara lain penyiangan, penggalian, pemindahan, pembuatan sistem drainase dll. Tahapan pematangan tanah di KIJ belum optimal dilaksanakan dan masih berproses.

e. pembangunan infrastruktur; dan

dishakerind KOMPETITIF

Di Kawasan Industri Jorong telah dibangun kantor pengelola, stok pile dan jalan kawasan.

f. pengelolaan

Berdasar Surat Bupati Tanah Laut No. 530/14/BAPIND/XI/2022 tanggal 22 November 2022 dan Surat Ketua Tim KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) No. IPW/07/D.VI.M.EKON.KPPIP/01/2023 tanggal 12 Januari 2023, pengelola dan pelaksana PSN KI Jorong adalah PT. Wahyu Putra Ramadhan dengan KBLI 68130 (Kawasan Industri).

A. Program dan Kegiatan

Dalam mendukung terlaksananya sasaran ini, didukung dengan ada 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
   b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
   c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industr.
   d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
   e. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

disnakerind KOMPETITIF

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
   a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

disnakerind KOMPETITIF

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi pada Tahun 2023, antara lain :

1. Belum lengkapnya mesin dan peralatan serta workshop pada Rumah Kemasan untuk membantu IKM dalam memperbaiki kualitas produknya dimana penyebab salah satunya karena tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat dimana dana DAK hanya bagi Daerah Prioritas Pariwisata, sehingga Tanah

Laut tidak dapat mengajukan permohonan dana tersebut untuk pengembangan rumah kemasan, baik untuk pembelian mesin peralatan maupun pembangunan workshop.

2. Tidak adanya Dana Intensif Daerah (DID) dimana untuk dana DID, dimana pada tahun 2021 Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut mendapatkan dana DID dan dialokasikan untuk fasilitasi Hak Merek, Halal maupun pembelian mesin peralatan bagi IKM dan juga pembelian mobil promosi. Karena tahun 2022 ini tidak dapat, maka target kami untuk fasilitasi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hanya bisa kami laksanakan dengan mekanisme self declare. Begitupun dengan fasilitasi hak merek tahun 2023 ini berasal dari dana provinsi sehingga masih banyak IKM yang belum terfasilitasi Hak Merek.
3. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pameran, sehingga pada tahun 2023 tidak dapat maksimal dalam mengikuti kegiatan promosi produk.
4. Kurangnya jumlah petugas Showroom Dekranasda
5. Kurangnya jumlah kegiatan pelatihan peningkatan wirausaha baru.
6. Kurang aktifnya petugas pendata Industri Kecil dan Menengah dalam mendata usaha yang ada di wilayahnya masing-masing.
7. Kurangnya jumlah kegiatan pelatihan peningkatan wirausaha baru yang bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat.
8. Masih berprosesnya AMDAL dan ANDALALIN sebagai persyaratan Izin Usaha Kawasan Industri.

disnakerind
KOMPETITIF

C. Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa solusi yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya mesin dan peralatan serta workshop pada Rumah Kemasan untuk membantu IKM dalam memperbaiki kualitas produknya, maka Disnakerind akan mendorong Pemkab dan Pemrov agar Kabupaten Tanah Laut masuk menjadi Daerah Prioritas Pariwisata, serta sounding ke kementrian agar kebijakan DAK dapat direvisi.
2. Mendorong Bappeda dan TAPD agar Disnakerind mendapatkan alokasi DID yang dapat kami manfaatkan untuk pemulihan ekonomi IKM dan untuk standarisasi produk IKM
3. Kerjasama dengan SKPD lain khususnya terkait promosi produk dan investasi.
4. Perlunya penambahan staf/JFU
5. Perlunya penambahan PTT di Gallery Dekranasda karena saat ini hanya ada 1 PTT yang bertugas melayani pengunjung.
6. Dilakukan beberapa langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pelatihan industri serta fasilitasi penerapan teknologi bagi IKM di Kabupaten Tanah Laut.
7. Perlunya evaluasi skema pendataan Industri Kecil dan Menengah.

D. Rencana Aksi 2024

Bahwa sesuai dengan saran yang kami ajukan maka kami pada tahun 2024 akan melaksanakan sebagai berikut :

disnakerind KOMPETITIF

1. Untuk mendukung aspek keamanan Rumah Kemasan, maka di Tahun 2024 Disnakerind mengusulkan pembangunan pagar Rumah Kemasan serta akan mengusulkan pembangunan Workshop dan pengadaan mesin rumah kemasan.
2. Mengusulkan ke Kementrian Perindustrian mengenai perubahan regulasi mengenai kebijakan Daerah Khusus Pariwisata, sehingga Tanah Laut dapat mendapatkan dana DAK untuk membangun ruang produksi/workshop.
3. Menumbuhkan sentra-sentra Industri Kecil Menengah dan penguatan kelembagaan serta legalisasi sentra.
4. Mengusulkan penambahan Staf/JFU dan PTT
5. Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD terkait, juga akan membangun komunikasi dengan asosiasi maupun lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk menumbuhkan jiwa enterpreneur melalui sosialisasi maupun pelatihan teknis lainnya.
6. Mendorong sertifikasi TKDN Industri Kecil, Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Hak Merek bagi Industri Kecil.
7. Penggunaa Aplikasi Sosialita dan EKatalog local dalam belanja pengadaan.
8. Meningkatkan pelayanan Rumah Kemasan
9. Melakukan koordinasi dengan Dinas DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perhubungan, Kementrian Perhubungan dan DPMPTSP Kab. Tanah Laut untuk mendorong percepatan penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri.

disnakerind
KOMPETITIF

10. Koordinasi dengan Instansi vertikal dan SKPD terkait percepatan pembangunan Kawasan Industri Jorong, khususnya pelabuhan dan pemenuhan infrastruktur dasar.

4. Sasaran 5 (Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat).

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi IKU dan Realisasi IKU Tahun 2023 Pada Sasaran 5

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	Baik	Baik	Memuaskan	Sangat Baik	90.66%	100%	Sangat Baik	100%

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Disnakerind melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui upaya perubahan - perubahan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mengacu pada 8 (Delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk meningkatkan tingkat kualitas Pelayanan Publik. Survey

disnakerind KOMPETITIF

Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari Tingkat kinerja pelayanan Disnakerind, menginventarisasi harapan dan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam hal peningkatan mutu Pelayanan dan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan serta sebagai dasar pertimbangan kebijakan terkait optimalisasi layanan public.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari 9 Unsur Pelayanan pada Disnakerind, nilai rata-rata **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** Disnakerind mengalami peningkatan yaitu sebesar **90,66** dengan **Predikat A (Sangat Baik),** dimana nilai pada tahun sebelumnya yaitu **90,34** dengan **Predikat A (Sangat Baik).**

Terkait dengan Pembangunan Zona Integritas pada **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas** dari Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mendapatkan **nilai 93,20** dimana predikat ini diberikan kepada pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan public.

Adapun ruang lingkup evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Disnakerind sebagai berikut :

1. Pemenuhan dokumen atas hasil yang dicapai pada komponen Pengungkit, Reform dan Komponen Hasil dari Rencana Kerja Zona Integritas;

2. Memastikan hal – hal terkait pencapaian kinerja, yaitu :

   a) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK;

   b) Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP

   c) Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN / LHKASN;

   d) Komitmen dan pemahaman pimpinan serta seluruh pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas

   e) Kualitas implementasi dan komponen pengungkit serta data dukung implementasinya

   f) Inovasi – inovasi yang telah dilakukan

   g) Penilaian Hasil Survey yang diperoleh, yaitu Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survey Persepsi Kuliatas Pelayanan (IPKP)

   h) Tren pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya

   i) Penerapan Manajemen Resiko

      Keterkaitan Pembangunan Zona Integritas dengan Isu Strategis SKPD

Dan sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkup Disnakerind, kami mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi sebagaimana Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tahun 2023 ini Disnakerind melakukan Survey Perilaku Anti Korupsi di lingkup Disnakerind dimana responden dari survey ini adalah para *user* / Masyarakat yang mendapatkan layanan di lingkup Disnakerind. Adapun hasil **Indeks Prilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2023** yaitu sebesar **93,64** dengan predikat **A (Sangat Baik).**

Dapat kami sampaikan pula bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Tanah Laut Nomor 188.45 / 821 – KUM / 2023 tentang Penetapan Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah serta Penetapan Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik, menyatakan bahwa **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) Kabupaten Tanah Laut sebagai perangkat daerah yang berkinerja** "**SANGAT BAIK" dengan Kategori A.** Adapun rincian penilaian kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi (94,13) penilaian tahun 2021 s.d Juni 2022
2. Skor Reformasi Birokrasi (30)
3. Nilai SAKIP (83,20) penilaian tahun 2021
4. Skor SAKIP (20)
5. Pesentase Capaian IKU (96,13
6. Skor IKU (20)
7. Inovasi yang diciptakan (1)
8. Skor Inovasi (3)
9. Persentase(99,45)
10. Nilai Realisasi Keuangan (79,83)

disnakerind
KOMPETITIF

Dari Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, penilaian Reformasi Birokasi masih berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sampai dengan penilaian tanggal 10 Juni 2022 yaitu sebesar **34,17 (94,13%)** atau termasuk dalam **Kategori AA (Istimewa)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari pemenuhan dokumen 8 (delapan) Area

Perubahan.). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian semakin akuntabel, berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Pencapaian ini didukung dengan adanya pembenahan – pembenahan salah satunya melalui inovasi tidak hanya pelayanan pada kesekretariatan tapi juga pada pelayanan teknis bidang. Hal ini untuk melakukan perbaikan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, tata kelola administrasi, tata kelola perencanaan dan penganggaran, tata Kelola layanan publik yang baik berbasis digital dan mengikuti perkembangan regulasi dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Inovasi – inovasi yang dikembangkan oleh Disnakerind pada tahun 2023 antara lain:

1. *Smart Office, Smart Service (SOSS)* dengan berbagai fitur layanan kesekretariatan baik Umum dan Kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan
2. Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM)
3. Pendataan Terintegrasi Pelayanan dan Pemasaran Produk (Pelanduk)
4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rentan Daerah (Ji-Stand)

disnakerind
KOMPETITIF

Untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis diperlukan terobosan dan inovasi oleh unit kerja SKPD. Pada tahun 2022 Disnakerind meluncurkan sebuah Inovasi yang setiap tahun mengalami pengembangan fitur, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan *Online System Melalui Smart Office, Smart Service (SOSS)* dan *Sahabat Layanan Masyarakat*

(SALAM) yang digunakan oleh seluruh pegawai di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap seluruh pegawai, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut melakukan beberapa terobosan untuk meringankan tugas-tugas administratif yang diberikan kepada pegawai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempermudah berbagai proses kegiatan administratif melalui pengembangan alat kerja berbentuk aplikasi berbasis Web dan Android, yaitu Aplikasi ***Smart Office – Smart Service* (SOSS)**;

Aplikasi *Smart Office – Smart Service* (SOSS), merupakan alat kerja Sekretariat dalam kegiatan administrasi pemerintahan, sekaligus alat kerja Bidang untuk kegiatan pelayanan publik yang dibangun dalam dua aplikasi berbeda yang terintegrasi (*Dual Sides App System*), yaitu Aplikasi SOSS untuk Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dan Aplikasi SOSS untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan mengusung motto *One Record, One Thousand Reports*.

SOSS adalah Aplikasi berbasis Web (*Web-Based App*) dan Android yang menerapkan sistem aplikasi dua arah (*Dual Sides App System*), yaitu dua aplikasi berbeda yang terintegrasi antara Pegawai DISNAKERIND, dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Fungsi Aplikasi SOSS bagi Pegawai adalah sebagai alat kerja untuk berbagai kegiatan administrasi pemerintahan, dan sebagai pengelola (Admin) untuk berbagai layanan publik DISNAKERIND.

disnakerind
KOMPETITIF

Fungsi Aplikasi SOSS bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah untuk mengakses berbagai informasi dan fitur layanan publik berbasis online yang dikembangkan oleh DISNAKERIND.

Registrasi pada Aplikasi SOSS untuk pegawai hanya bisa dilakukan oleh pegawai DISNAKERIND dan UPT BLK dengan merujuk pada data Nomor Identitas PNS, yaitu NIP, dan Nomor Identitas PTT, yaitu NR-PTT.

Sedangkan Registrasi Aplikasi SOSS untuk publik dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan merujuk pada Nomor Identitas Kependudukan.

Otoritas akses Aplikasi SOSS untuk pegawai diatur berdasarkan otoritas tugas dan fungsi jabatannya pada struktur organisasi DISNAKERIND.

Ruang lingkung Aplikasi SOSS untuk pegawai dibagi menjadi dua menu utama yang dibangun sesuai dengan Stuktur Organisasi DISNAKERIND, yaitu:

a. Menu Smart Office untuk alat kerja Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Menu Umum;
    2. Sub Menu Kepegawaian;
    3. Sub Menu Perencanaan; dan
    4. Sub Menu Keuangan

b. Menu Smart Service untuk alat kerja Bidang terdiri dari:
    1. Sub Menu Bidang P2TK
    2. Sub Menu Bidang HIJSTK
    3. Sub Menu Bidang Perindustrian
    4. Sub Menu UPT BLK

Ruang lingkup Aplikasi SOSS untuk publik terdiri dari tiga menu utama, yaitu:

a. Menu promosi produk industri lokal di halaman utama;

disnakerind KOMPETITIF

b. Menu berita dan informasi ketenagakerjaan dan perindustrian.

c. Menu layanan publik DISNAKERIND dan BLK.

Menu Smart Office

(1) Menu Smart Office berisi Sub Aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DISNAKERIND, serta Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK.

(2) Sub Aplikasi pada Menu Smart Office terdiri dari:

a. Sub Menu Umum

1. Aplikasi Register Surat Masuk
2. Aplikasi Register Surat Keluar
3. Aplikasi Register Nota Dinas
4. Aplikasi Register Telaahan Staf
5. Aplikasi Register Rekomendasi
6. Aplikasi Register SK
7. Aplikasi Register SPT dan SPPD (Monas)
8. Aplikasi Register Penggunaan Mobil Dinas dan BBM (Krisna)
9. Aplikasi Register Penggunaan Rumah Dinas BLK

b. Sub Menu Kepegawaian

1. Aplikasi Register Kehadiran Pegawai
2. Aplikasi Data Pegawai
3. Aplikasi Data Jabatan

c. Sub Menu Perencanaan

1. Aplikasi Penyusunan RKA
2. Aplikasi Renja dan Renstra

disnakerind KOMPETITIF

d. Sub Menu Keuangan

1. Aplikasi Penatausahaan Kinerja dan Keuangan (Si Kijang).

Menu Smart Service

(1) Menu Smart Service berisi Sub Aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan publik pada Bidang P2TK, Bidang HIJSTK, Bidang Perindustrian, dan UPT BLK pada DISNAKERIND.

(2) Sub Aplikasi pada Menu Smart Service terdiri dari:

1. Sub Menu Bidang P2TK
   a. Aplikasi Pasar Kerja
   b. Aplikasi Karir Hub
2. Sub Menu Bidang HIJSTK
   a. Aplikasi Manajemen Norma Tenaga Kerja.
   b. Aplikasi Data Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Sub Menu Bidang Perindustrian
   a. Aplikasi Pendataan Industri
   b. Aplikasi Pencatatan Penjualan Dekranasda dan Puspro
4. Sub Menu UPT BLK
   a. Aplikasi Data Peserta Pelatihan
   b. Aplikasi Data Alumni Pelatihan

Menu Aplikasi SALAM.

Adapun menu dan sub menu Aplikasi SALAM terdiri dari :

1. Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja :
   a. Pasar Kerja.
   b. Dan menu link aplikasi eksternal lainnya.
2. Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerja.

disnakerind KOMPETITIF

1. SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Norma Kerja).
2. Dan menu link aplikasi eksternal lainnya.

3. Pelayanan Perindustrian.
    a. GAYATRI (Gerakan Pemberdayaan Industri).
    b. Toko Dekranasda.
    c. Pusat Promosi.
    d. Dan menu link aplikasi eksternal lainnya.

Dapat disampaikan pula bahwa inovasi – inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut,yaitu SOSS dan SALAM, diusulkan dalam Lomba Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023, dimana inovasi yang diusulkan masuk nominasi 10 besar, dan SOSS mendapatkan Juara II dalam lomba inovasi tersebut. Pembuatan dan pengembangan inovasi di Disnakerind akan terus dilakukan dalam rangka perbaikan dan optimalisasi pelayanan baik layanan di sektor Kesekretariatan, Ketenagakerjaan maupun di sektor Perindustrian.

Dari prestasi – prestasi yang diperoleh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023, menunjukan bahwa adanya komitmen bersama untuk sungguh – sungguh melaksanakan Fakta Integritas, Perjanjian Kinerja maupun tugas dan tanggungjawab sesuai tupoksi, baik dari Tingkat Pimpinan maupun di Tingkat struktur di bawahnya.

Untuk mendukung sasaran diatas, didukung dengan 2 indikator pada sekretariat yaitu indikator **“Nilai SAKIP Disnakerind”** dan indikator **“Nilai**

disnakerind KOMPETITIF

Reformasi Birokrasi". Adapun capaian pada tahun 2023 untuk 2 indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Sekretariat

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
				2019	20201	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3						4				
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	1	Nilai Sakip Disnakerind	B	BB	BB	A	Istimewa	81,55 / A (Memuaskan)	100%	A	100%
		2	Nilai Reformasi Birokrasi	-	B	A	AA	Sangat Istimewa	94,13 / AA (Istimewa)	100%	AA	100%

Analisa indikator Nilai SAKIP Disnakerind

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut SKPD Nomor 700/247/LHE AKIP-Insp/2022 tanggal 23 Juni 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut :
   a. Renstra SKPD;
   b. Renja SKPD;
   c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
   d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
   e. Perjanjian Kinerja (PK);
   f. Cascading/Pohon Kinerja;
   g. Laporan Kinerja; dan
   h. Dokumen lain yang mendukung.

disnakerind KOMPETITIF

2. Sasaran ini dicapai dengan melihat nilai SAKIP Disnakerind .
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai sebesar 81,55 dengan kategori **A (Memuaskan)** dimana nilai tersebut menggambarkan bahwa unit kerja dapat meminpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
4. Nilai sebagaimana diberikan tersebut merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Perencanaan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 24,60% dari bobot sebesar 30% dengan kategori A (memuaskan);
   b. Pengukuran Kinerja, diperoleh nilai sebesar 24,60% dari bobot sebesar 30% dengan kategori A (Memuaskan);
   c. Pelaporan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 11,85% dari bobot sebesar 15% dengan kategori BB (Sangat Baik);
   d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diperoleh nilai sebesar 20,50% dari bobot sebesar 25% dengan kategori A (Memuaskan).
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya dapat diperoleh nilai sebesar 100%.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana diatas, tim reviu SAKIP memberikan saran kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan perbaikan kedepannya yaitu sebagai berikut :

disnakerind KOMPETITIF

a. Perencanaan Kinerja.

   Terhadap dokumen perencanaan kinerja yang telah diselaraskan agar dipertahankan dan bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja.

b. Pengukuran Kinerja.

   Agar dilakukan reviu berjenjang atas pencapaian target kinerja yang disusun dan didokumentasikan sehingga dapat diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja.

c. Pelaporan Kinerja.

   - Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja;
   - Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai;
   - Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level kabupaten/propinsi/nasional.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

   Agar saran hasil evaluasi APIP segera ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang.

Dari hasil nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yaitu dengan nilai yaitu sebesar **81,55** dengan kategori **A (Memuaskan)** dibandingkan dengan nilai tahun 2022 yaitu dengan nilai sebesar **83,20** kategori **A (Memuaskan)** memang mengalami penurunan yaitu sebesar **1,65 poin,** hal ini dikarenakan ada indikator penilaian yang berbeda pada tahun 2023 yang

disnakerind KOMPETITIF

sebelumnya tidak ada di tahun 2022, salah satunya dengan memasukkan perbandingan secara nasional, provinsi maupun kabupaten, dan ini juga berdampak kepada hasil nilai SAKIP disemua SKPD.

Akan tetapi Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2023 yaitu sebesar **81,55** dengan kategori **A (Memuaskan)** jauh lebih baik dibandingkan dengan NILAI SAKIP Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dengan nilai sebesar **67,52** atau selisih **14,03 poin,** dan juga dibandingkan dengan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar **81,21** sedikit lebih baik dengan selisih **0,34 poin.**

Dari hasil NIlai SAKIP Disnakerind yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu dengan nilai **81,55** dengan kategori **A (Memuaskan)**, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memperoleh peringkat ke 2 sebagai SKPD yang berkinerja terbaik dari seluruh SKPD di Kabupaten Tanah Laut. Hasil ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memperoleh peringkat ke 3 sebagai SKPD yang berkinerja terbaik dari seluruh SKPD di Kabupaten Tanah Laut dengan nilai sebesar **83,20** kategori **A (Memuaskan).**

Indikator Nilai SAKIP Disnakerind ini juga didukung dengan 3 indikator pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang indikator serta capaiannya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Perbandingan dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Subbag Perencanaan dan Keuangan

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	20201	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	30 Dokumen	16,67%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	10 Laporan	40%
2	Menyusun Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Secara Berkala di Susun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	18 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	15 Dokumen	33,33%

Kinerja subbag perencanaan dan keuangan secara keseluruhan mampu terealisasi 100% dari masing – masing target pada indikator – indikator kinerjanya. Dima kegiatan yang dilakukan pada subbag perencanaan dan keuangan adalah penyusunan dokumen perencanaan, dokumen evaluasi kinerja dan dokumen-dokumen laporan keuangan.

Dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2023 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Anggaran 2024, Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun Anggaran 2023 dan Renstra Disnakerind Tahun 2024-2026

Dokumen evaluasi kinerja yang disusun pada tahun 2023 adalah Laporan Kinerja Disnakerin Tahun 2022, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)/Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Disnakerind Tahun 2022, Laporan Kinerja/Statistik Disnakerind Tahun 2023 per bulan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 per triwulan, Laporan Risk Register/Manajemen Resiko Tahun 2024.

Dokumen laporan keuangan yang disusun pada tahun 2023 adalah Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semestar, Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan CALK.

disnakerind KOMPETITIF

Analisa Indikator Nilai RB Disnakerind.

Dalam upaya meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dimana nilai SAKIP Disnakerind dan Nilai Reformasi Birokrasi menjadi indikator kinerja utama yang menjadi target capaian pada Sekretariat, Sekretariat Disnakerind

melakukan upaya untuk melakukan perubahan - perubahan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang diarahkan pada 8 (Delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45 / 821 – KUM / 2023 tentang Penetapan Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah serta Penetapan Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik, menyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) Kabupaten Tanah Laut sebagai perangkat daerah yang berkinerja "**SANGAT BAIK" dengan Kategori A.** Adapun rincian penilaian kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi (94,13) penilaian tahun 2021 s.d Juni 2022
2. Skor Reformasi Birokrasi (30)
3. Nilai SAKIP (83,20) penilaian tahun 2021
4. Skor SAKIP (20)
5. Pesentase Capaian IKU (96,13
6. Skor IKU (20)
7. Inovasi yang diciptakan (1)
8. Skor Inovasi (3)
9. Persentase(99,45)

disnakerind KOMPETITIF

10. Nilai Realisasi Keuangan (79,83)

Dari Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, penilaian Reformasi Birokasi masih berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sampai dengan penilaian tanggal 10 Juni 2022 yaitu sebesar **34,17 (94,13%)** atau termasuk dalam **Kategori AA (Istimewa)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari pemenuhan dokumen 8 (delapan) Area Perubahan. Adapun penilaian yang dilakukan melalui proses reviu dokumen penilaian dalam LKE yang terintegrasi dengan Aplikasi Si Krebo, dengan rincian penilaian sebagai berikut :

5. Aspek Pemenuhan Dokumen.
   a. Manajemen Perubahan, penilaian pemenuhan pada area manajemen perubahan dalam komponen proses diukur dari 4 (empat) indikator, yaitu tim reformasi birokrasi, road map reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi, serta perubahan pola piker dan budaya kerja. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini adalah sebesar 2,00 (100%).
   b. Deregulasi Kebijakan, penilaian pemenuhan pada area deregulasi kebijakan dalam komponen proses diukur dari 1 (satu) indikator, yaitu harmonisasi. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini adalah sebesar 1,00 (100%).
   c. Penataan dan Penguatan Organisasi, penilaian pemenuhan pada area penataan dan penguatan organisasi dalam komponen proses diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu evaluasi kelembagaan dan tindak lanjut evaluasi.. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini adalah sebesar 2,00 (100%).
   d. Penataan Tata Laksana, penilaian pemenuhan pada area penataan tata laksana dalam komponen proses diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP). Hasil penilaian mandiri pada area

dishakerind KOMPETITIF

perubahan ini adalah sebesar 1,00 (100%).

e. Penataan Sistem Manajemen SDM, penilaian pemenuhan pada area penataan sistem manajemen SDM dalam komponen proses diukur dari 6 (enam) indikator, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai, pelaksanaan evaluasi jabatan dan sistem informasi kepegawaian.. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini adalah sebesar 1,37 (97,86%).

f. Penguatan Akuntabilitas, penilaian pemenuhan pada area penguatan akuntabilitas dalam komponen proses diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini adalah sebesar 2,50 (100%).

g. Penguatan Pengawasan, penilaian pemenuhan pada area penguatan pengawasan dalam komponen proses diukur dari 6 (enam) indikator, yaitu gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistle-blowing sistem, penanganan benturan kepentingan dan pembangunan zona integritas. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini adalah sebesar 2,00 (100%).

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, penilaian pemenuhan pada area peningkatan kualitas pelayanan publik dalam komponen proses diukur dari 5 (lima) indikator, yaitu standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini adalah sebesar 2,50 (100%).

2. Aspek Reform.

   a. Manajemen Perubahan, penilaian pemenuhan pada area manajemen

dishakerind
KOMPETITIF

perubahan dalam komponen reform diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu komitmen dalam perubahan, komitmen pimpinan dan pembangunan budaya kerja. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut ini adalah sebesar 3,00 (100%).

b. Deregulasi Kebijakan, penilaian pemenuhan pada area deregulasi kebijakan dalam komponen reform diukur dari 1 (satu) indikator, yaitu peran kebijakan. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut ini adalah sebesar 1,00 (100%).

c. Penataan dan Penguatan Organisasi, penilaian pemenuhan pada area penataan dan penguatan organisasi dalam komponen reform diukur dari 1 (satu) indikator, yaitu organisasi berbasis kinerja. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut ini adalah sebesar 1,50 (100%).

d. Penataan Tatalaksana, penilaian pemenuhan pada area penataan tatalaksana dalam komponen reform diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu peta proses bisnis yang mempengaruhi penyederhanaan jabatan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan transformasi digital yang memberikan nilai manfaat. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut ini adalah sebesar 3,75 (100%).

e. Penataan Sistem Manajemen SDM, penilaian pemenuhan pada area penataan sistem manajemen SDM dalam komponen reform diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu kinerja individu, assessment pegawai dan pelanggaran disiplin pegawai. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut ini adalah sebesar 1,50 (75,00%).

f. Penguatan Akuntabilitas, penilaian pemenuhan pada area penguatan akuntabilitas dalam komponen reform diukur dari 4 (empat) indikator, yaitu

dishakerind
KOMPETITIF

efektifitas dan efisiensi anggaran, pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja, pemberian reward dan punishment dan kerangka logis kinerja. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut ini adalah sebesar 3,15 (84,00%).

g. Penguatan pengawasan, penilaian pemenuhan pada area penguatan pengawasan dalam komponen reform diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu penyampaian LHKPN, penyampaian LHKASN dan penangan pengaduan. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut ini adalah sebesar 1,95 (100%).
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, penilaian pemenuhan pada area peningkatan kualitas pelayanan publik dalam komponen reform diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu upaya dan/atau inovasi pelayanan public dan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi. Hasil penilaian mandiri pada area tersebut ini adalah sebesar 3,75 (100%).

Rencana tindak lanjut disusun setelah diperoleh nilai akhir (Indeks RB *unevaluated*). Rencana tindak lanjut tersebut menjadi komitmen Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk dapat dilaksanakan guna menjamin perbaikan Reformasi Birokrasi dilingkungan SKPD dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk periode berikutnya. Saran tindak lanjut pada area perubahan yaitu pada komponen pengungkit di penataan sistem manajemen SDM, diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya pengembangan pegawai berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.

Terkait dengan Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Tenaga Kerja

dishakerind KOMPETITIF

dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dari Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nilai 93,20 dimana predikat ini diberikan kepada pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan public.

Adapun ruang lingkup evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Disnakerind sebagai berikut :

1. Pemenuhan dokumen atas hasil yang dicapai pada komponen Pengungkit, Reform dan Komponen Hasil dari Rencana Kerja Zona Integritas;
2. Memastikan hal – hal terkait pencapaian kinerja, yaitu :
   a) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK;
   b) Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP
   c) Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN / LHKASN;
   d) Komitmen dan pemahaman pimpinan serta seluruh pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas
   e) Kualitas implementasi dan komponen pengungkit serta data dukung implementasinya
   f) Inovasi – inovasi yang telah dilakukan
   g) Penilaian Hasil Survey yang diperoleh, yaitu Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survey Persepsi Kuliatas Pelayanan (IPKP)

disnakerind KOMPETITIF

h) Tren pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya

i) Penerapan Manajemen Resiko

j) Keterkaitan Pembangunan Zona Integritas dengan Isu Strategis SKPD

Adapun secara rinci Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.30
Pengungkit dan Komponen Yang Dinilai Dalam Reformasi Birokrasi

NO	URAIAN	BOBOT	HASIL PENILAIAN	PERSENTASE
I.	**Komponen Pengungkit**	**60**	**56.61**	94.35%
A.	**Komponen Pemenuhan (30)**	**30**	**28.034**	93.45%
1	Manajemen Perubahan	4	4,00	100.00%
2	Penataan Tatalaksana	3.5	3,50	100.00%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	5	4,90	97.92
4	Penguatan Akuntabilitas	5	4.01	80,20
5	Penguatan pengawasan	7.5	7,10	94.67%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	4.53	90.57%
B.	**Komponen Reform (30)**	**30**	**28.58**	95.25%
1	Manajemen Perubahan	4	4,00	100.00%
2	Penataan Tatalaksana	3.5	3,50	100.00%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	5	5,00	100.00%
4	Penguatan Akuntabilitas	5	4,20	84.00%
5	Penguatan pengawasan	7.5	6.875	91.67%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5,00	100.00%
	Total I	**60**	**56.61**	94.35%
II	**Kompoenen Hasil**	**40**	**36,59**	91,47%
A.	**Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,50)**	**22,5**	**20,79**	92,42
1	Surevei Persepsi Anti Korupsi (0-4) (17,50%)	17,5	15,79	90,25
2	Capaian Kinerja (A,B,C,D,E) (5%)	5	5,00	100%
B.	**Pelayanan Publik yang Prima (17,50)**	**17,5**	**15,79**	90,25%
1	Surevei Persepsi kualitas Pelayanan Publik (IPKP) (0-4)	17,5	15,79	90,25%
	Total II	**40**	**36,59**	91,47%
	TOTAL (I + II)	**100**	**93,20**	93,20%

Disnakerind KOMPETITIF

Tabel 3.31
Nilai Hasil Pencapaian Kinerja

No	Uraian	Bobot	Keterangan
1	Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK	100%	
2	Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP	83,20	A
3	Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN/LHKASN	100%	LHKPN : 5 LHKASN : 34
4	Kometmen dan pemahaman pimpinan serta seluruh pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas		Seluruh pegawai telah menandatangani Pakta Integritas, dan pimpinan sebagai Role Model telah memberikan contoh dan berkomitmen dalam Pembangunan Zona Integritas
5	Kualitas Implementasi dan komponen pengungkit serta data dukung implementasinya	Kualitas implementasi : 1) A : 92% 2) B : 8% 3) C : 1% 4) D : 1% 5) E : 0%	Dari hasil evaluasi nilai pengungkit : 1) A : 78 2) B : 7 3) C : 1 4) D : 1 5) E : 0
6	Inovasi-inovasi yang telah dilakukan	*Aplikasi Salam (Sahabat Layanan Masyarakat), Aplikasi Smart Service & Smart Office (SOSS) dan Kopiah Tuntung Pandang (Kondang)*	Aplikasi telah digunakan dalam system pemerintahan berbasis elektronik
7	Penilaian hasil survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang diperoleh Tahun 2022 dan Tahun 2023 Triwulan 1	Triwulan : 1 : - 2 : - 3 : - 4 : - Tahun 2023 : 90,33	Tahun 2022 belum dilaksanakan, baru dilaksanakan di triwulan 1 tahun 2023
8	Penilaian Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) yang diperoleh Tahun 2022 Tahun 2023 Triwulan 1	Triwulan : 1 : 89,59 2 : 89,61 3 : 90,81 4 : - Tahun 2023 : 90,115	Pada Tahun 2022 telah dilakukan survey sebanyak 3 triwulan, dan triwulan 1 tahun 2023 dengan nilai baik
9	Tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya	2018 : 69,14 2019 : 71,41 2020 : 76,16 2021 : 83,2 2022 : Proses evaluasi	Naik

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut **LAYAK** diusulkan menuju Wilaya Bebas dari Korupsi (WBK) yang akan diproyeksikan untuk diajukan evaluasi ke Tim Penilai Nasional (TPN) pada tahun 2024.

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi ini juga didukung dengan 3 indikator pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang indikator serta capaiannya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.32
Perbandingan dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Subbag Umum dan Kepegawaian

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	20201	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 3 Buah Mobil Dinas Operasional	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 3 Buah Mobil Dinas Operasional	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 3 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	100%	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	100%
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	44 Orang PNS, 16 Orang PTT	39 Orang PNS, 18 Orang PTT	39 Orang PNS, 18 Orang PTT, dan 6 Orang TA	39 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	39 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	40 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	100%	39 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	100%
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100%	2 Jenis Layanan	100%

Pada tahun 2023 kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian mampu terealisasi 100%, hal ini dikarenakan dari semua yang ditargetkan mampu terealisasi seluruhnya. Pada Sub Subbag Umum Dan Kepegawaian ada 9 (buah) kendaraan dinas operasional, dari 9 (sembilan) tersebut 7 (tujuh) dalam kondisi baik dan bisa digunakan untuk operasional dinas, sedangkan 2 (dua) dalam kondisi rusak berat dimana belum dilakukan penghapusan pada asetnya. Kemudian untuk meingkatkan kinerja pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, di tahun 2023 juga membeli peralatan kantor yaitu 2 (dua) buah scanner dan 3 (tiga) buah PC, Yang mana 2 (dua) buah scanner tersebut untuk Sub Bag Umum dan Kepegawaian dan Sub Bag Perencanaan dan Keuangan, sedangkan 3 (tiga) buah PC diperuntukan untuk Subbag

disnakerind KOMPETITIF

Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang P2TK dan bagian resefsionis dinas, dimana untuk resefsionis ini adalah digunakan untuk mempermudah menginputan surat masuk, maupun administrasi lainnya, yang masuk lewat resefsionis.

Layanan administrasi yang diberikan pada Subbag Umum dan Kepegawaian adalah layanan administrasi kepegawaian, antara lain terkait kenaikan pangkat PNS, kenaikan gaji berkala PNS, pengurusan pensiun, pengurusan cuti tahunan PNS dan segala hal yang menyangkut kepegawaian. Selain layanan andministrasi kepegawaian, juga terkait layanan sarana dan prasarana kantor, layanan rumah tangga dinas, layanan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, layanan pemeliharaan mobil dan kendaraan dinas, layanan pemeliharaan gedung dan bangunan kantor lainnya, layanan pembayaran gaji PTT, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keperluan, kenyamanan dan kemudahaan dalam bekerja dan beraktivitas di lingkungan dinas.

Selain itu juga Indikator Nilai Reformasi dan Birokrasi juga didukung dengan indikator pada Subbag Tata Usaha BLK, yang indikator dan capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.33
Perbandingan dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Subbag TU UPT BLK

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2019	20201	2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional, 4 Mobil Training Unit	2 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional, 4 Mobil Training Unit	2 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional, 4 Mobil Training Unit	2 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional, 4 Mobil Training Unit	2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional	2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional	100%	3 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional	100%
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	13 Orang PNS, 6 Orang PTT	13 Orang PNS, 6 Orang PTT	13 Orang PNS, 6 Orang PTT, 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	100%	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	100%
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100%	2 Jenis Layanan	100%

Pada tahun 2023 kinerja Kasubbag Tata Usaha BLK mampu terealisasi 100%, hal ini dikarenakan dari semua yang ditargetkan mampu terealisasi seluruhnya. Pada Sub Subbag Tata Usaha BLK ada 2 (dua) buah kendaraan dinas operasional, 1 (satu) mobil dinas operasional. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan urusan rumah tangga UPT BLK, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung/ruang pelatihan BLK dan gedung kantor BLK diantaranya mengganti plafon mushola, memasang vinyl lantai ruangan kantor, membeli meja dan kursi kerja, melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian PNS BLK dan pelayanan kepada PTT BLK terkait pemabayaran gajinya, melaksanakan pemeliharaan peralatan kerja yang ada di BLK, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan dan melaksanakan pemeliharan kendaraan dan mobil dinas operasional BLK.

A. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan pada sasaran ini didukung dengan 1 program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat dibawah ini :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      .a.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

dishakerind KOMPETITIF

b.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

c.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

c,2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

c.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

c.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

c.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

d.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

d.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

e.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dan menjai tanggungjawab di Kesekretariatan adalah :

1. Sarana Prasarana Gedung yang sangat terbatas dan belum memadai dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian.
2. Gedung kantor yang tidak refresentatif.
3. Jumlah armada Kendaraan Bermotor Roda 4 yang masih terbatas.
4. Kurangnya SDM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, diantaranya tidak adanya Tenaga ASN sebagai Verifikator dan berkurangnya tenaga PPT karena ada PTT yang berhenti, serta lulus P3K.
5. Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

C. Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Gedung yang ada dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
2. Memaksimalkan Armada Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk mendukung operasional pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan memberitahukan terebih dahulu untuk peminjaman mobil dinas pada aplikasi SOSS, menghindari jadwal pemakaian yang bektrok dengan bidang lain.
3. Penambahan Tenaga PNS untuk mengoptimalkan kinerja layanan pada sekretariat dan bidang (minimal 75% dari 110 orang yang ada dalam peta jabatan)

disnakerind KOMPETITIF

4. Penambahan pagu anggaran dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

D. Rencana Aksi Tahun 2024

Pada Tahun 2023 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Meminta pembangunan Gedung Kantor yang lebih refresentatif dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di area samping Gedung Kantor yang ada dan Tahun 2024 sudah masuk dalam ABPD Tahun Anggaran 2024, yang pembangunannya diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengajukan Penambahan Armada Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk mendukung operasional pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan melalui pengadaan pada APBD maupun pengalihan asset dari armada lama SKPD lain yang masih layak pakai.
3. Meminta Penambahan Tenaga PNS pada BKPSDM untuk mengoptimalkan kinerja layanan pada sekretariat dan bidang (minimal 75% dari 110 orang yang ada dalam peta jabatan).
4. Mengajukan Penambahan pagu anggaran dalam Renja SKPD untuk menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan.

dishakerind
KOMPETITIF

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 :

Jumlah belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk tahun anggaran 2023 setelah perubahan ditetapkan sebesar **Rp. 13.022.040.677,-** (Tiga Belas Milyar Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program kegiatan dan Sub Kegiatan, yang terdiri atas 8 (delapan) program yang terdiri 15 (lima belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan realisasi sebesar atas **Rp. 11.368.038.491-** atau tercapai **87,30 %.**

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023 berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijelaskan dibawah ini :

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Sasaran 1 (Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja)

Untuk mendukung sasaran diatas didukung dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.
      a.1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Komptensi (Dinas dan BLK).
      a.2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

Realisasi anggaran untuk program,kegiatan dan sub kegiatan pada sasaran ini dapat disimak pada tabel di bawah ini:

disnakerind KOMPETITIF

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran Pada Sasaran 1

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2023 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA	Persentase Peserta Latih yang Berkompeten	75%	901,360,429	-	0	820,205,162	
	I Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis	2 Jenis	901,360,429	2 Jenis		820,205,162	
		Jumlah Sosialisasi	2 kali		2 kali			
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompotensi pada Tahun n	46 Orang	878,120,210	45 Orang	97.83%	801,481,140	91.27%
	2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada Tahun n	18 lembaga	23,240,219	17 lembaga	94.44%	18,724,022	80.57%
JUMLAH				901,360,429		96.14%	820,205,162	85.92%

Dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 96,14% dengan realisasi keuangan sebesar 85,92% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.35
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	85,92%	96,14%	10,22 %

Sasaran 2 (Meningkatnya Kesempatan Kerja)

Untuk mendukung sasaran diatas didukung dengan 2 (dua) program, 4 (empat kegiatan) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, didukung dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Tenaga Kerja (RTK) dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan yaitu :

   a.1. Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja.

   a.2. Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja.

   a.3. Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian LPTKS.

c. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

Realisasi anggaran untuk program,kegiatan dan sub kegiatan pada sasaran ini dapat disimak pada tabel di bawah ini:

disnakerind
KOMPETITIF

Tabel 3.36
Realisasi Anggaran Pada Sasaran 2

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2023 (Rp)	Realisasi (%)			
							Fisik	%	Keuangan	%
1	2			3	4	5	6	7	8	9
A	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan**	**6.5%**	**14,933,460**	-		**14,405,300.00**	
	I	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Jumlah Dokumen RTKD**	**1 Dokumen**	**14,933,460**	**1 Dokumen**		**14,405,300.00**	
		1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	8 Perusahaan	14,933,460	8 Perusahaan	100.00	14,405,300.00	96.46
B	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan**	**6.5%**	**147,119,845**			**133,666,460.00**	
	II	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Orang**	**170 Orang**	**119,341,345**	694 Orang		**110,204,620.00**	
		2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	50 Orang	69,422,145	281 orang	100.00	65,551,960.00	94.43
		3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	9,999,370	20 Orang	100.00	7,507,660.00	75.08
		4	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	39,919,830	451 Orang	100.00	37,145,000.00	93.05
	III	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Banyaknya Dokumen Perizinan Pendirian/ Pembentukan LPTKS**	**2 Dokumen**	**3,000,000**	**2 Dokumen**		**780,000.00**	
				Banyaknya Monitoring ke LPTKS	**4 Kali**		**4 Kali**			
		5	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	2 Lembaga	3,000,000	1 Lembaga	50.00	780,000.00	26.00
	IV	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Purna CPMI yang Mendapat Perlindungan**	**20 CPMI**	**24,778,500**	**20 CPMI**		**22,681,840.00**	
		5	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	24,778,500	20 Orang	100.00	22,681,840.00	91.54
JUMLAH						**162,053,305**		**91.67**	**148,071,760**	**79.43**

Dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 91,67% dengan realisasi keuangan sebesar 79,43% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.37
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	79,43%	91,67%	12,24%

Sasaran 3 (Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial)

Untuk mendukung sasaran ini didukung dengan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

1. Program Hubungan Industrial, dengan 2 kegiatan yaitu :
    a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
        a.1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
        a.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
    b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran untuk program,kegiatan dan sub kegiatan pada sasaran ini dapat disimak pada tabel di bawah ini:

disnakerind
KOMPETITIF

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran Pada Sasaran 3

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2023 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Cakupan sengketa perusahaan - pekerja yang diselesaikan**	**35%**	**898,842,600**			**887,307,600.00**	
	I Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	**Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan**	**4 Perusahaan**	**836,842,600**	8 Perusahaan		**833,180,100.00**	
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	4 Perusahaan	15,160,000	8 Perusahaan	100.00	15,072,500.00	99.42
	2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	12 Laporan	821,682,600	12 Laporan	100.00	818,107,600.00	99.56
	II Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus Perselisihan yang Diselesaikan**	**5 Kasus**	**62,000,000**			**54,127,500.00**	
	3 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	62,000,000	1 Lembaga	100.00	54,127,500.00	87.30
JUMLAH				**898,842,600**		**100.00**	**887,307,600**	**95.43**

Dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 95,43% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.39
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Harmonisasi Hubungan industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	95,43%	100%	4,57 %

disnakerind KOMPETITIF

Sasaran 4 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri)

Dalam melaksanakan kegiatan pada sasaranini didukung dengan ada 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industr.
   d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
   e. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
   a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kot.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis

disnakerind KOMPETITIF

Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Tabel 3.40
Realisasi Anggaran Pada Sasaran 3

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2023 (Rp)	Realisasi (%)			
						Fisik	%	Keuangan	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9
A	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreatifitas industri**	**100%**	**858,871,944**			**814,937,943.00**	
	I	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Pertumbuhan IKM	**6%**	**858,871,944**			**814,937,943.00**	
		1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	11,550,000	1 Dokumen	100.00	10,970,000.00	94.98
		2 Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen	310,000,045	6 Dokumen	100.00	281,343,900.00	90.76
		3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 Dokumen	71,538,071	1 Dokumen	100.00	67,848,205.00	94.84
		4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	3 Dokumen	456,311,880	3 Dokumen	100.00	445,303,890.00	97.59
		5 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 Dokumen	9,471,948	1 Dokumen	100.00	9,471,948.00	100.00
B	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		**Cakupan Fasilitasi Tahapan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri**	**65.00%**	**16,320,000**	-		**15,185,000.00**	
	II	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi IUI**	**4 Rekomendasi**	**16,320,000**	-		**15,185,000.00**	
		6 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	9,480,000	-	100.00	8,975,000.00	94.67
		7 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6,840,000	1 Dokumen	100.00	6,210,000.00	90.79
C	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Cakupan Fasilitasi Tahapan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri**	**65.00%**	**80,016,376**	-		**46,607,440.00**	
	III	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Data Industri**	**1 Dokumen**	**80,016,376**	**1 Dokumen**		**46,607,440.00**	
		8 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	80,016,376	1 Dokumen	100.00	46,607,440.00	58.25
JUMLAH					**955,208,320**		**100.00**	**876,730,383**	**91.78**

Dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 91,78% menunjukkan efisiensi penggunaan dana tercapai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.41
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	91,78 %	100%	8,22%

Sasaran 5 (Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat)

Dalam melaksanakan kegiatan pada sasaran ini didukung dengan 1 program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat dibawah ini :

2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      .a.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      c.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      c,2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      c.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      c.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

disnakerind KOMPETITIF

c.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

d.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

d.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

e.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

disnakerind
KOMPETITIF

Tabel 3.42
Realisasi Anggaran Pada Sasaran 4

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2023 (Rp)	Realisasi (%)			
						Fisik	%	Keuangan	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP A**	**85 Nilai**	**8,500,999,192**	**-**		**7,262,293,251.00**	
	I.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yg Akuntabel**	**1 Tahun**	**11,234,260**			**9,175,058.00**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4,506,327	5 Dokumen	100.00	4,168,763.00	92.51
		2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6,727,933	4 Laporan	100.00	5,006,295.00	74.41
	II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Keuangan SKPD**	**100%**	**7,215,545,221**			**6,041,808,785.00**	
		3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	7,209,532,981	40 Orang/Bulan	100.00	6,036,214,545.00	83.73
		4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	6,012,240	5 Dokumen	100.00	5,594,240.00	93.05
	III.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**513,766,885**			**497,411,017.00**	
		5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	8,712,737	8 Paket	100.00	7,749,400.00	88.94
		6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 Paket	143,056,928	17 Paket	100.00	134,128,300.00	93.76
		7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	26 Paket	17,075,542	26 Paket	100.00	15,273,700.00	89.45
		8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	4 Paket	37,451,678	4 Paket	100.00	33,727,000.00	90.05
		9 Penyediaan Bahan/Material		1 Paket	30,000,000	1 Paket	100.00	30,000,000.00	100.00
		10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185 Laporan	277,470,000	126 Laporan	68.10	276,532,617.00	99.66
	IV	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis**	**16 Jenis**	**634,527,016**			**588,234,591.00**	
		11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	134,200,000	12 Laporan	100.00	91,614,121.00	68.27
		12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500,327,016	12 Laporan	100.00	496,620,470.00	99.26
	V	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tertib Pemeliharaan BMD**	**1 Dinas**	**125,925,810**			**125,663,800.00**	
		13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	114,075,810	11 Unit	100.00	113,983,800.00	99.92
		14 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	11,850,000	18 Unit	100.00	11,680,000.00	98.57
JUMLAH					**8,500,999,192**		**97.72**	**7,262,293,251**	**85.43**

Dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 97,73% dengan realisasi keuangan sebesar 85,43% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

disnakerind KOMPETITIF

Tabel 3.43
Efisiensi Anggaran Pada Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,43%	97,73%	2,79 %

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Ringkasan Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.44
Ringkasan Belanja Tahun 2021 s/d Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realiasasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realiasasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realiasasi
1.	Belanja Operasi	13.618.390.892	9.597.072.931,98	70,47	10.176.209.186	8.111.554.198	79,71	12.832.672.684	11.196.454.386	87,15
2.	Belanja Modal	1.776.352.853	1.730.358.823	97,41	114.321.356	103.117.441	90,20	189.367.993	171.584.105	90,61
	Jumlah	15.394.743.745	9.597.433.484,98	83,94	10.290.530.542	8.214.671.639	84,96	13.022.040.677	11.368.038.491	87,30

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah seluruh belanja pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.394.743.745,- hanya mampu terealisasi sebesar Rp. 9.597.433.484,98,- atau 63,34%, tahun 2022 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 10.290.530.542,- mampu terealisasi sebesar Rp. 8.214.671.639,-, sedangkan tahun 2023 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 13.022.040.677,- mampu terealisasi sebesar Rp. 11.368.038.491,- atau sebesar 87,30%. Jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan, yang terdiri atas 8 (delapan) program yang terdiri atas 15 (lima belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

dishakerind KOMPETITIF

A. DINAS

Tabel 3.43
Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tahun 2021 s/d Tahun 2023

A	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9				
A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**A**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**8,500,999,192**	**7,262,293,251.00**
I	**Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**			**I**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11,234,260**	**9,175,058.00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.700	6.793.700	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.084.256	9.274.125		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,506,327	4,168,763.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	34.999.676	31.830.250	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.116.415	3.713.250		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,727,933	5,006,295.00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.756.161	5.000.000	**II**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		5.560.875		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7,215,545,221**	**6,041,808,785.00**
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.781.334.018	6.056.111.310		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,209,532,981	6,036,214,545.00
4	Pengendalian Gaji dan Tunjangan	8.632.506.573	5.430.499.632	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.468.225	5.066.800		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,012,240	5,594,240.00
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	56.167.476	51.400.450,06	**III**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**513,766,885**	**497,411,017.00**
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,712,737	7,749,400.00
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	74.934.258	70.756.750,18	**IV**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143,056,928	134,128,300.00
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			6	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.991.282			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,075,542	15,273,700.00
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	39.485.160	39.465.400	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	41.042.895			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37,451,678	33,727,000.00

A	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9				
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.087910			Penyediaan Bahan/Material	30,000,000	30,000,000.00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.319.400	12.277.900	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277,470,000	276,532,617.00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.303.700	35.678.595	10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.134.875			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**634,527,016**	**588,234,591.00**
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.949.800	9.343.500	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.217.566	148.384.680		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134,200,000	91,614,121.00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.965.600	1.800.000	**V**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500,327,016	496,620,470.00
12	Fasiltasi Kunjungan Tamu	23.183.400	22.008.400	12	Pengadaan Mebel	14.756.225	13.414.750		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**125,925,810**	**125,663,800.00**
13	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.995.000	208.521.275	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.710.313	41.335.046		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114,075,810	113,983,800.00
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**VI**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,850,000	11,680,000.00
14	Pengadaan Mebel	45.148.620	44.000.000	14.	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	175.216.513	87.108.759		**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**14,933,460**	**14,405,300.00**
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.603.100	90.581.363	15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.115.000	26.350.000		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**14,933,460**	**14,405,300.00**
VII	**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.511.048	500.164.805		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	14,933,460	14,405,300.00
16	Penyediaan Surat Menyurat	28.433.076	25.637.701,06	**VII**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**901,360,429**	**820,205,162.00**
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airt dan Listrik	187.985.916	145.241.435,06	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	63.744.400		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**901,360,429**	**820,205,162.00**

A	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9				
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.445.000	5.280.000	18	Pemeliaharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.650.000	6.455.000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	878,120,210	801,481,140.00
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.377.676	31.213.350,06	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.447.995	45.382.950		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	23,240,219	18,724,022.00
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.823.000	9.823.000		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**147,119,845**	**133,666,460.00**
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaanm, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.673.376	106.616.300,06	**B**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**				**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**119,341,345**	**110,204,620.00**
21	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	22.445.000	19.500.000	**VIII**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**				Pelayanan antar Kerja	69,422,145	65,551,960.00
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.281.115	140.936.237	21	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	17.585.433	17.542.957		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	9,999,370	7,507,660.00
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.240.948	18.830.660	**C**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				Perluasan Kesempatan Kerja	39,919,830	37,145,000.00
B	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**			**IX**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**				**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3,000,000**	**780,000.00**
IX	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**			22	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster kompetensi	9.997.986	8.597.989		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3,000,000	780,000.00
24	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	49.999.700	40.398.200	23	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	9.792.542	8.597.989		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**24,778,500**	**22,681,840.00**

A	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9				
C	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**			24	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	21.213.220	19.230.000		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	24,778,500	22,681,840.00
X	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**			**X**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**				**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**898,842,600**	**887,307,600.00**
25	Proses pelaksanaa Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Komptensi	399.989.900	379.088.060	25.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944	8.916.944		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten**	**836,842,600**	**833,180,100.00**
26	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	95.852.800	78.965.900	**XI**	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**6.930.648**	**4.460.648**		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15,160,000	15,072,500.00
XI	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**			26	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	6.930.648	4.460.648		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	821,682,60	818,107,600.00
27	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	150.430.000	94.569.700	**D.**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**				**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**62,000,000**	**54,127,500.00**
XII	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**			**XII**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	62,000,000	54,127,500.00
28	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	95.097.676	42.137.250,06	27	Pelayanan Antar Kerja	51.393.481	49.831.284		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**858,871,944**	**814,937,943.00**
D	**Program Penempatan Tenaga Kerja**			28	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	9.406.515	8.504.972		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**858,871,944**	**814,937,943.00**
XIII	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**			29	Perluasan Kesempatan Kerja	35.013.152	34.322.508		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	11,550,000	10,970,000.00

A	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9				
29	Pelayanan Antar Kerja	197.999.376	131.933.066,28	**XIII**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	310,000,045	281,343,900.00
30	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	49.999.700	39.650.900	30	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2.490.000	2.400.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	71,538,071	67,848,205.00
31	Perluasan Kesempatan Kerja	193.167.576	165.903.350,06	**XIV**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	456,311,880	445,303,890.00
XIV	**Penerbitan Izin Lkasi Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			31	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	22.029.876	20.690.576		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	9,471,948	9,471,948.00
32	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3.036.800	2.095.600	**E**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**16,320,000**	**15,185,000.00**
XV	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**			**XV**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten**				**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**16,320,000**	**15,185,000.00**
E	**Program Hubungan Industrial**			32	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.175.000	12.445.000		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	9,480,000	8,975,000.00
XVI	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**			33	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.560.000	15.360.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	6,840,000	6,210,000.00
33	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	62.499.860	50.927.400	**XVI**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan**				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**80,016,376**	**46,607,440.00**

A	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9				
					Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
34	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	32.499.830	17.225.900	34	Pelaksanaan Operasional LembagaKerjasama Tripartiti Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000	14.562.500		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**80,016,376**	**46,607,440.00**
XVII	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja**			**F**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	80,016,376	46,607,440.00
35	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripatrit Daerah Kabupten/Kota	98.999.896	81.071.246,06	**XVII**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**				**JUMLAH**	**11.418.463.846**	**9.994.608.156**
F	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**			35	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayan Industri	105.19.999	98.609.000				
XVIII	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupetn/Kota**			36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	129.286.498	125.701.500				
36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	76.000.000	31.331.300	37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	39.405.000	34.935.000				
37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	388.670.546	353.957.804	38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	61.620.000	58.969.984				
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	788.570.059	627.660.915	39	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.536.500	3.205.000				
39	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8.484.800	4.581.000	**G**	**PROGRAM PENGENDALIANIZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**						

A	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9				
G	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**			XVIII	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**						
XIX	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupetn/Kota**			40	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6425.000	2.915.000				
40	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	134.999.750	113.741.400	41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	5.465.000	3.072.500				
	JUMLAH	**14.657.544.101**	**10.699.400.029,18**	H	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	69.598.532	46.514.600				
				XIX	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**						
				42	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)						

disnakerind
KOMPETITIF

B. UPT BLK

Tabel 3.44
Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPT BLK Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9				
A	**Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**A**	**Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		
I	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**I**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.516.00	5.785.500	1	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.690	1.975.500		Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.901.944	7.648.940
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	12.858.850	9.576.500	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	2.925.520	2.682.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	10.490.913	7.730.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	7.428.200	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.650.000	1.998.800		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.656.705	.37.500
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,132.000	1,080,000	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	4.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.105.000	56.217.480
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.200.000	3.690.000	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.700.000	18.370.400		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.165.000	84.363.100	**II**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Pengadaan Mebel	23.726.052	21.349.700
II	**Administrasi Barasng Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**			**6**	Pengadaan Mebel	8.360.000	8.357.272		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.662.500	29.300.000
7	Pengamanan Barang Milik Negara	23.966.676	23.797.612	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.132.600	4.600.000		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9				
III	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2,250,000**	**270,000**	**III**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	73.840.000	44.448.550
8	Pengadaan Mebel	101.786.630	86.009.000	8	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	79.794.725	53.951.754		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.775.572	175.815.515
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.300.348	17.785.845	9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.776.380	29.745.000		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
IV	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.907.400			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.635.522	43.025.000
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.167.776	23.135.812	IV	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.199.390	42.284.570 45,000,000	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	14.256.200		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.994.922	69.314.225	12	Pemeliaharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.650.000	2.100.000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.070.355.407	948.164.820
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.988.952	47.807.232	**V**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.344.760	8.260.398		Koordinasi Listas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	54.942.152	44.446.030

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9				
V	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.977.905	8.156.200		**JUMLAH**	**1.603.576.831**	**1.392.117535**
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.567.500	62.090.336	B	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						
15	Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya	20600.000	14.450.000	**VI**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**						
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.625.000	41.266.000	14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	299.629.700					
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.948.000	9.177.500		**JUMLAH**	**664.845.680**	**521.836.130**				
	JUMLAH	**737.199.344**	**628.033.932**								

disnakerind KOMPETITIF

Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2022 terhadap APBD Tahun 2023

Tabel 3.45
Perbandingan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2022 dan 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Peningkatan/ Penurunan (%)
BELANJA		**11.327.431.259,98**	11.369.038.491,00	98,84
1.	Belanja Pegawai	6.053.911.310,00	6.025.277.345,00	99,53
2.	Belanja Barang/Jasa	2.038.412.888,00	5.171.177.041,00	253,69
3.	Belanja Hibah	19.230.000,00	0	0
4.	Belanja Modal	103.117.441,00	171.584.105,00	166,30

Dari tabel diatas dilihat bahwa pada tahun 2023 cuma ada 3 (tiga) uraian belanja saja, belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 99,53% sedangkan 2 (dua) belanja lainnya mengalami kenaikan yaitu belanja barang/jasa sebesar 253,69% dan belanja modal sebesar 166,30% Kenaikan ini terjadib banyak kegiatan pelatihan dan juga pemagangan yang dilaksanakan oleh Bidang P2TK, Bidang Perindustrian dan juga oleh UPT BLK. Selain itu juga ada penambahan pada peralatan kerja seperti scanner dan PC.

disnakerind KOMPETITIF

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan Kinerja ini.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Stratejik Tahun 2018-2023 yang terdiri atas 5 (lima) sasaran dalam tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditentukan walaupun ada 2 (dua) sasaran yang tidak tercapai 100%, dan 1 (satu) sasaran yang capaiannya 40,06%, untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.57
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,9%	69,61%	96,82%
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	6,5 %	96,42%	100 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	42,5%	20%	47,06%
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	16,35 %	12,6%	77,06%
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	90.33	100%

disnakerind KOMPETITIF

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

1. Bidang Ketenaga kerjaan sebagai urusan wajib tentunya akan memperoleh perhatian dalam peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan peralatan dalam rangka meminimalisasi peta kerawanan ketenagakerjaan dan membekali calon tenaga kerja yang terampil dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja di Kabupaten Tanah Laut.
2. Bidang Perindustrian
   a. Sebagai urusan pilihan namun memiliki peran yang cukup strategis sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah dengan menambah sarana dan prasarana di rumah Rumah Kemasan.
   b. Sebagai daerah yang termasuk dalam pembangunan proyek strategi nasional, pembangunan kawasan industri jorong terus didorong percepatan pembangunan dan pengelolaannya.
3. Dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian, dilakukan melalui strategi :
   1. Penguatan kelembagaan dan personil
   2. Membangun jaringan kerja
   3. Pemanfaatan teknologi informasi.

disnakerind
KOMPETITIF

LAMPIRAN

disnakerind
KOMPETITIF

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Kabupaten : Tanah Laut

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan

Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian ;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian ;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pembinaan UPT Dinas ;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{Jumlah\ angkatan\ kerja}{Jumlah\ penduduk\ 15\ >} x\ 100\%$	Bidang PPTK dan UPT. BLK / BPS
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{Jumlah\ penduduk\ bekerja}{Jumlah\ angkatan\ kerja} x\ 100\%$	Bidang PPTK/BPS
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{Jumlah\ kasus\ perselisihan\ HI\ tahun\ n-1 - (\ jumlah\ kasus\ perselisihan\ tahun\ n)}{Jumlah\ kasus\ perselisihan\ HI\ tahun\ n-1} x\ 100\%$	Bidang HIJSTK

4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	$\frac{PDRB\ tahun\ N - PDRB\ tahun\ N-1}{PDRB\ Tahun\ N}\ x\ 100\%$	Bidang Perindustrian/ BPS
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sekretariat

Pelaihari, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TANAH LAUT

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 27 Juni 2023

Nomor : 700.1.2.1/146/LHE-AKIP/INSP/ 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

di-
Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.11.1/ 231 / Insp/ 2023 tanggal 31 Mei 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan :
   a. Memperoleh informasi tentang impelementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :
   a. Renstra SKPD
   b. Renja SKPD
   c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
   d. Indikator Kinerja Utama (IKU).
   e. Perjanjian Kinerja (PK),
   f. Cascading/ Pohon Kinerja'
   g. Laporan Kinerja'
   h. Dokumen lain yang mendukung.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar 81,55 dengan kategori **A (Memuaskan),** yaitu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :
   a. *Perencanaan Kinerja.*
      Diperoleh nilai sebesar 24,60 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **A (Memuaskan).**
   b. *Pengukuran Kinerja.*
      Diperoleh nilai sebesar 24,60 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **A (Memuaskan).**
   c. *Pelaporan Kinerja.*
      Diperoleh nilai sebesar 11,85 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 15% dengan kategori **BB (Sangat Baik).**
   d. *Evaluasi Akuntabilias Kinerja Internal*
      Diperoleh nilai sebesar 20,50 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 25% dengan kategori **A (Memuaskan)**.
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
   Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya, dapat diperoleh nilai sebesar 100%.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana di atas, kami menyarankan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

a. **Perencanaan Kinerja :**

   Terhadap dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diselaraskan agar dipertahankan dan bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempumaan dan perbaikan pencapaian kinerja.

b. **Pengukuran Kinerja :**

   Agar dilakukan reviu berjenjang atas pencapaian target kinerja yang disusun dan didokumentasikan sehingga dapat diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja.

c. **Pelaporan Kinerja :**

   - Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja;
   - Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai;
   - menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten/Propinsi/Nasional.

d. **Evaluasi Akuntabilias Kinerja Internal :**

   Agar saran hasil evaluasi APIP segera ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Prindustrian Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Drs. Joko Wuryanto, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PANRB di Jakarta
3. Arsip

LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERIODE EVALUASI 2022

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	Nilai	%-TASE
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**	**A**	**24,60**	**82,00%**
1.a	**Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia**	**6,00**	A	**5,40**	**90,00%**
1)	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja				
2)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				
3)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				
4)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				
5)	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja				
6)	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				
7)	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja				
1.b	**Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)**	**9,00**	BB	**7,20**	**80,00%**
1)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				
2)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				
3)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai				
4)	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai				
5)	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)				
6)	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART				
7)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis				
8)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)				
9)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				
10)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.				
11)	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				
1.c	**Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**	**15,00**	BB	**12,00**	**80,00%**
1)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai				

2)	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				
3)	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				
4)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya				
5)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik				
6)	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
7)	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
8)	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
9)	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi				
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**	**A**	**24,60**	**82,00%**
2.a	**Pengukuran Kinerja telah dilakukan**	**6,00**	A	**5,40**	**90,00%**
1)	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja				
2)	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja				
3)	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				
2.b	**Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**	**9,00**	BB	**7,20**	**80,00%**
1)	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				
2)	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				
3)	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala				
4)	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang				
5)	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
2.c	**Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**	**15,00**	BB	**12,00**	**80,00%**
1)	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan				
3)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional				
4)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi				
5)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja				
6)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja				
7)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja				
8)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja				
9)	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja				
10)	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				

11)	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**	**BB**	**11,85**	**79,00%**
3.a	**Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**	**3,00**	A	**2,70**	**90,00%**
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu				
3.b	**Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**	**4,50**	B	**3,15**	**70,00%**
1)	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)				
7)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya				
8)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja				
9)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)				
3.c	**Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**	**7,50**	BB	**6,00**	**80,00%**
1)	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)				
2)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
3)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
4)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja				
5)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
7)	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi				
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**	**A**	**20,50**	**82,00%**
4.a	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**	**5,00**	A	**4,50**	**90,00%**
1)	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang				
4.b	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**	**7,50**	BB	**6,00**	**80,00%**

1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai				
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
5)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
4.c	**Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja**	**12,50**	BB	**10,00**	**80,00%**
1)	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti				
2)	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal				
3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
4)	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja				
5)	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal				
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	**100,00**	**A**	**81,55**	**81,55%**

Pengendali Teknis

Hj. Rusmiati, MM
NIP. 19651028 198602 2 005

Evaluator

Tri Praptiwi Setyarini, SE
NIP. 19870226 201101 2 007

Mengetahui :
Irban I

Riva Mahrani,ST
NIP. 19770223 200604 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYAMSIR RAHMAN**
Jabatan : Penjabat Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SYAMSIR RAHMAN	**MASTURI, S.STP**
	NIP. 19770705 199612 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71.90 %
2.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan Kerja	6,5 %
3.	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	42,5 %
4.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Indutri Terhadap PDRB	16,35 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.234.260
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.215.545.221
		3) Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinas)	Rp. 513.766.885
		4) Administrasi Umum Perangkat Daerah (BLK)	Rp. 124.619.526
		5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLK)	Rp. 53.408.552
		6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas)	Rp. 634.527.016
		7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BLK)	Rp. 250.615.672
		8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas)	Rp. 125.925.810
		9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BLK)	Rp. 49.635.522
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 14.933.460
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (Dinas)	Rp. 901.360.429
		2) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (BLK)	Rp. 1.125.297.559

4	Program Penempatan Tenaga Kerja	1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 119.341.345
		2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.000.000
		3) Perlindungan PMI di Daerah Kab/Kota	Rp. 24.778.500
5	Program Hubungan Industrial	1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 836.842.600
		2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 62.000.000
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 858.871.944
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 80.016.376
8	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten /kota	1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 16.320.000

9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota (UPT BLK)	1)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 124.619.526
		2)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 53.408.552
		3)	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 250.615.672
		4)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 49.635.522
10	Program Perencanaan Tenaga Kerja (UPT BLK)	1)	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 1.125.297.559

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN

KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **MARIA ULFAH , S.Psi**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
MASTURI, S.STP	**MARIA ULFAH , S.Psi**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19791113 200501 2 008**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A	KINERJA UTAMA		
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	1 Nilai Sakip Disnakerind	Istimewa
		2 Nilai Reformasi Birokrasi	Sangat Istimewa

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.234.260
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.215.545.221
		3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	638.386.411
		4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.142.688
		5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.561.332

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KEPALA DINAS ,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

SEKRETARIS,

MARIA ULFAH , S.Psi
NIP. 19791113 200501 2 008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	**KINERJA UTAMA**		
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase peserta latih yang kompeten	75%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	6,50 %

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	**1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**119.341.345**
		- Pelayanan Antar Kerja	69.422.145
		- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.999.370
		- Perluasan Kesempatan Kerja	39.919.830
		2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**3.000.000**
		- Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3.000.000
		3. Perlindungan PMI di Daerah Kab/Kota	**24.778.500**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **ELIZA MEILANI, S. Psi . M.Psi**
Jabatan : **KEPALA BIDANG P2TK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA DAN PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
MASTURI, S.STP	**ELIZA MEILANI, S. Psi . M.Psi**
NIP. 19770705 199612 1 004	NIP. 19750514 200112 2 002

		- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Rp. 24.778.500
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	**1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Rp. 14.933.460**
		- Penyusunan RTK Mikro	Rp. 14.933.460
3.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	**1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Rp. 901.360.429**
		- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 878.120.210
		- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 23.240.219

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP

NIP. **19770705 199612 1 004**

KEPALA BIDANG PPTK,

ELIZA MEILANI, S. Psi, M. Psi

NIP. 19750514 200112 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **NURMAYA SAVITRI, ST.MS**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KEPALA DINAS,	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,
MASTURI, S.STP	**NURMAYA SAVITRI, ST, MS**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19820529 200903 2 007**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	100 %
2	Menguatnya struktur industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukkan industri	65 %

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**858.871.944**
		- Koordinasi dan sinkronasi dan pelaksanaan kebijakan perwilayahan industri	11.550.000
		- Koordinasi, Sinkronasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	310.000.045
		- Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	71.538.071

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,

NURMAYA SAVITRI, ST, MS
NIP. 19820529 200903 2 007

		- Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	456.311.880
		- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	9.471.948
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**80.016.376**
		- Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan AnalisisData Industri, DataKawasan Industri sertaData Lain LingkupKabupaten/Kota MelaluiSistem Informasi IndustriNasional (SIINas)	80.016.376
3.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**16.320.000**

		- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan abupaten/Kota dalamSistem Informasi IndustriNasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	9.480.000
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	6.840.000

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **WIYANTI MELANSARI, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG HIJSTK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KEPALA DINAS,	KEPALA BIDANG HIJSTK,
MASTURI, S.STP	**WIYANTI MELANSARI, SH**
NIP. 19770705 1996 1 004	**NIP. 19760624 200501 2 017**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	**KINERJA UTAMA**		
1	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	32%

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**836.842.600**
		- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.160.000
		- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	821.682.600

		- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	62.000.000

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 1996 1 004

KEPALA BIDANG HIJSTK,

WIYANTI MELANSARI, SH
NIP. 19760624 200501 2 017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPT BLK
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	KINERJA UTAMA		
1	Melaksanakan 1 Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	1.1 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192 Orang
		1.2 Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur danPeningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	11 Lembaga

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Rp. 1.125.297.559**
		- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 1.070.355.407
		- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Samadengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 54.942.152

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kabid PPTK

ELIZA MEILANI, S. Psi, M. Psi
NIP. 19750514 200112 2 002

Kepala UPT BLK

AKHMAD NOPRIADI, A.P. M. Si
NIP. 19741120 199412 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : AKHMAD NOPRIADI, A.P. M. Si
Jabatan : Kepala UPT BLK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELIZA MEILANI, S.Psi . M.Psi
Jabatan : Kabid PPTK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ELIZA MEILANI, S.Psi . M.Psi	**AKHMAD NOPRIADI, A.P. M. Si**
NIP. 19750514 200112 2 002	**NIP. 19741120 199412 1 001**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	**KINERJA UTAMA**		
1	Menyusun Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Secara Berkala di Susun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	5 Dokumen
2	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.680.545.221**
		- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.209.532.981
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.012.240
		2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**11.234.260**
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.506.327
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.727.933

Pelaihari, 9 Januari 2023

SEKRETARIS,

MARIA ULFAH , S.Psi
NIP. 19791113 200501 2 008

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **YULIANI ASTUTI, SE**
Jabatan : **KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MARIA ULFAH. S.Psi**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
MARIA ULFAH , S.Psi	**YULIANI ASTUTI, SE**
NIP. 19791113 200501 2 008	**NIP. 19741029 200501 2 010**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **SULASTRI LATIF, S.STP**
Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MARIA ULFAH , S.Psi**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 16 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
MARIA ULFAH , S.Psi	**SULASTRI LATIF, S. STP**
NIP. 19791113 200501 2 008	**NIP. 19940405 201609 2 001**

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**513.766.885**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	8.712.737
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.056.928
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.075.542
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.451.678
		- Penyediaan Bahan/Material	30.000.000
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	277.470.000
		2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**634.527.016**
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	134.200.000
		- Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	500.327.016
		3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**125.925.810**
		- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendraan dinas operasional atau Lapangan	114.075.810
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.850.000

Pelaihari, 16 Oktober 2023

SEKRETARIS,

MARIA ULFAH , S.Psi
NIP. **19791113 200501 2 008**

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

SULASTRI LATIF, S. STP
NIP. **19940405 201609 2 001**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	KINERJA UTAMA		
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	40 Orang PNS, 23 Orang PTT, dan 7 Orang TA
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPT BLK
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	0 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 3 Buah Mobil Dinas Operasional
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp. 124.619.526**
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp. 8.901.944
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10.490.913
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.656.705
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 12.464.964
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 88.105.000
		2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp. 53.408.552**
		- Pengadaan Mebel	Rp. 23.726.052

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MUHDI, A. Md
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha BLK

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MARIA ULFAH, S. Psi
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MARIA ULFAH, S. Psi	**MUHDI, A. Md**
NIP. 19791113 200501 2 008	**NIP. 19761127 200604 1 010**

		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gd kantor	Rp. 29.682.500
		3. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**Rp. 250.615.672**
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp. 73.840.000
		- Penyediaan Jasa Pelayanan umum	Rp.176.775.672
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp. 49.635.522**

Pelaihari, 9 Januari 2023

Sekretaris

MARIA ULFAH, S.Psi
NIP. **19791113 200501 2 008**

Kasubbag Tata Usaha BLK

MUHDI, A. Md
NIP. 19761127 200604 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
JalanA. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1.	Membantu mengidentifikasi dan mendata PHK	Data Pemutusan Hubungan Kerja	4 Data
2.	Membantu melayani konseling / sosialisasi HI untuk masyarakat	Laporan Konseling / Sosialisasi Hubungan Industrial	12 Laporan
3.	Membantu dokumentasi Mediasi dan Perjanjian Bersama	Dokumen Mediasi dan Perjanjian Bersama	2 Dokumen
4.	Melaksanakan tugas lain sesuai kewenangan atas perintah atasan	Laporan Tugas	12 Laporan
B	**KINERJA TAMBAHAN**		
1.	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan

Pelaihari, 16 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA,

AKHMAD NASHAR, S.H.
NIP. 19901025 202012 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
JalanA. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **AKHMAD NASHAR, S.H.**
Jabatan : **MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
MASTURI, S.STP	**AKHMAD NASHAR, S.H.**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19901025 202012 1 009**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASTURI, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. SUKAMTA	MASTURI, S.STP
	NIP. 19770705 199612 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
	1	2	3
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71.90 %
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan Kerja	6,5 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	42,5 %
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Indutri Terhadap PDRB	16,35 %
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.680.545.221
		2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 185.189.154
		3) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.234.260
		4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 597.833.098
		5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 98.430.000
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 14.933.460
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 944.232.429

Dipindai dengan CamScanner

4	Program Penempatan Tenaga Kerja	1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 147.119.845
		2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.000.000
		3) Perlindungan PMI di Daerah Kab/Kota	Rp. 24.778.500
5	Program Hubungan Industrial	1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.985.000
		2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 62.000.000
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 699.669.770
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 80.016.376
8	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten /kota	1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 16.320.000
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota (UPT BLK)	1) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 108.579.928
		2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 53.408.552
		3) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 238.384.366

Dipindai dengan CamScanner

		4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 49.635.522
10	Program Perencanaan Tenaga Kerja (UPT BLK)	1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 1.119.413.610

Pelaihari, Januari 2023

Bupati Tanah Laut,

H. SUKAMTA

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian,

MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MARIA ULFAH , S.Psi
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MASTURI, SSTP
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
MASTURI, SSTP	**MARIA ULFAH , S.Psi**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19791113 200501 2 008**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.680.545.221
		2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 185.189.154
		3) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.234.260
		4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 597.833.098
		5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 98.430.000

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Dinas

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

Sekretaris

MARIA ULFAH , S.Psi
NIP. 19791113 200501 2 008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A	**KINERJA UTAMA**		
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	1 Nilai Sakip Disnakerind	Istimewa
		2 Nilai Reformasi Birokrasi	Sangat Istimewa

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : YULIANI ASTUTI, SE
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MARIA ULFAH. S.Psi
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MARIA ULFAH , S.Psi	**YULIANI ASTUTI, SE**
NIP. 19791113 200501 2 008	**NIP. 19741029 200501 2 010**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG SEKRETARIAT
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	KINERJA UTAMA		
1	Menyusun Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Secara Berkala di Susun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	5 Dokumen
2	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp. 7.680.545.221**
		- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.674.532.981
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 6.012.240
		2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp. 11.234.260**
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.506.327
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 6.727.933

Pelaihari, 9 Januari 2023

Sekretaris

MARIA ULFAH , S.Psi
NIP. 19791113 200501 2 008

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SULASTRI LATIF, S.STP
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MARIA ULFAH , S.Psi
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari,9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MARIA ULFAH , S.Psi	**SULASTRI LATIF, S. STP**
NIP. 19791113 200501 2 008	**NIP. 19940405 201609 2 001**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	KINERJA UTAMA		
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	39 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp. 185.189.154**
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp. 8.712.737
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 33.979.197
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 37.451.678
		- Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Rp. 17.075.542
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 87.970.000
		2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp. 597.833.098**
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp. 134.200.000
		- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 33.979.197
		- Penyediaan Jasa Pelayanan umum	Rp. 463.633.098
		3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp. 98.430.000**
		- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendraan dinas operasional atau Lapangan	Rp. 86.580.000
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 11.850.000

Pelaihari, 9 Januari 2023

Sekretaris

MARIA ULFAH , S.Psi
NIP. 19791113 200501 2 008

Kasubag Umum dan Kepegawaian

SULASTRI LATIF, S. STP
NIP. 19940405 201609 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21168

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ANITA, A.Md
Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YULIANI ASTUTI, SE
Jabatan : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YULIANI ASTUTI, SE	ANITA, A.Md
NIP. 19741029 200501 2 010	NIP. 19850315 200501 2 005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21168

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun dokumen dan bukti-bukti kegiatan secara tertib dan teratur.	Jumlah dokumen yang diarsipkan	1000 Dokumen
2.	Menyimpan dokumen usulan pembayaran SPP, SPM dan dokumen peraturan keuangan lainnya.	Jumlah dokumen yang diarsipkan	50 Dokumen
3.	Menerima dan mencatat nomor, tanggal dan pokok surat yang diterima oleh subbag keuangan ke dalam buku agenda dalam rangka tertib administrasi	Jumlah surat yang diagendakan	40 Dokumen
4.	Mencatat dan mengarsip naskah dinas yang diselesaikan dan diproses lingkup subbag keuangan secara tertib dan teratur	Jumlah data yang dikerjakan	16 Dokumen
5.	Menginventarisasi pengeluaran keuangan / membuat kartu kontrol sesuai prosedur yang ditentukan dalam rangka tertib administrasi keuangan	Jumlah dokumen	360 Dokumen
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	800 Kegiatan

Pelaihari, Januari 2023

PIHAK KEDUA

YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010

PIHAK PERTAMA

ANITA, A.Md
NIP. 19850315 200501 2 005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SITI HAFSAH, A.Md
Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULIANI ASTUTI, SE
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010

Pihak Pertama,

SITI HAFSAH, A.Md
NIP. 19930330 201502 2 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah bahan pertanggung jawaban bendahara	2 bahan
2	Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) sesuai prosedur yang berlaku	Jumlah surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan	50 Berkas
3	Mengurus surat perintah membayar uang berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diurus sesuai prosedur yang berlaku	50 Berkas
4	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah tagihan yang telah dibayar sesuai ketentuan	1000 kwitansi
5	Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang telah dibukukan	57 dokumen
6	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan Keuangan yang dibuat sesuai ketentuan	19 Laporan
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	30 Laporan

Pelaihari, 09 Januari 2023

Kasubbag Perencanaan & Keuangan

YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010

Bendahara Pengeluran

SITI HAFSAH A.Md
NIP. 19930330 201502 2 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transfaran dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSDALIFAH, SE

Jabatan : ANALIS TATA LAKSANA

selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : SULASTRI LATIF, S. STP

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjianini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SULASTRI LATIF, S. STP	RUSDALIFAH, SE
NIP. 19940405 201609 2 001	NIP. 19750503 200701 2 026

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Melaksanakan tugas berdasarkan permasalahan Tata Laksana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah Dokumen	1000
2.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan	350
3.	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan manfaatnya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah Dokumen	5
4.	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah Laporan	35
5.	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Tata Laksana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen	56
6.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Dokumen	65

Pelaihari, 09 Januari 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian

SULASTRI LATIF, S. STP
NIP. 19940405 201609 2 001

Analis Tata Laksana

RUSDALIFAH, SE
NIP. 19750503 200701 2 026

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ELIZA MEILANI, S. Psi . M.Psi
Jabatan : Kabid PPTK

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MASTURI, S.STP
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MASTURI, S.STP	**ELIZA MEILANI, S. Psi . M.Psi**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19750514 200112 2 002**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PPTK
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	**KINERJA UTAMA**		
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase peserta latih yang kompeten	75%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	6,50 %

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp. 119.341.345**
		- Pelayanan Antar Kerja	Rp. 69.422.145
		- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp. 9.999.370
		- Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 39.919.830
		2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Rp. 3.000.000**
		- Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Rp. 3.000.000
		3. Perlindungan PMI di Daerah Kab/Kota	**Rp. 24.778.500**

		- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Rp. 24.778.500
2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Rp. 14.933.460**
		- Penyusunan RTK Mikro	Rp. 14.933.460
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Rp. 944.232.429**
		- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp.920.992.210
		- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 23.240.219

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Dinas

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

Kabid PPTK

ELIZA MEILANI, S. Psi, M. Psi
NIP. 19750514 200112 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RIZQI MUTAHARA, SE
Jabatan : PENGANTAR KERJA PERTAMA

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MASTURI, S.STP
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MASTURI, S.STP	**RIZQI MUTAHARA, SE**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19880402 202012 1 011**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1.	Melakukan layanan analisis jabatan dasar	Jumlah laporan analisis jabatan	12 Laporan
2.	Menyusun statistik informasi pasar kerja	Jumlah laporan statistik	12 Laporan
3.	Melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja	Jumlah laporan pelayanan	120 Laporan
4.	Mengidentifikasi ketersediaan informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja	Jumlah dokumen informasi loker	120 Dokumen
5.	Melakukan layanan pendaftaran pencari kerja	Jumlah dokumen layanan	500 Dokumen
6.	Menganalisis kelayakan dokumen pengajuan paspor calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah laporan analisis	3 Laporan
7.	Menyusun data penempatan tenaga kerja	Jumlah laporan penyusunan	12 Laporan
8.	Melakukan kompilasi data yang akan diserahkan kepada stakeholder/pemangku kepentingan untuk tindak lanjut hasil pemantauan penggunaan TKA	Jumlah laporan pengumpulan atau pengolahan data	12 Laporan
9.	Melakukan penyuluhan jabatan kepada siswa, mahasiswa, atau pencari kerja yang baru masuk ke pasar kerja	Jumlah laporan penyuluhan	1 Laporan
10.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diselesaikan	120 Kegiatan
B	**KINERJA TAMBAHAN**		
1	Melaksanakan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang
2	Melaksanakan Penerbitan LPTKS dalam 1 daerah	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2 Lembaga Kali

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

Pelaihari, 9 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGANTAR KERJA PERTAMA

RIZQI MUTAHARA, SE
NIP. 19880402 202012 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ERNA FITRIANI, S.Sos
Jabatan : INSTRUKTUR AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ELIZA MEILANI, M. Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA (P2TK)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ELIZA MEILANI, M. Psi	**ERNA FITRIANI, S.Sos**
NIP. 19750514 200112 2 002	**NIP. 19701203 200604 2 007**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1.	Melakukan indentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas organisasi	Jumlah kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas yang diidentifikasi	1 laporan
2.	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah program pelatihan yang disusun	1 program pelatihan
3.	Menyusun program peningkatan produktivitas bagi masyarakat / lembaga swadaya masyarakat	Jumlah program peningkatan produktivitas yang disusun	1 program peningkatan produktivitas
4.	Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi (lesson plan) pada level teknisi	Jumlah rencana pelaksanaan unit kompetensi yang disusun	1 rencana pelaksanaan pelatihan
5.	Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator	Jumlah rencana pelaksanaan pelatihan yang disusun	1 rencana pelaksanaan pelatihan
6.	Menyusun modul pelatihan pada level operator	Jumlah modul yang disusun	1 modul
7.	Menyusun media pembelajaran pada level teknisi	Jumlah media pembelajaran yang dibuat	1 media pembelajaran
8.	Melatih dengan tatap muka pada level teknisi dan / atau calon instruktur	Jumlah JP melatih	6 JP
9.	Melakukan pendampingan pada perusahaan menengah	Jumlah pendampingan perusahaan menengah	1 laporan
10.	Melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah	Jumlah bimbingan konsultasi perusahaan menengah	1 laporan
11.	Melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada level teknisi	Jumlah evaluasi hasil pembelajaran	1 kali

B	**KINERJA TAMBAHAN**		
1.	Melaksaakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	46 Orang
2.	Melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	18 Lembaga

Pelaihari, 9 Januari 2023

KEPALA BIDANG
PELATIHAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA (P2TK)

ELIZA MEILANI, M. Psi
NIP. 19750514 200112 2 002

INSTRUKTUR AHLI MUDA

ERNA FITRIANI, S.Sos
NIP. 197001203 200604 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RUSMILA, S.S, M.Pd

Jabatan : ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELIZA MEILANI, M. Psi

Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA (P2TK)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ELIZA MEILANI, M. Psi	**RUSMILA, S.S, M.Pd**
NIP. 19750514 200112 2 002	**NIP. 19750729 200501 2 001**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah hasil Laporan pengumpulan bahan-bahan kerja	250 Berkas
2.	Memperlajari, Menganalisis serta manelaah bahan-bahan sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah hasil Analisa dan telaah sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	200 Dokumen
3.	Membuat Laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telahaan dapat bermanfaat	Adanya laporan berdasarkan hasil kerja kepada pimpinan	12 Laporan Dokumen
4.	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatanya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah laporan berdasarkan saran dalam pelaksanaan pekerjaan	3 Laporan
5.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan berdasarkan terlaksananya tugas lain	100 Kali
B	**KINERJA TAMBAHAN**		
1	Melaksanakan Perlindungan PMI di Daerah Kab/Kota	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang
2	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana	Jumlah Perusahaan yang menyususn Dokumen RTK Mikro	8 Perusahaan
3	Melaksanakan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan KesempatanKerja	100 orang

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

Pelaihari, 9 Januari 2023

KEPALA BIDANG
PELATIHAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA (P2TK)

ELIZA MEILANI, M. Psi
NIP. 19750514 200112 2 002

ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA

RUSMILA, S.S, M.Pd
NIP. 19750729 200501 2 011

Type equation here.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SITI PARLINAH

Jabatan : Pengadministrasi Umum Pada Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELIZA MEILANI, M.Psi

Jabatan : Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ELIZA MEILANI, M.Psi	**SITI PARLINAH**
NIP. 19750514 200112 2 002	**NIP. 196601311990032002**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21168

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar kegiatan pada administrasi umum	25 Kegiatan
2.	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlakuagar tertib administrasi	Jumlah dokumen pada administrasi umum	20 Dokumen
3.	Menerima, Mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah kegiatan pada pencatatan dan penerimaan administrasi umum	125 Kegiatan
4.	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen pada pengelompokan administrasi umum	75 Dokumen
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	350 Kegiatan

Pelaihari, Januari 2023

PIHAK KEDUA

ELIZA MEILANI, S.Psi . M.Psi
NIP. 19741029 200501 2 010

PIHAK PERTAMA

SITI PARLINAH
NIP. 19660131 199003 2 002

Type equation here.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : NASRULLAH, SHI

Jabatan : Analis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja / Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELIZA MEILANI, M.Psi

Jabatan : Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ELIZA MEILANI, M.Psi	**Nasrulah, S.H.**
NIP. 19750514 200112 2 002	**NIP. 19750905 200701 1 012**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah kegiatan yang dikumpulkan	24 kali
2.	Membuat laporan statistik dan bulanan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah kegiatan yang dikumpulkan	12 kali
3.	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah dokumen yang dikumpulkan	24 kali
4.	Pelaporan informasi pasar kerja (IPK)	Jumlah dokumen yang dikumpulkan	48 kali
5.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah dokumen yang dikumpulkan	60 kali
6.	Menanda tangani kartu (Ak.1) bagi pencari kerja, pada waktu tertentu dapat bertindak sebagai petugas antar kerja	Jumlah dokomen yang dikumpulkan	900 kali

Pelaihari, 02 Januari 2023

Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

ELIZA MEILANI, M.Psi
NIP. 19750514 200112 2 002

Petugas antar kerja

NASRULLAH, S.H.I
NIP. 19750905 200701 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21168

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SHALEH
Jabatan : Pengadministrasi Umum Pada Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ELIZA MEILANI, S.Psi . M.Psi
Jabatan : Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
ELIZA MEILANI, S.Psi . M.Psi	**SHALEH**
NIP. 19750514 200112 2 002	**NIP. 19771110 200701 1 015**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21168

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar kegiatan pada administrasi umum	25 Kegiatan
2.	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlakuagar tertib administrasi	Jumlah dokumen pada administrasi umum	20 Dokumen
3.	Menerima, Mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah kegiatan pada pencatatan dan penerimaan administrasi umum	125 Kegiatan
4.	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen pada pengelompokan administrasi umum	75 Dokumen
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	350 Kegiatan

Pelaihari, Januari 2023

PIHAK KEDUA

ELIZA MEILANI, S.Psi . M.Psi
NIP. 19741029 200501 2 010

PIHAK PERTAMA

SHALEH
NIP. 19771110 200701 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : WIYANTI MELANSARI, SH
Jabatan : KABID HIJSTK

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MASTURI, S.STP
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

Pihak Pertama,

WIYANTI MELANSARI, SH
NIP. 19710626 199003 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG HIJSTK
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	**KINERJA UTAMA**		
1	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	32%

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp. 39.985.000**
		- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 15.160.000
		- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 24.825.000

Dipindai dengan CamScanner

		2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Rp. 62.000.000**
		- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	Rp. 62.000.000

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Dinas

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 1996 1 004

Kepala Bidang HIJSTK

WIYANTI MELANSARI, SH
NIP. 19710626 199003 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : AKHMAD NASHAR, S.H.
Jabatan : MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MASTURI, S.STP
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MASTURI, S.STP	**AKHMAD NASHAR, S.H.**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19901025 202012 1 009**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1.	Membantu menganalisa mogok kerja / penutupan perusahaan	Data Mogok Kerja / Penutupan Perusahaan	12 Data
2.	Membantu mengidentifikasi dan mendata PHK	Data Pemutusan Hubungan Kerja	12 Data
3.	Membantu mengidentifikasi dan mendata unjuk rasa	Data Unjuk Rasa	12 Data
4.	Membantu mendata Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Laporan Pendaftaran / Perubahan Serikat Pekerja / Buruh	12 Laporan
5.	Membantu mengidentifikasi berkas kelengkapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Dokumen Perjanjian Kerja WaktuTertentu, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	12 Dokumen
6	Membantu mengidentifikasi berkas kelengkapan permohonan pemborongan / penyedia jasa	Dokumen kelengkapan Pemborongan / Penyedia Jasa	12 Dokumen
7	Membantu melayani konseling / sosialisasi HI untuk masyarakat	Laporan Konseling / Sosialisasi Hubungan Industrial	12 Laporan
8	Membantu dokumentasi Mediasi dan Perjanjian Bersama	Dokumen Mediasi dan Perjanjian Bersama	12 Dokumen
9	Melaksanakan tugas lain sesuai kewenangan atas perintah atasan	Laporan Tugas	12 Laporan
B	**KINERJA TAMBAHAN**		
	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

Pelaihari, 9 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA
MASTURI, S.STP	**AKHMAD NASHAR, S.H.**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19901025 202012 1 009**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RANI YASODHARA, SKM
Jabatan : PENGANTAR KERJA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : WIYANTI MELANSARI, SH
Jabatan : KABID HIJSTK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WIYANTI MELANSARI, SH	**RANI YASODHARA, SKM**
NIP. 19710626 199003 2 001	**NIP. 19810322 200903 2 004**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1.	Menyusun indeks ketenagakerjaan Pusat/ Provinsi/ kabupaten/ kota	Data Indeks Ketenagakerjaan	1 Laporan
2.	Menyusun laporan informasi pasar kerja	Data Informasi Pasar Kerja	12 Laporan
3.	Melakukan sosialisasi informasi pasar kerja	Laporan Hasil Sosialisasi	3 Laporan
4.	Memberikan konsultasi/asistensi kepada perusahaan/instansi untuk penyelenggaraan/ pelaksanaan teknis/penyusunan hasil analisis jabatan	Data Hasil Analisis Jabatan	1 Laporan
5.	Melakukan sosialisasi bimbingan jabatan kepada guru BK/guru/lembaga penempatan/lembaga pelatihan/lembaga pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi Bimbingan Jabatan	1 Kegiatan
6.	Mengecek kebenaran permintaan tenaga kerja ke lapangan	Data Lowongan Kerja	12 Berkas
7.	Menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan perantaraan kerja	Data rencana kerja	1 Laporan
8.	Melakukan tindak lanjut dan pemantauan penempatan tenaga kerja	Data Pencari kerja yang ditempatkan	12 orang
9.	Mengecek di lapangan, kebenaran data berkas atau menilai kelayakan permohonan ijin pendirian/perubahan atau pencabutan ijin lembaga bursa kerja	Dokumen perijinan pendirian Lembaga swasta	8 Laporan
10.	Memantau lembaga bursa kerja/bursa kerja raya/ bursa kerja sejenisnya	Data Bursa Kerja Khusus	1 Laporan
11.	Melakukan pemantauan penggunaan TKA	Data TKA	12 Laporan
B	**KINERJA TAMBAHAN**		
1	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yangTerkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	4 Perusahaan

Pelaihari, 9 Januari 2023

KEPALA BIDANG HIJSTK

WIYANTI MELANSARI, SH
NIP. 19710623 199003 2 001

PENGANTAR KERJA AHLI MUDA

RANI YASODHARA, SKM
NIP. 1981322 200903 2 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : FADLY FAUZAN, S.H.
Jabatan : MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WIYANTI MELANSARI, SH.
Jabatan : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan berusaha mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
WIYANTI MELANSARI, SH.	**FADLY FAUZAN, S.H.**
NIP. 19760624 200501 2 017	**NIP. 19870708 201402 1 001**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1.	Membantu Pencatatan Lembaga Ketenagakerjaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Dokumen Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	6 Dokumen
2.	Membantu Pencatatan Lembaga Ketenagakerjaan Lembaga Kerjasama Bipartit	Dokumen Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	6 Dokumen
3.	Membantu Membuat Lembaga Ketenagakerjaan Lembaga Kerjasama Tripartit	Surat Keputusan Bupati	1 SK
4.	Membantu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perkara	3 Perkara
5.	Membantu Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Dokumen Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	12 Permohonan
6	Membantu Pencatatan Peraturan Perusahaan	Dokumen Pencatatan Peraturan Perusahaan	3 Permohonan
7	Membantu Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama	Dokumen Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama	1 Permohonan
8	Membantu Membuat Data PHK	Jumlah Laporan Pemutusan Hubungan Kerja	12 Laporan
9	Membantu Membuat Data Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan Lembaga Ketenagakerjaan	12 Laporan
10	Membantu Membuat Data Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Laporan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Laporan
11	Membantu melakukan Layanan Konseling Teknis Bidang Hubungan Industrial	Jumlah Konseling	12 Kali
B	**KINERJA TAMBAHAN**		
1	Menyelenggaraan Hubungan Industrial yang Baik	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

Pelaihari, 9 Januari 2023

KEPALA BIDANG HIJSTK

WIYANTI MELANSARI, SH.
NIP. 19760624 200501 2 017

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

FADLY FAUZAN, S.H.
NIP. 19870708 201402 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : NURMAYA SAVITRI, ST.MS
Jabatan : Kabid Perindustrian

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MASTURI, S.STP
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MASTURI, S.STP	**NURMAYA SAVITRI, ST .MS**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19820529 200903 2 007**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERINDUSTRIAN
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	100 %
2	Menguatnya struktur industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukkan industri	65 %

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Rp. 699.669.770**
		- Koordinasi dan sinkronasi dan pelaksanaan kebijakan perwilayahan industri	Rp. 11.550.000
		- Koordinasi, Sinkronasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 310.000.045
		- Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 71.538.071

Dipindai dengan CamScanner

		- Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 297.109.706
		- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp. 9.471.948
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Rp. 80.016.376**
		- Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan AnalisisData Industri, DataKawasan Industri sertaData Lain LingkupKabupaten/Kota MelaluiSistem Informasi IndustriNasional (SIINas)	Rp. 80.016.376
3.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Rp. 16.320.000**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ANDHIKA PUTRI PARAMITA, ST
Jabatan : PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NURMAYA SAVITRI, ST, MS
Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan berusaha mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
NURMAYA SAVITRI, ST, MS.	**ANDHIKA PUTRI PARAMITA, ST.**
NIP. 19820529 200903 2 007	**NIP. 19870129 201101 2 001**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1.	Merumuskan konsep program penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah konsep program penyuluhan	1 dokumen
2.	Melaksanakan penyuluhan indag melalui pendataan/ sosialisasi/ temu wicara serta melayani jasa konsultasi industri bagi pengusaha atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	4 laporan
3	Melaksanakan kegiatan pelatihan pembangunan sumber daya industri bagi wirausaha baru/ pengusaha dan atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	4 kegiatan
4.	Melaksanakan bimbingan penerapan manajemen mutu usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil fasilitasi manajemen mutu bagi IKM	4 laporan
5.	Mengembangkan usaha indag melalui peran aktif partisipasi dalam event – event pameran indag	Jumlah laporan hasil fasilitasi keikutsertaan IKM dalam event pameran	2 laporan
6.	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan	1 dokumen
B	**KINERJA TAMBAHAN**		
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen

Pelaihari, 9 Januari 2023

KABID PERINDUSTRIAN,

NURMAYA SAVITRI, ST, MS.
NIP. 19820529 200903 2 007

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA,

ANDHIKA PUTRI PARAMITA, ST.
NIP. 19870129 201101 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : YASID ARAFAT, SKM
Jabatan : PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURMAYA SAVITRI, ST, MS
Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan berusaha mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
NURMAYA SAVITRI, ST, MS.	**YASID ARAFAT, SKM.**
NIP. 19820529 200903 2 007	**NIP. 19870129 201101 2 001**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1.	Merumuskan konsep program penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah konsep program penyuluhan	3 dokumen
2.	Melaksanakan penyuluhan indag melalui pendataan/ sosialisasi/ temu wicara serta melayani jasa konsultasi industri bagi pengusaha atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	4 laporan
3	Melaksanakan kegiatan pelatihan pembangunan sumber daya industri bagi wirausaha baru/ pengusaha dan atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	4 kegiatan
4.	Melaksanakan bimbingan penerapan manajemen mutu usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil fasilitasi manajemen mutu bagi IKM	4 laporan
5.	Mengembangkan usaha indag melalui peran aktif partisipasi dalam event – event pameran indag	Jumlah laporan hasil fasilitasi keikutsertaan IKM dalam event pameran	2 laporan
6.	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan	3 dokumen
B	**KINERJA TAMBAHAN**		
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pengawasan Perizinan/Hasil Fasilitasi/Verifikasi Teknis Perizinan Sektor Industri.	1 Dokumen

Dipindai dengan CamScanner

2	Memfasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri lingkup kabupaten	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri/ Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota.	1 Dokumen

Pelaihari, 9 Januari 2023

KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN,

NURMAYA SAVITRI, ST, MS.
NIP. 19820529 200903 2 007

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN MUDA,

YASID ARAFAT, SKM.
NIP. 19870129 201101 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : HERMAN
Jabatan : PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NURMAYA SAVITRI, ST, MS
Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan berusaha mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
NURMAYA SAVITRI, ST, MS.	**HERMAN**
NIP. 19820529 200903 2 007	**NIP. 19831118 2007011 001**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1.	Membantu berkoordinasi, memfasilitasi kegiatan untuk Promosi Sumberdaya Industri Kecil/Menengah	Jumlah Laporan	45 Kegiatan
2.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Industri	Jumlah Dokumen	24 Dokumen
3.	Membantu menyiapkan bahan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bantuan pinjaman kredit Gapura Karomah	Jumlah Laporan	50 Kegiatan
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis msupun lisan	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	80 Kegiatan
B	**KINERJA TAMBAHAN**		
1.	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen

Pelaihari, 9 Januari 2023

KABID PERINDUSTRIAN,

NURMAYA SAVITRI, ST, MS.
NIP. 19820529 200903 2 007

PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI

HERMAN.
NIP. 19831118 200701 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : AKHMAD NOPRIADI, A.P. M. Si
Jabatan : Kepala UPT BLK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELIZA MEILANI, S.Psi . M.Psi
Jabatan : Kabid PPTK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ELIZA MEILANI, S.Psi . M.Psi	**AKHMAD NOPRIADI, A.P. M. Si**
NIP. 19750514 200112 2 002	**NIP. 19741120 199412 1 001**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPT BLK
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	KINERJA UTAMA		
1	1 Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	1.1 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192 Orang
		1.2 Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur danPeningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	11 Lembaga

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Rp. 1.119.413.610**
		- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 54.942.152
		- Koordinasi LintasLembaga dan Kerja Samadengan Sektor Swastauntuk PenyediaanInstruktur serta Saranadan Prasarana LembagaPelatihan Kerja	Rp. 1.064.471.458

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kabid PPTK

ELIZA MEILANI, S.Psi, M. Psi
NIP. 19750514 200112 2 002

Kepala UPT BLK

AKHMAD NOPRIADI, A.P. M. Si
NIP. 19741120 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MUHDI, A. Md
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha BLK

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MARIA ULFAH, S. Psi
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MARIA ULFAH, S. Psi	**MUHDI, A. Md**
NIP. 19791113 200501 2 008	**NIP. 19761127 200604 1 010**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPT BLK
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	0 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 3 Buah Mobil Dinas Operasional
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp. 108.579.928**
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp. 7.862.346
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10.490.913
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.656.705
		- Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Rp. 12.464.964
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 73.105.000
		2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp. 53.408.552**
		- Pengadaan Meubel	Rp. 23.726.052
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gd kantor	Rp. 29.682.500
		3. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**Rp. 238.384.366**
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp. 73.840.000

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

		- Penyediaan Jasa Pelayanan umum	Rp.164.544.366
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp. 49.635.522**
		- Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 49.635.522

Pelaihari, 9 Januari 2023
Kasubbag Tata Usaha BLK

MUHDI, A. Md
NIP. 19761127 200604 1 010

Sekretaris

MARIA ULFAH, S.Psi
NIP. 19791113 200501 2 008

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
BALAI LATIHAN KERJA
Alamat Jalan A . Syairani No. Telp. (0512) 21243 Pelaihari 70813

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SITI NORBAYAH
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHDI, A.Md
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHDI, A.Md	**SITI NORBAYAH**
NIP. 19761127 200604 1 010	**NIP. 19841126 200701 2 001**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
BALAI LATIHAN KERJA

Alamat Jalan A . Syairani No. Telp. (0512) 21243 Pelaihari 70813

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencairan.	Jumlah Kegiatan yang di kerjakan	1000 Kegiatan
2.	Memberi lembar pengantar pada administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian.	Jumlah Kegiatan yang di kerjakan	300 Kegiatan
3.	Mengelompokkan administrasi keuangan atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian.	Jumlah dokumen yang arsipkan	500 Dokumen
4.	Mendokumentasikan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.	Jumlah dokumen yang dibukukan	500 Dokumen
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah Laporan keuangan	30 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1000 Kegiatan

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MUHDI, A.Md
NIP. 19761127 200604 1 010

PIHAK PERTAMA

SITI NORBAYAH
NIP. 19841126 200701 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MULYONO
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHDI, A.Md
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPT BLK PELAIHARI

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHDI, A.Md	MULYONO
NIP. 19761127 200604 1 010	NIP. 19740902 200701 1 017

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah Kegiatan yang dikerjakan	100 Dokumen
2.	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah Kegiatan yang dikerjakan	100 Dokumen
3.	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah Dokumen yang diarsipkan	100 Dokumen
4.	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah Dokumen yang dibukukan	100 Dokumen
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Administrasi	30 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan yang dikerjakan	200 Kegiatan

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MUHDI, A.Md
NIP. 19761127 200604 1 010

PIHAK PERTAMA

MULYONO
NIP. 19740902 200701 1 017

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : FITRIANSYAH
Jabatan : INSTRUKTUR PENYELIA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI, S.STP
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MASTURI S.STP	**FITRIANSYAH**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19660222 198703 1 008**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam 1 paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang di susun	2 Daftar bahan
2.	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam 1 paket	Jumlah daftar bahan yang di susun	2 Daftar bahan
3.	Membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangan nya	Jumlah job sheet yang di buat	2 set job sheet
4.	Melatih pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta pencari kerja SOTA / Pekerja pada level produksi	Jumlah jam pelajaran	480 jp
5.	Merawat peralatan pelatihan	Jumlah alat yang di rawat	400 unit alat
6	Memperbaiki kerusakan ringan peralatan pelatihan	Jumlah unit alat yang di perbaiki	45 unit alat
7	Mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangan nya	Jumlah laporan evaluasi peserta pelatihan	6 laporan
8	Menyusun program pelatihan tingkat dasar para pencari kerja	Jumlah program pelatihan	2 program

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

FITRIANSYAH
NIP. 19660222 198703 1 008

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas (0512)21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI SUSILAWATI, SP

Jabatan : INSTRUKTUR MUDA

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	INSTRUKTUR MUDA
MASTURI, S.STP	**BUDI SUSILAWATI, SP**
NIP.19770705 199612 1 004	**NIP.19781022 200801 2 015**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas (0512)21165 Pelaihari 70814

Kabupaten Tanah Laut

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah program pelatihan dalam satu tahun	3 GBPP
2.	Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan pada setiap unit kompetensi pada level operator	Jumlah rencana pelatihan dalam satu tahun	3 session plan
3.	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan	Jumlah daftar fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam satu tahun	3 daftar fasilitas
4.	Menyusun modul pelatihan pada level operator	Jumlah modul pelatiahan dalam satu tahun	3 modul
5.	Melatih dengan tatap muka pada level operator	Jumlah jam pelajaran pelatihan dalam satu tahun	460 Jam pelajaran
6.	Memelihara peralatan pelatihan	Jumlah alat yang dipelihara dalam satu tahun	30 laporan
7.	Memperbaiki peralatan pelatihan	Jumlah peralatan yang diperbaiki dalam satu tahun	12 laporan
8.	Membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	Jumlah job sheet pelatihan dalam satu tahun	3 Job sheet
9.	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas instruktur	Jumlah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas yang akan dilakukan selama satu tahun	5 laporan
10.	Menyusun media pembelajaran pada level operator	Jumlah media pembelajaran yang akan di buat selama satu tahun	3 unit
11.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumalah kegiatan kedinasan yang diperintahkan atasan selama satu tahun	12 kegiatan
12	Mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya (5 laporan)	Jumalah evaluasi kegiatan kemajuan siswa selama satu tahun	3 laporan

Pelaihari, 9 Januari 2022

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MASTURI, S.STP
NIP.19770705 199612 1 004

INSTRUKTUR

BUDI SUSILAWATI, SP
NIP.19781022 200801 2015

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : DITA AMARA, S.Kom.
Jabatan : INSTRUKTUR PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI S.STP.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MASTURI S.STP	**DITA AMARA, S.Kom**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19970914 202203 2 009**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi pada Level Operator	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang disusun	1 Rencana Pelaksanaan Pelatihan
2.	Menyusun Media Pembelajaran pada Level Operator	Jumlah Media pembelajaran yang disusun	2 Media Pembelajaran
3.	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	Jumlah Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan yang disusun	1 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan
4.	Melatih dengan Tatap Muka pada Level Operator	Jumlah JP	159 JP
5.	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan Pelatihan	12 Laporan
6.	Melakukan Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Instruktur	Jumlah Laporan Kegiatan	12 Laporan

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

DITA AMARA, S.Kom
NIP. 19970914 202203 2 009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : NORSEHAT, S.Kom.
Jabatan : INSTRUKTUR PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI S.STP.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MASTURI S.STP	**NORSEHAT, S.Kom.**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19910317 202203 2 006**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi pada Level Operator	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang disusun	1 Rencana Pelaksanaan Pelatihan
2.	Menyusun Media Pembelajaran pada Level Operator	Jumlah Media pembelajaran yang disusun	2 Media Pembelajaran
3.	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	Jumlah Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan yang disusun	1 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan
4.	Melatih dengan Tatap Muka pada Level Operator	Jumlah JP	159 JP
5.	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan Pelatihan	12 Laporan
6.	Melakukan Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Instruktur	Jumlah Laporan Kegiatan	12 Laporan

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

NORSEHAT, S.Kom.
NIP. 19910317 202203 2 006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : BUDIMAN SAPUTRA, ST
Jabatan : INSTRUKTUR MUDA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI S.STP.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

BUDIMAN SAPUTRA, ST
NIP. 19830430 201001 1 009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen
2.	menyusun program pelatihan tingkat dasar	Jumlah Naskah Program	2 Naskah
3.	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas dalam satu paket untuk tingkat dasar	Jumlah Daftar Fasilitas	2 Daftar Fasilitas
4.	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	Jumlah Daftar Bahan	2 Daftar Bahan
5.	Memelihara peralatan pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan alat	12 Laporan
6.	Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket	Jumlah Dokumen GBPP	2 GBPP
7.	Membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Set Job Sheet yang dibuat	10 Set Job Sheet
8.	Melatih pada pelatihan tingkat dasar	Jumlah JP melatih	360 JP
9.	Mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	6 Laporan
10.	Membuat media atau alat peraga pelatihan berupa multimedia	Jumlah Media Pembelajaran/Alat peraga	2 Paket
11.	Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Session Plan bahasan mata pelatihan	6 Lession Plan
12.	Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yg diperintahkan pimpinan baik tertulis/ lisan	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	24 Kegiatan
13.	Melakukan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Instruktur sesuai kewenangannya	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	12 Kegiatan

Pelaihari, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

BUDIMAN SAPUTRA, ST
NIP. 19830430 201001 1 009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : GUNAWAN,A.Md
Jabatan : INSTRUKTUR MAHIR

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI,S.STP
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MASTURI S.STP	**GUNAWAN, A.Md**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19820406 201001 1 007**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun Satuan Pokok Bahasan Pelatihan Dalam Satu Paket sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Session Plan yang disusun	8 Session Plan
2.	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang disusun	1 Daftar Fasilitas Pelatihan
3.	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar bahan pelatihan yang disusun	1 Daftar Bahan Pelatihan
4.	Membuat Job Sheet Mata Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Job Sheet yang dibuat	17 Job Sheet
5.	Melatih Pada Pelatihan Tingkat Menengah Dengan Peserta Pencari Kerja SLTA Ke Bawah atau Pekerja Pada Level Pelaksana/Produksi	Jumlah Jam Pelatihan	240 Jam Pelatihan
6.	Merawat Peralatan Pelatihan	Jumlah Unit Alat yang dirawat	160 Unit Alat
7.	Memperbaiki Kerusakan ringan Peralatan pelatihan	Jumlah Unit alat yang diperbaiki	48 Unit Alat
8.	Mengevaluasi Kemajuan Peserta Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah laporan Evaluasi peserta pelatihan	17 Laporan
9.	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar Bagi Pencari Kerja	Jumlah Program pelatihan yang disusun	1 Program pelatihan

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

GUNAWAN, A.Md
NIP. 19820406 201001 1 007

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : HASYIM ASY'ARI YUSUF
Jabatan : INSTRUKTUR MUDA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI S.STP.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MASTURI S.STP	**HASYIM ASY'ARI YUSUF**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19830205 201001 1 008**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Mengembangkan Program Pelatihan	Jumlah program pelatihan yang disusun	2 Program Pelatihan
2.	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang disusun	2 Rencana Pelaksanaan Pelatihan
3.	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	Jumlah Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan yang disusun	2 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan
4.	Menyusun Modul Pelatihan	Jumlah modul yang disusun	6 modul
5.	Menyusun perangkat evalusai untuk program pelatihan level operator	Jumlah naskah perangkat penilaian yang dibuat	12 naskah perangkat evaluasi
6	Membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya:	Jumlah jobsheet set	5 jobsheet set
7	Melatih dengan Tatap Muka	Jumlah JP melatih	424 JP
8	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah laporan alat yang dipelihara	160 laporan
9	Memperbaiki Peralatan Pelatihan	Jumlah laporan alat yang diperbaiki	20 laporan
10	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Jumlah laporan kegiatan	2 laporan
11	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Instruktur	Jumlah laporan kegiatan	2 laporan

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

HASYIM ASY'ARI YUSUF
NIP. 19830205 201001 1 008

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MUHAMMAD QASTOLLANI, ST
Jabatan : INSTRUKTUR MUDA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI, S.STP
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MASTURI, S.STP	**MUHAMMAD QASTOLLANI, S.T.**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19840618 201001 1 012**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah naskah program	4 Naskah Program
2.	Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket	Jumlah Dokumen GBPP	4 GBPP
3.	Menyusun modul pelatihan pada level operator	Jumlah set modul	3 modul
4	Menyusun media pembelajaran pada level operator	Jumlah media pembelajaran / alat peraga	4 Paket
5	Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Session Plan bahasan mata pelatihan	12 Session Plan
6	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan	Jumlah daftar fasilitas dan pralatan	4 Daftar Fasilitas
7	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat operator	Jumlah Daftar Bahan	4 Daftar Bahan
8	Membuat jobsheet Mata pelatihan sesuai dengan kewenangan nya	Jumlah lember kerja praktek yang disusun	24 Set jobsheet
9	Melatih dengan tatap muka pada level operator	Jumlah JP	700 JP
10	Mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	12 Laporan
11	Memelihara peralatan pelatihan	Jumlah pralatan yang di rawat	12 Laporan
12	Memperbaiki peralatan pelatihan	Jumlah pralatan yangdiperbaiki	12 Laporan
13	Menyusun daftar usulan penetapan angka kredit	Jumlah Dokumen yangdisusun	2 Dokumen
14	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Jumlah laporan kegiatan	2 laporan
15	Melakukan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Instruktur sesuai kewenangannya	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	12 Kegiatan

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD QASTOLLANI, S.T.
NIP. 19840618 201001 1 012

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PAUJI RAHMAN,A.Md
Jabatan : INSTRUKTUR MAHIR

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI,S.STP
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MASTURI S.STP	**PAUJI RAHMAN, A.Md**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 197608222010011004**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun Satuan Pokok Bahasan Pelatihan Dalam Satu Paket sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Session Plan yang disusun	18 Session Plan
2.	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang disusun	2 Daftar Fasilitas Pelatihan
3.	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar bahan pelatihan yang disusun	2 Daftar Bahan Pelatihan
4.	Membuat Job Sheet Mata Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Job Sheet yang dibuat	24 Job Sheet
5.	Membuat Media Atau Alat Peraga Pelatihan	Jumlah media atau alat peraga yang dibuat	2 Unit media atau alat peraga
6	Melatih Pada Pelatihan Tingkat Menengah Dengan Peserta Pencari Kerja SLTA Ke Bawah atau Pekerja Pada Level Pelaksana/Produksi	Jumlah Jam Pelatihan	580 Jam Pelatihan
7	Merawat Peralatan Pelatihan	Jumlah Unit Alat yang dirawat	480 Unit Alat
8	Memperbaiki Kerusakan ringan Peralatan pelatihan	Jumlah Unit alat yang diperbaiki	36 Unit Alat
9	Mengevaluasi Kemajuan Peserta Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah laporan Evaluasi peserta pelatihan	18 Laporan
10	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar Bagi Pencari Kerja	Jumlah Program pelatihan yang disusun	2 Program pelatihan

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

PAUJI RAHMAN, A.Md
NIP. 197608222010011004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RALIANNOOR,ST. MT
Jabatan : INSTRUKTUR PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI S.STP.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MASTURI S.STP	**RALIANNOOR, ST, MT**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19821114 201001 1 015**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen
2.	menyusun program pelatihan tingkat dasar	Jumlah Naskah Program	1 Naskah
3.	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas dalam satu paket untuk tingkat dasar	Jumlah Daftar Fasilitas	1 Daftar Fasilitas
4.	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	Jumlah Daftar Bahan	1 Daftar Bahan
5.	Memelihara peralatan pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan alat	8 Laporan
6.	Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket	Jumlah Dokumen GBPP	1GBPP
7.	Membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Set Job Sheet yang dibuat	7 Set Job Sheet
8.	Melatih pada pelatihan tingkat dasar	Jumlah JP melatih	320 JP
9.	Mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	3 Laporan
10.	Membuat media atau alat peraga pelatihan berupa multimedia	Jumlah Media Pembelajaran/Alat peraga	1 Paket
11.	Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Session Plan bahasan mata pelatihan	3 Lession Plan
12.	Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yg diperintahkan pimpinan baik tertulis/ lisan	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	12 Kegiatan
13.	Melakukan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Instruktur sesuai kewenangannya	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	6 Kegiatan

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

RALIANNOOR, ST, MT
NIP. 19821114 201001 1 015

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGIANTORO, S.Kom.
Jabatan : INSTRUKTUR PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI S.STP.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MASTURI S.STP.	**SUGIANTORO, S.Kom.**
NIP. 19770705 199612 1 004	**NIP. 19980505 202203 1 005**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit	Jumlah Dokumen yang Disusun	1 Dokumen
2.	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar	Jumlah Naskah Program	1 Naskah
3.	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dalam Satu Paket untuk Tingkat Dasar	Jumlah Daftar Fasilitas	1 Daftar Fasilitas
4.	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan dalam Satu Paket untuk Tingkat Dasar	Jumlah Daftar Bahan	1 Daftar Bahan
5.	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Alat	12 Laporan
6.	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi untuk Tingkat Dasar	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang Disusun	1 Rencana Pelaksanaan Pelatihan
7.	Melatih dengan Tatap Muka pada Tingkat Dasar	Jumlah JP Melatih	159 JP
8.	Menyusun Media Pembelajaran untuk Tingkat Dasar	Jumlah Media Pembelajaran/Alat Peraga	2 Media Pembelajaran
9.	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diperintahkan Pimpinan Baik Tertulis/Lisan	Jumlah Kegiatan yang Dijalankan	24 Kegiatan
10.	Melakukan Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Instruktur Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kegiatan yang Dijalankan	12 Kegiatan

Pelaihari, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA

MASTURI S.STP.
NIP. 19770705 199612 1 004

PIHAK PERTAMA

SUGIANTORO, S.Kom.
NIP. 19980505 200203 1 005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ZAINAL RAKHMAN, A.Md
Jabatan : INSTRUKTUR MAHIR

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASTURI, S.STP
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

KEPALA DINAS NAKERPERIND KABUPATEN TANAH LAUT	INSTRUKTUR MAHIR
MASTURI, S.STP	**ZAINAL RAKHMAN, A.Md**
NIP. 197707051996121004	**NIP. 198005212010011018**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket	Jumlah Daftar fasilitas yang disusun	2 Daftar Fasilitas pelatihan
2.	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket.	Jumlah Daftar Bahan yang disusun	2 Daftar Bahan pelatihan
3.	Membuat jobsheet sesuai dengan kewenangannya.	Jumlah Jobsheet yang dibuat	4 set jobsheet
4.	Melatih pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta pencari kerja SLTA kebawah atau pekerja pada level Pelaksana/ Produksi	Jumlah Jam Pelatihan	360 Jam pelatihan
5.	Menyusun program Pelatihan Tingkat Dasar bagi pencari Kerja	Jumlah Program yang disusun	2 Program Pelatihan
6.	Merawat peralatan Pelatihan	Jumlah Unit alat yang dirawat	170 Unit alat

Pelaihari, 9 Januari 2023

KEPALA DINAS NAKERPRIND
KABUPATEN TANAH LAUT

MASTURI, S.STP
NIP. 197707051996121004

INSTRUKTUR MAHIR

ZAINAL RAKHMAN, A.Md
NIP. 198005212010011018

Dipindai dengan CamScanner

PENGUKURAN KINERJA SKPD TRIWULAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 2		
1	2	3	4												
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	69.61%
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan Kerja	6,5 %	0	0	0	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	96.42%
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	42.5%	0	0	0	0	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Indutri Terhadap PDRB	16,35 %	0	0	0	0	0	0	0	12.60%	12.60%	12.60%	12.60%	12.60%
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Masih proses	Masih proses	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TANAH LAUT

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN SEKRETARIAT TAHUN 2023

Nama : MARIA ULFAH, S.Psi
Jabatan : SEKRETARIS

NO	Kinerja Utama		Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2		4	5											
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Nilai Sakip Disnakerind	Istimewa	Masih proses	Masih proses	Masih proses	Masih proses	Masih proses	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)
		Nilai Reformasi Birokrasi	Sangat Istimewa	Masih proses	Masih proses	Masih proses	Masih proses	Masih proses	Masih proses	94,13 (Istimewa)	94,13 (Istimewa)	94,13 (Istimewa)	94,13 (Istimewa)	94,13 (Istimewa)	94,13 (Istimewa)

Nama : YULIANI ASTUTI, SE
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Secara Berkala di Susun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
2	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan

Nama : SULASTRI LATIF, S. STP
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	39 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	39 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	39 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	40 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	40 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	40 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	40 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan

Nama : SITI HAFSAH, A.Md
Jabatan : BENDAHARA

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah bahan pertanggung jawaban bendahara	2 bahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2	Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) sesuai prosedur yang berlaku	Jumlah surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan	50 Berkas	2	2	7	6	5	6	5	4	4	4	6	7
3	Mengurus surat perintah membayar uang berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diurus sesuai prosedur yang berlaku	50 Berkas	2	2	7	6	5	6	5	4	4	4	6	7
4	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah tagihan yang telah dibayar sesuai ketentuan	1000 kwitansi	6	105	121	64	100	116	126	150	125	125	190	166
5	Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang telah dibukukan	57 dokumen	3	3	3	6	3	3	6	6	3	6	3	12
6	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan Keuangan yang dibuat sesuai ketentuan	19 Laporan	0	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	4
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	30 Laporan	3	2	1	1	2	1	1	5	3	3	3	5

Nama : RUSDALIFAH, SE
Jabatan : ANALIS TATA LAKSANA

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Melaksanakan tugas berdasarkan permasalahan tata laksana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen	1000 Dokumen	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90
2	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan	350 Kegiatan	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30
3	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan manfaatnya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah dokumen	5 Dokumen			1			1			2			1
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan	35 Laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
5	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan tata laksana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen	56 Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4

6	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Dokumen	65 Dokumen	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5
7	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Dokumen	65 Dokumen	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	5	5

Nama : RUSDALIFAH, SE
Jabatan : ANALIS TATA LAKSANA

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun dokumen dan bukti-bukti kegiatan secara tertib dan teratus	Jumlah dokumen yang diarsipkan	1000 Dokumen	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84
2	Menyimpan dokumen usulan pembayaran SPP, SPM dan dokumen peraturan keuangan lainnya	Jumlah dokumen yang diarsipkan	50 Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
3	Menerima dan mencatat nomor, tanggal dan pokok surat yang diterima oleh subbag keuangan ke dalam buku agenda dalam rangka tertib administrasi	Jumlah surat yang diagendakan	40 Dokumen	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
4	Mencatat dan mengarsip naskah dinas yang diselesaikan dan diproses lingkup subbag keuangan secara tertib dan teratur	Jumlah data yang dikerjakan	16 Laporan	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
5	Menginventarisasi pengeluaran keuangan, membuat kartu kontrol sesuai prosedur yang ditentukan dalam rangka tertib administrasi keuangan	Jumlah Dokumen	360 Dokumen	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun tidak tertulis	Jumlahkegiatan yang dilaksanakan	800 Kegiatan	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA TAHUN 2023

Nama : ELIZA MEILANI, S. Psi, M. Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4												
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase peserta latih yang kompeten	75%	0.00%	0.00%	6.27%	10.59%	0.00%	0.00%	9.41%	8.24%	0.00%	9.41%	0.00%	3.92%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	6,50 %	0.00%	7.53%	0.00%	20.33%	0.00%	0.00%	8.65%	3.81%	0.00%	30.36%	8.65%	17.04%

Nama : RIZQI MUTAHARA, SE
Jabatan : PENGANTAR KERJA PERTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4												
A	KINERJA UTAMA														
1	Melakukan layanan analisis jabatan dasar	Jumlah laporan analisis jabatan	12 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
2	Menyusun statistik informasi pasar kerja	Jumlah laporan statistik	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja	Jumlah laporan pelayanan	120 Laporan	18	3	10	9	13	6	12	13	10	7	12	8
4	Mengidentifikasi ketersediaan informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja	Jumlah dokumen informasi loker	120 Dokumen	18	3	10	9	13	6	12	13	10	7	12	8
5	Melakukan layanan pendaftaran pencari kerja	Jumlah dokumen layanan	500 Dokumen	16	29	17	55	123	230	92	143	75	73	79	42
6	Menganalisis kelayakan dokumen pengajuan paspor calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah laporan analisis	3 Laporan	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0
7	Menyusun data penempatan tenaga kerja	Jumlah laporan penyusunan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Melakukan kompilasi data yang akan diserahkan kepada stakeholder/pemangku kepentingan untuk tindak lanjut hasil pemantauan penggunaan TKA	Jumlah laporan pengumpulan atau pengolahan data	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Melakukan penyuluhan jabatan kepada siswa, mahasiswa, atau pencari kerja yang baru masuk ke pasar kerja	Jumlah laporan penyuluhan	1 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diselesaikan	120 Kegiatan	10	28	16	14	11	18	9	0	12	13	8	20
B	KINERJA TAMBAHAN														

1	Melaksanakan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	0	35	0	53	0	0	34	19	0	82	34	24
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
2	Melaksanakan Penerbitan LPTKS dalam 1 daerah	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2 Lembaga 2 Kali	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0

Nama : ERNA FITRIANI, S.Sos
Jabatan : INSTRUKTUR AHLI MUDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4												
A	KINERJA UTAMA														
1	Melakukan indentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas organisasi	Jumlah kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas yang diidentifikasi	1 laporan	5	4	2	1	2	1	3	2	7	3	8	9
2	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah program pelatihan yang disusun	1 program pelatihan	1	-	2	4	-	3	-	-	1	1	-	-
3	Menyusun program peningkatan produktivitas bagi masyarakat / lembaga swadaya masyarakat	Jumlah program peningkatan produktivitas yang disusun	1 program peningkatan produktivitas	-	3	6	4	20	1	2	1	-	1	6	4
4	Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi (lesson plan) pada level teknisi	Jumlah rencana pelaksanaan unit kompetensi yang disusun	1 rencana pelaksanaan pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator	Jumlah rencana pelaksanaan pelatihan yang disusun	1 rencana pelaksanaan pelatihan	1	-	-	4	-	3	-	-	1	1	-	-
6	Menyusun modul pelatihan pada level operator	Jumlah modul yang disusun	1 modul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Menyusun media pembelajaran pada level teknisi	Jumlah media pembelajaran yang dibuat	1 media pembelajaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Melatih dengan tatap muka pada level teknisi dan / atau calon instruktur	Jumlah JP melatih	6 JP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Melakukan pendampingan pada perusahaan menengah	Jumlah pendampingan perusahaan menengah	1 laporan	-	1	1	1	2	2	-	3	-	-	3	-
10	Melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah	Jumlah bimbingan konsultasi perusahaan menengah	1 laporan	-	1	1	1	2	2	-	3	-	-	3	-
11	Melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada level teknisi	Jumlah evaluasi hasil pembelajaran	1 kali	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
B	KINERJA TAMBAHAN			-											
1	Melaksaakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	46 Orang	10	18	8	4	9	6	9	5	3	9	7	4

2	Melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun	18 Lembaga	10	18	8	4	9	6	9	5	3	9	7	4

Nama : RUSMILA, S.S, M.Pd
Jabatan : ANALISIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4												
	KINERJA UTAMA														
1	Memperlajari, Menganalisis serta manelaah bahan-bahan sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah hasil Analisa dan telaah sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	80 Dokumen	12	7	16	20	17	11	14	12	13	8	17	16
2	Membuat Laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telahaan dapat bermanfaat	Adanya laporan berdasarkan hasil kerja kepada pimpinan	12 Laporan/ Dokumen	4	0	5	2	2	4	3	3	3	3	3	3
3	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan berdasarkan terlaksananya tugas lain	100 Laporan/Kegiatan	23	15	10	7	18	13	12	12	11	9	12	9
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Melaksanakan Perlindungan PMI di Daerah Kab/Kota	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
2	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana	Jumlah Perusahaan yang menyususn Dokumen RTK Mikro	8 Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Melaksanakan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan KesempatanKerja	100 orang	37	96	53	25	73	78	65	12	12	0	0	0

Nama : SHALEH
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4												
1	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar kegiatan pada administrasi umum	25 Kegiatan	4	9	10	10	5	5	13	10	5	9	8	10

2	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketetntuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah dokumen pada administrasi umum	20 Dokumen	5	9	10	10	5	5	13	10	5	9	8	10
3	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah kegiatan pada pencatatan dan penerimaan administrasi umum	125 Kegiatan	6	10	8	10	10	15	9	10	9	10	9	5
4	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen pada pengelompokkan administrasi umum	75 Dokumen	5	0	5	0	2	0	5	0	0	5	5	5
5	Melaporakan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30 Laporan	6	5	7	5	5	5	5	5	5	5	4	5
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	350 Kegiatan	19	19	20	19	18	20	16	15	16	20	17	15

Nama : SITI PARLINAH
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4												
1	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar kegiatan pada administrasi umum	25 Kegiatan	4	5	4	8	10	12	16	10	11	13	18	16
2	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketetntuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah dokumen pada administrasi umum	20 Dokumen	0	0	0	0	0	4	4	1	0	0	1	0
3	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah kegiatan pada pencatatan dan penerimaan administrasi umum	125 Kegiatan	12	19	23	20	19	15	12	14	18	9	14	11
4	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen pada pengelompokkan administrasi umum	75 Dokumen	20	15	8	16	8	4	2	14	10	14	8	7
5	Melaporakan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30 Laporan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	350 Kegiatan	12	9	16	7	13	19	20	11	12	15	10	16

Nama : NASRULLAH, SHI
Jabatan : ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4												
1	Memberikan Saran Berdasarkan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pemanfaatannya utuk di sampaikan Kepada Pimpinan Unit	Jumlah Dokomen yang di kumpulkan	24 Dokomen	2	2	3	1	2	3	2	2	1	4	3	2
2	Membuat Laporan Statistik dan Bulanan Berdasarkan Hasil Kerja untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit	Jumlah Kegiatan yang di kumpulkan	35 Kegiatan	18	4	3	3	2	1	1	2	1	2	1	1
3	Pelaporan Informasi Pasar Kerja (IPK)	Jumlah Dokomen yang di kumpulkan	45 Dokomen	1	2	3	9	3	5	5	4	3	3	5	3
4	Mengumpulkan Bahan - Bahan Kerja sesuai dengan Prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Kegiatan yang di kumpulkan	24 Kegiatan	6	7	10	2		12	7	7	8	6	5	18
5	Menandatangani Kartu Ak.1 bagi Pencari Kerja pada waktu tertentu dapat bertindak sebagai Petugas Antar Kerja	Jumlah Dokomen yang di kumpulkan	450 Dokomen	40	29	37	44	65	31	38	44	48	29	56	34
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	60 Dokomen	3	6	6	5	6	7	5	1	6	8	4	4

Nama : DENNY SUPRIYADI, A.Md
Jabatan : PENGELOLA BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan					
				Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4						
1	Mengelola bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan sub kegiatan	Jumlah bahan yang dikeola	6 Kali	17	6	7	17	17	22
2	Mengumpulkan dan mengelola bahan laporan statistik bulanan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan yang dikumpulkan	6 Kali	6	122	20	14	11	11
3	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan	Jumlah terlaksananya tugas lain	6 Kali	6	22	20	14	11	11

Nama : M. AULIA RAHMAN, A.Md
Jabatan : PENGELOLA BAHAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan			
				September	Triwulan 4		
1	2	3	4				
1	Mengelola bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan sub kegiatan	Jumlah bahan yang dikelola	3 Kali	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
2	Mengumpulkan dan mengelola bahan laporan statistik bulanan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan yang dikumpulkan	3 Kali	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
3	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan	Jumlah terlaksananya tugas lain	3 Kali	-	43 Kali	43 Kali	43 Kali

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TAHUN 2023

Nama : WIYANTI MELANSARI, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	32%	0	0	0	0	0	10%	0	0	0	15%	0	0

Nama : AKHMAD NASHAR, S.H
Jabatan : MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Membantu mengidentifikasi dan mendata PHK	Data Pemutusan Hubungan Kerja	7 Data	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0
2	Membantu mendata Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Laporan Pendaftaran / Perubahan Serikat Pekerja / Buruh	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Membantu melayani konseling / sosialisasi HI untuk masyarakat	Laporan Konseling / Sosialisasi Hubungan Industrial	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Membantu dokumentasi Mediasi dan Perjanjian Bersama	Dokumen Mediasi dan Perjanjian Bersama	3 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
5	Melaksanakan tugas lain sesuai kewenangan atas perintah atasan	Laporan Tugas	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nama : RANI YASODHARA, SKM
Jabatan : PENGANTAR KERJA AHLI MUDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
A	KINERJA UTAMA														
1	Melakukan Pembimbingan Penyusunan Materi dan Membantu Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan	4 Dokumen	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0
2	Melakukan Pembimbingan Penyusuna Materi dan Membantu Pencatatan Perjanjian Kerja	Dokumen Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	100 Dokumen	0	377	248	300	86	129	134	187	232	165	261	105
3	Melakukan Pembimbingan dan Penyusunan Materi dan Membantu Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama	Dokumen Perjanjian Kerja Bersama	3 Laporan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Menyusun Rencana Pembinaan, Bimbingan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	Jadwal Monitoring ke Perusahaan	3 Berkas	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
5	Melaksanakan Penilaian Hubungan Industrial	Monitoring ke Perusahaan	12 Kali	0	0	1	0	0	0	9	12	0	0	11	0
B	KINERJA TAMBAHAN														
1	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yangTerkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	4 Perusahaan	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0

Nama : FADLY FAUZAN, SH
Jabatan : MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
A	KINERJA UTAMA														
1	Membantu Pencatatan Lembaga Ketenagakerjaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Dokumen Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	6 Dokumen	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Membantu Pencatatan Lembaga Ketenagakerjaan Lembaga Kerjasama Bipartit	Dokumen Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	6 Dokumen	-	1	-	2	1	-	1	-	4	2	1	-
3	Membantu Membuat Lembaga Ketenagakerjaan Lembaga Kerjasama Tripartit	Surat Keputusan Bupati	1 SK	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Membantu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perkara	3 Perkara	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-
5	Membantu Membuat Data PHK	Jumlah Laporan Pemutusan Hubungan Kerja	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Membantu Membuat Data Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan Lembaga Ketenagakerjaan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Membantu Membuat Data Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Laporan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Membantu melakukan Layanan Konseling Teknis Bidang Hubungan Industrial	Jumlah Konseling	12 Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Menyelenggaraan Hubungan Industrial yang Baik	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TANAH LAUT

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

Nama : NURMAYA SAVITRI, ST, MS
Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	100%	-	23.5	-	-	47	70.5	-	-	76.5	100	-	-
2	Menguatnya struktur industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukkan industri	65%	-	67.7	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-

Nama : ANDHIKA PUTRI PARAMITA, ST, MT.
Jabatan : PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Merumuskan konsep program penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah konsep program penyuluhan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Melaksanakan penyuluhan indag melalui pendataan/ sosialisasi/ temu wicara serta melayani jasa konsultasi industri bagi pengusaha atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	2 laporan
3	Melaksanakan kegiatan pelatihan pembangunan sumber daya industri bagi wirausaha baru/ pengusaha dan atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	4 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	-	-
4	Melaksanakan bimbingan penerapan manajemen mutu usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil fasilitasi manajemen mutu bagi IKM	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	5 laporan
5	Mengembangkan usaha indag melalui peran aktif partisipasi dalam event – event pameran indag	Jumlah laporan hasil fasilitasi keikutsertaan IKM dalam event pameran	2 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan	1 dokumen	proses	proses	proses	proses	proses	proses	proses	proses	proses	proses	proses	1 dokumen
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-

Nama : YASID ARAFAT, SKM
Jabatan : PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Merumuskan konsep program penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah konsep program penyuluhan	3 dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Melaksanakan penyuluhan indag melalui pendataan/ sosialisasi/ temu wicara serta melayani jasa konsultasi industri bagi pengusaha atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	4 laporan	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
3	Melaksanakan kegiatan pelatihan pembangunan sumber daya industri bagi wirausaha baru/ pengusaha dan atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	4 kegiatan	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
4	Melaksanakan bimbingan penerapan manajemen mutu usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil fasilitasi manajemen mutu bagi IKM	4 laporan	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
5	Mengembangkan usaha indag melalui peran aktif partisipasi dalam event – event pameran indag	Jumlah laporan hasil fasilitasi keikutsertaan IKM dalam event pameran	2 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
6	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha industri kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan	3 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Jumlah Dokumen Pengawasan Perizinan/Hasil Fasilitasi/Verifikasi Teknis Perizinan Sektor Industri.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Memfasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri lingkup kabupaten	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri/ Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota.	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Nama : HERMAN
Jabatan : PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Membantu berkoordinasi, memfasilitasi kegiatan untuk Promosi Sumberdaya Industri Kecil/Menengah	Jumlah Laporan	45 Kegiatan	4	6	4	5	6	8	5	3	4	0	1	1
2	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Industri	Jumlah Dokumen	24 Dokumen	0	1	2	0	1	0	0	7	2	1	4	2
3	Membantu menyiapkan bahan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bantuan pinjaman kredit Gapura Karomah	Jumlah Laporan	50 Kegiatan	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	2
4	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis msupun lisan	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	80 Kegiatan	0	0	0	0	11	0	6	6	6	11	3	2
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TANAH LAUT

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN UPT BALAI LATIHAN KERJA TAHUN 2023

Nama : AKHMAD NOPRIADI, A.P. M. Si
JABATAN : KEPALA UPT BLK

NO	KINERJA UTAMA		TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2		4	5											
1	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192 Orang	0	0	0	0	0	32	64	80	80	176	192	192
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur danPeningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	11 Lembaga	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	11

Nama : MUHDI, A.Md
JABATAN : KASUBBAG TU UPT BLK

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional	0	0	**2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional**	0	0	**2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional**	0	0	**2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional**	0	0	**2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional**
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan

Nama : SITI NORBAYAH
JABATAN : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah kegiatan yang dikerjakan	1000 Dokumen	52	15	226	163	77	119	274	253	38	52	33	98

2	Memberi lembar pengantar pada administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah kegiatan yang dikerjakan	300 Dokumen	7	10	10	6	2	5	5	7	1	0	0	0
3	Mengelompokkan administrasi keuangan atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah dokumen yang diarsipkan	500 Dokumen		31	9	6	7	5	54	6	6	6	47	31
4	Mendokumentasikan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib	Jumlah dokumen yang dibukukan	500 Dokumen		5	10	6	4	5	46	9	1	0	30	0
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan keuangan	30 Laporan	2	2	5	2	2	3	2	2	1	1	2	4
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang dikerjakan	1000 Kegiatan	19	124	48	22	155	56	108	72	80	128	119	66

Nama : MULYONO
JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah Kegiatan yang dikerjakan	100 Dokumen	9	7	3	10	17	4	10	7	8	29	31	-
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah Kegiatan yang dikerjakan	100 Dokumen	5	5	5	3	5	2	4	5	5	3	8	-
3	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah Dokumen yang diarsipkan	100 Dokumen	5	3	5	12	5	4	4	5	4	17	0	-
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah Dokumen yang dibukukan	100 Dokumen	4	4	4	3	6	3	4	5	5	0	18	-

5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Administrasi	30 Laporan	5	4	5	1	5	3	4	3	5	0	0	-
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan yang dikerjakan	200 Kegiatan	12	7	13	21	13	34	24	25	23	48	16	-

Nama : BUDIMAN SAPUTRA, ST
JABATAN : INSTRUKTUR MUDA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	menyusun program pelatihan tingkat dasar	Jumlah Naskah Program	2 Naskah	1	0	0	0	2		2	0	0	0	0	0
3	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas dalam satu paket untuk tingkat dasar	Jumlah Daftar Fasilitas	2 Daftar Fasilitas	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2		0
4	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	Jumlah Daftar Bahan	2 Daftar Bahan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Memelihara peralatan pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan alat	12 Laporan	2	4	4	8	2	3	2	1	2	1	1	1
6	Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam	Jumlah Dokumen GBPP	2 GBPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan	Jumlah Set Job Sheet yang dibuat	10 Set Job Sheet	0	0	0	0	0	1		4		2	0	0
8	Melatih pada pelatihan tingkat dasar	Jumlah JP melatih	360 JP	0	0	0	0	0	128	16	0	80	72	152	0
9	Mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	6 Laporan	0	0	0	0	0	0	1	0	1		1	0
10	Membuat media atau alat peraga pelatihan berupa	Jumlah Media Pembelajaran/Alat peraga	2 Paket	1	1	14	18		3		0	0	1	0	0
11	Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Session Plan bahasan mata pelatihan	6 Lession Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yg diperintahkan pimpinan baik tertulis/ lisan	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	24 Kegiatan	0	8	2	3	4	0	0	2	0	0	0	0
13	Melakukan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Instruktur sesuai kewenangannya	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	12 Kegiatan	5	4	7	8	26	1	8	21	19	10	1	1

Nama : DITA AMARA, S.Kom
JABATAN : INSTRUKTUR PERTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi pada Level	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang disusun	1 Rencana Pelaksanaan Pelatihan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Menyusun Media Pembelajaran pada Level Operator	Jumlah Media pembelajaran yang disusun	2 Media Pembelajaran	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	Jumlah Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan yang disusun	1 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	Melatih dengan Tatap Muka pada Level Operator	Jumlah JP	159 JP	0	8	32	0	0	40	0	0	0	0	0	0
5	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan Pelatihan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Melakukan Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Instruktur	Jumlah Laporan Kegiatan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nama : HASYIM ASY'ARI YUSUF
JABATAN : INSTRUKTUR MUDA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Mengembangkan Program Pelatihan	Jumlah program pelatihan yang disusun	2 Program Pelatihan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang disusun	2 Rencana Pelaksanaan Pelatihan	4	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	Jumlah Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan yang disusun	2 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	Menyusun Modul Pelatihan	Jumlah modul yang disusun	6 modul	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
5	Menyusun perangkat evalusai untuk program pelatihan level operator	Jumlah naskah perangkat penilaian yang dibuat	12 naskah perangkat evaluasi	0	6	3	0		2	1	0	0	0	0	0
6	Membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya:	Jumlah jobsheet set	5 jobsheet set	0	0	0	3	5	2	0	0	0	0	0	0
7	Melatih dengan Tatap Muka	Jumlah JP	424 JP		48	204	32	24	128	84	0	16	56	32	0
8	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah laporan alat yang dipelihara	160 laporan	16	16	0	16	16	0	16	16	16	8	16	16

9	Memperbaiki Peralatan Pelatihan	Jumlah laporan alat yang diperbaiki	20 laporan	0	0	0	8	0	0	1	2	0	0	16	0
10	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Jumlah laporan kegiatan	2 laporan	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Instruktur	Jumlah laporan kegiatan	2 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Nama : MUHAMMAD QASTOLLANI, ST
JABATAN : INSTRUKTUR MUDA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah naskah program	4 Naskah Program	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
2	Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket	Jumlah Dokumen GBPP	4 GBPP	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0
3	Menyusun modul pelatihan pada level operator	Jumlah set modul	3 modul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	Menyusun media pembelajaran pada level operator	Jumlah media pembelajaran / alat peraga	4 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
5	Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Session Plan bahasan mata pelatihan	12 Session Plan	0	0	0	2	0	0	0	0	5	5	0	0
6	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan	Jumlah daftar fasilitas dan pralatan	4 Daftar Fasilitas	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0
7	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat operator	Jumlah Daftar Bahan	4 Daftar Bahan	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0
8	Membuat jobsheet Mata pelatihan sesuai dengan kewenangan nya	Jumlah lember kerja praktek yang disusun	24 Set jobsheet	0	6	0	0	0	6	0	4	3	5	0	0
9	Melatih dengan tatap muka pada level operator	Jumlah JP	700 JP	0	0	0	0	24	112	136	126	88	104	152	128
10	Mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	12 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		6
11	Memelihara peralatan pelatihan	Jumlah pralatan yang di rawat	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	2
12	Memperbaiki peralatan pelatihan	Jumlah pralatan yangdiperbaiki	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2
13	Menyusun daftar usulan penetapan angka kredit	Jumlah Dokumen yangdisusun	2 Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Jumlah laporan kegiatan	2 laporan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Melakukan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Instruktur sesuai kewenangannya	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	12 Kegiatan	0	0	0	8	0	0	55	0	0	0	0	0

Nama : NORSEHAT, S.Kom
JABATAN : INSTRUKTUR PERTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi pada Level Operator	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang disusun	1 Rencana Pelaksanaan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0
2	Menyusun Media Pembelajaran pada Level Operator	Jumlah Media pembelajaran yang disusun	2 Media Pembelajaran	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	Jumlah Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan yang disusun	1 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Melatih dengan Tatap Muka pada Level Operator	Jumlah JP	159 JP	0	0	40	0	0	0	40	0	24	60	20	0
5	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan Pelatihan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Melakukan Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Instruktur	Jumlah Laporan Kegiatan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nama : FITRIANSYAH
JABATAN : INSTRUKTUR PENYELIA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam 1 paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang di susun	2 Daftar bahan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam 1 paket	Jumlah daftar bahan yang di susun	2 Daftar bahan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangan nya	Jumlah job sheet yang di buat	2 set job sheet	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Melatih pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta pencari kerja SLTA / Pekerja pada level produksi	Jumlah jam pelajaran	480 jp	0	48	144	45	24	112	104	160	0	0	0	0
5	Merawat peralatan pelatihan	Jumlah alat yang di rawat	400 unit alat	105	98	110	65	126	85	100	110	100	110	110	95

6	Memperbaiki kerusakan ringan peralatan pelatihan	Jumlah unit alat yang di perbaiki	45 unit alat	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	10	5
7	Mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangan nya	Jumlah laporan evaluasi peserta pelatihan	6 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Menyusun program pelatihan tingkat dasar para pencari kerja	Jumlah program pelatihan	2 program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nama : GUNAWAN, A.Md
JABATAN : INSTRUKTUR MAHIR

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Satuan Pokok Bahasan Pelatihan Dalam Satu Paket sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Session Plan yang disusun	8 Session Plan	2	2	3	1	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang disusun	1 Daftar Fasilitas Pelatihan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar bahan pelatihan yang disusun	1 Daftar Bahan Pelatihan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Membuat Job Sheet Mata Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Job Sheet yang dibuat	17 Job Sheet	1	3	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0
5	Melatih Pada Pelatihan Tingkat Menengah Dengan Peserta Pencari Kerja SLTA Ke Bawah atau Pekerja Pada Level Pelaksana/Produksi	Jumlah Jam Pelatihan	240 Jam Pelatihan	0	0	0	0	0	128	72	0	0	0	40	0
6	Merawat Peralatan Pelatihan	Jumlah Unit Alat yang dirawat	160 Unit Alat	8	8	8	8	8	6	16	16	20	20	20	20
7	Memperbaiki Kerusakan ringan Peralatan pelatihan	Jumlah Unit alat yang diperbaiki	48 Unit Alat	6	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	6
8	Mengevaluasi Kemajuan Peserta Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah laporan Evaluasi peserta pelatihan	17 Laporan	0	0	0	0	0	6	11	0	0	0	0	0
9	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar Bagi Pencari Kerja	Jumlah Program pelatihan yang disusun	1 Program pelatihan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nama : PAUJI RAHMAN, Amd
JABATAN : INSTRUKTUR MAHIR

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Satuan Pokok Bahasan Pelatihan Dalam Satu Paket sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Session Plan yang disusun	18 Session Plan	0	0	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0
2	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang disusun	2 Daftar Fasilitas Pelatihan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar bahan pelatihan yang disusun	2 Daftar Bahan Pelatihan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Membuat Job Sheet Mata Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Job Sheet yang dibuat	24 Job Sheet	0	0	0	0	7	2	10	0	0	0	0	0
5	Membuat Media Atau Alat Peraga Pelatihan	Jumlah media atau alat peraga yang dibuat	2 Unit media atau alat peraga	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Melatih Pada Pelatihan Tingkat Menengah Dengan Peserta Pencari Kerja SLTA Ke Bawah atau Pekerja Pada Level Pelaksana/Produksi	Jumlah Jam Pelatihan	580 Jam Pelatihan	0	34	38	28	24	146	160	0	0	0	0	0
7	Merawat Peralatan Pelatihan	Jumlah Unit Alat yang dirawat	480 Unit Alat	32	40	32	32	0	0	64	0	0	0	0	0
8	Memperbaiki Kerusakan ringan Peralatan pelatihan	Jumlah Unit alat yang diperbaiki	36 Unit Alat	3	2	2	0	0	2	8	0	0	0	0	0
9	Mengevaluasi Kemajuan Peserta Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah laporan Evaluasi peserta pelatihan	18 Laporan	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0
10	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar Bagi Pencari Kerja	Jumlah Program pelatihan yang disusun	2 Program pelatihan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Nama : ZAINAL RAKHMAN, Amd
JABATAN : INSTRUKTUR MAHIR

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang disusun	2 Daftar Fasilitas Pelatihan	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar bahan pelatihan yang disusun	2 Daftar Bahan Pelatihan	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
3	Membuat Job Sheet Mata Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Job Sheet yang dibuat	4 Job Sheet	0	0	0	0		0	4	0	0	0	0	0

4	Melatih Pada Pelatihan Tingkat Menengah Dengan Peserta Pencari Kerja SLTA Ke Bawah atau Pekerja Pada Level Pelaksana/Produksi	Jumlah Jam Pelatihan	360 Jam Pelatihan	0	0	0	0	36	128	32	0	88	80	152	0
5	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar Bagi Pencari Kerja	Jumlah Program pelatihan yang disusun	2 Program pelatihan	0	0	0		0	0	2	0	0	0	0	0
6	Merawat Peralatan Pelatihan	Jumlah Unit Alat yang dirawat	170 Unit Alat	22	27	40	20	15	0	10	15	9	16	0	23

Nama : SUGIANTORO, S.Kom
JABATAN : INSTRUKTUR PERTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit	Jumlah Dokumen yang Disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar	Jumlah Naskah Program	1 Naskah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dalam Satu Paket untuk Tingkat Dasar	Jumlah Daftar Fasilitas	1 Daftar Fasilitas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan dalam Satu Paket untuk Tingkat Dasar	Jumlah Daftar Bahan	1 Daftar Bahan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Alat	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi untuk Tingkat Dasar	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang Disusun	1 Rencana Pelaksanaan Pelatihan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Melatih dengan Tatap Muka pada Tingkat Dasar	Jumlah JP Melatih	159 JP	0	0	40	0	0	24	16	0	24	56	0	0
8	Menyusun Media Pembelajaran untuk Tingkat Dasar	Jumlah Media Pembelajaran/Alat Peraga	2 Media Pembelajaran	0	0	0	0	2	4	0	0	2	2	0	0
9	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diperintahkan Pimpinan Baik Tertulis/Lisan	Jumlah Kegiatan yang Dijalankan	24 Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Melakukan Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Instruktur Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kegiatan yang Dijalankan	12 Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nama : BUDI SUSILAWATI, SP
JABATAN : INSTRUKTUR MUDA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4	5											
1	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah program pelatihan dalam satu tahun	3 GBPP	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0
2	Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan pada setiap unit	Jumlah rencana pelatihan dalam satu tahun	3 Session Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan	Jumlah daftar fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam satu tahun	3 Daftar Fasilitas	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
4	Menyusun modul pelatihan pada level operator	Jumlah modul pelatihan dalam satu tahun	3 Modul	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Melatih dengan tatap muka pada level operator	Jumlah jam pelajaran pelatihan dalam satu tahun	460 Jam Pelajaran		48	128	48	24	88	44	7	6	49	72	0
6	Memelihara peralatan pelatihan	Jumlah alat yang dipelihara dalam satu tahun	30 Laporan	9	5	2	4	9	3	3	4	7	2	4	0
7	Memperbaiki peralatan pelatihan	Jumlah peralatan yang diperbaiki dalam satu tahun	12 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	Membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan	Jumlah job sheet pelatihan dalam satu tahun	3 Job Sheet	0	0	0	0	0	0	1		1	0	0	0
9	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas instruktur	Jumlah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas yang akan dilakukan	5 Laporan	4	3	3	4	6	3	0	11	7	6	7	0
10	Menyusun media pembelajaran pada level operator	Jumlah media pembelajaran yang akan dibuat selama satu tahun	3 Unit	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0
11	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah kegiatan kedinasan yang diperintahkan atasan selama satu tahun	12 Kegiatan	4	2	0	1	1	0	0	0	2	4	1	0
12	Mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	Jumlah evaluasi kegiatan kemajuan siswa selama satu tahun	3 Laporan	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TANAH LAUT

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA SKPD BULANAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4												
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	71.90%	69.61%
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan Kerja	6,5 %	0	0	0	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	96.42%
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	42.5%	0	0	0	0	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Indutri Terhadap PDRB	16,35 %	0	0	0	0	0	0	0	12.60%	12.60%	12.60%	12.60%	12.60%
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Masih proses	Masih proses	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33	90.33

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA BULANAN SEKRETARIAT TAHUN 2023

Nama : MARIA ULFAH, S.Psi
Jabatan : SEKRETARIS

NO	Kinerja Utama		Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2		4	5											
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Nilai Sakip Disnakerind	Istimewa	Masih proses	Masih proses	Masih proses	Masih proses	Masih proses	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)	81,55 / A (Memuaskan)
		Nilai Reformasi Birokrasi	Sangat Istimewa	Masih proses	Masih proses	Masih proses	Masih proses	Masih proses	Masih proses	94,13 (Istimewa)	94,13 (Istimewa)	94,13 (Istimewa)	94,13 (Istimewa)	94,13 (Istimewa)	94,13 (Istimewa)

Nama : YULIANI ASTUTI, SE
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Secara Berkala di Susun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
2	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan

Nama : SULASTRI LATIF, S. STP
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	9 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional	7 Buah Kendaraan Dinas Operasional, 4 Buah Mobil Dinas Operasional
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	39 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	38 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	39 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	39 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	40 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	40 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	40 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA	40 Orang PNS, 24 Orang PTT, dan 7 Orang TA
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan

Nama : SITI HAFSAH, A.Md
Jabatan : BENDAHARA

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah bahan pertanggung jawaban bendahara	2 bahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2	Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) sesuai prosedur yang berlaku	Jumlah surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan	50 Berkas	2	2	7	6	5	6	5	4	4	4	6	7
3	Mengurus surat perintah membayar uang berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diurus sesuai prosedur yang berlaku	50 Berkas	2	2	7	6	5	6	5	4	4	4	6	7
4	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah tagihan yang telah dibayar sesuai ketentuan	1000 kwitansi	6	105	121	64	100	116	126	150	125	125	190	166
5	Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang telah dibukukan	57 dokumen	3	3	3	6	3	3	6	6	3	6	3	12
6	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan Keuangan yang dibuat sesuai ketentuan	19 Laporan	0	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	4
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	30 Laporan	3	2	1	1	2	1	1	5	3	3	3	5

Nama : RUSDALIFAH, SE
Jabatan : ANALIS TATA LAKSANA

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Melaksanakan tugas berdasarkan permasalahan tata laksana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen	1000 Dokumen	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90
2	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan	350 Kegiatan	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30
3	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan manfaatnya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah dokumen	5 Dokumen			1			1			2			1
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan	35 Laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
5	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan tata laksana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen	56 Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4

6	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Dokumen	65 Dokumen	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5
7	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Dokumen	65 Dokumen	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	5	5

Nama : RUSDALIFAH, SE
Jabatan : ANALIS TATA LAKSANA

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun dokumen dan bukti-bukti kegiatan secara tertib dan teratus	Jumlah dokumen yang diarsipkan	1000 Dokumen	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84
2	Menyimpan dokumen usulan pembayaran SPP, SPM dan dokumen peraturan keuangan lainnya	Jumlah dokumen yang diarsipkan	50 Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
3	Menerima dan mencatat nomor, tanggal dan pokok surat yang diterima oleh subbag keuangan ke dalam buku agenda dalam rangka tertib administrasi	Jumlah surat yang diagendakan	40 Dokumen	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
4	Mencatat dan mengarsip naskah dinas yang diselesaikan dan diproses lingkup subbag keuangan secara tertib dan teratur	Jumlah data yang dikerjakan	16 Laporan	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
5	Menginventarisasi pengeluaran keuangan, membuat kartu kontrol sesuai prosedur yang ditentukan dalam rangka tertib administrasi keuangan	Jumlah Dokumen	360 Dokumen	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun tidak tertulis	Jumlahkegiatan yang dilaksanakan	800 Kegiatan	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA BULANAN BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA TAHUN 2023

Nama : ELIZA MEILANI, S. Psi, M. Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4												
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase peserta latih yang kompeten	75%	0.00%	0.00%	6.27%	10.59%	0.00%	0.00%	9.41%	8.24%	0.00%	9.41%	0.00%	3.92%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	6,50 %	0.00%	7.53%	0.00%	20.33%	0.00%	0.00%	8.65%	3.81%	0.00%	30.36%	8.65%	17.04%

Nama : RIZQI MUTAHARA, SE
Jabatan : PENGANTAR KERJA PERTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4												
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Melakukan layanan analisis jabatan dasar	Jumlah laporan analisis jabatan	12 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
2	Menyusun statistik informasi pasar kerja	Jumlah laporan statistik	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja	Jumlah laporan pelayanan	120 Laporan	18	3	10	9	13	6	12	13	10	7	12	8
4	Mengidentifikasi ketersediaan informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja	Jumlah dokumen informasi loker	120 Dokumen	18	3	10	9	13	6	12	13	10	7	12	8
5	Melakukan layanan pendaftaran pencari kerja	Jumlah dokumen layanan	500 Dokumen	16	29	17	55	123	230	92	143	75	73	79	42
6	Menganalisis kelayakan dokumen pengajuan paspor calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah laporan analisis	3 Laporan	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0
7	Menyusun data penempatan tenaga kerja	Jumlah laporan penyusunan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Melakukan kompilasi data yang akan diserahkan kepada stakeholder/pemangku kepentingan untuk tindak lanjut hasil pemantauan penggunaan TKA	Jumlah laporan pengumpulan atau pengolahan data	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Melakukan penyuluhan jabatan kepada siswa, mahasiswa, atau pencari kerja yang baru masuk ke pasar kerja	Jumlah laporan penyuluhan	1 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diselesaikan	120 Kegiatan	10	28	16	14	11	18	9	0	12	13	8	20
B	**KINERJA TAMBAHAN**														

1	Melaksanakan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	0	35	0	53	0	0	34	19	0	82	34	24
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
2	Melaksanakan Penerbitan LPTKS dalam 1 daerah	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2 Lembaga 2 Kali	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0

Nama : ERNA FITRIANI, S.Sos
Jabatan : INSTRUKTUR AHLI MUDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4												
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Melakukan indentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas organisasi	Jumlah kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas yang diidentifikasi	1 laporan	5	4	2	1	2	1	3	2	7	3	8	9
2	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah program pelatihan yang disusun	1 program pelatihan	1	-	2	4	-	3	-	-	1	1	-	-
3	Menyusun program peningkatan produktivitas bagi masyarakat / lembaga swadaya masyarakat	Jumlah program peningkatan produktivitas yang disusun	1 program peningkatan produktivitas	-	3	6	4	20	1	2	1	-	1	6	4
4	Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi (lesson plan) pada level teknisi	Jumlah rencana pelaksanaan unit kompetensi yang disusun	1 rencana pelaksanaan pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator	Jumlah rencana pelaksanaan pelatihan yang disusun	1 rencana pelaksanaan pelatihan	1	-	-	4	-	3	-	-	1	1	-	-
6	Menyusun modul pelatihan pada level operator	Jumlah modul yang disusun	1 modul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Menyusun media pembelajaran pada level teknisi	Jumlah media pembelajaran yang dibuat	1 media pembelajaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Melatih dengan tatap muka pada level teknisi dan / atau calon instruktur	Jumlah JP melatih	6 JP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Melakukan pendampingan pada perusahaan menengah	Jumlah pendampingan perusahaan menengah	1 laporan	-	1	1	1	2	2	-	3	-	-	3	-
10	Melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah	Jumlah bimbingan konsultasi perusahaan menengah	1 laporan	-	1	1	1	2	2	-	3	-	-	3	-
11	Melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada level teknisi	Jumlah evaluasi hasil pembelajaran	1 kali	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
B	**KINERJA TAMBAHAN**			-											
1	Melaksaakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	46 Orang	10	18	8	4	9	6	9	5	3	9	7	4

2	Melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun	18 Lembaga	10	18	8	4	9	6	9	5	3	9	7	4

Nama : RUSMILA, S.S, M.Pd
Jabatan : ANALISIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4												
	KINERJA UTAMA														
1	Memperlajari, Menganalisis serta manelaah bahan-bahan sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah hasil Analisa dan telaah sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	80 Dokumen	12	7	16	20	17	11	14	12	13	8	17	16
2	Membuat Laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telahaan dapat bermanfaat	Adanya laporan berdasarkan hasil kerja kepada pimpinan	12 Laporan/ Dokumen	4	0	5	2	2	4	3	3	3	3	3	3
3	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan berdasarkan terlaksananya tugas lain	100 Laporan/Kegiatan	23	15	10	7	18	13	12	12	11	9	12	9
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Melaksanakan Perlindungan PMI di Daerah Kab/Kota	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
2	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana	Jumlah Perusahaan yang menyususn Dokumen RTK Mikro	8 Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Melaksanakan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan KesempatanKerja	100 orang	37	96	53	25	73	78	65	12	12	0	0	0

Nama : SHALEH
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4												
1	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar kegiatan pada administrasi umum	25 Kegiatan	4	9	10	10	5	5	13	10	5	9	8	10

2	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketetntuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah dokumen pada administrasi umum	20 Dokumen	5	9	10	10	5	5	13	10	5	9	8	10
3	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah kegiatan pada pencatatan dan penerimaan administrasi umum	125 Kegiatan	6	10	8	10	10	15	9	10	9	10	9	5
4	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen pada pengelompokkan administrasi umum	75 Dokumen	5	0	5	0	2	0	5	0	0	5	5	5
5	Melaporakan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30 Laporan	6	5	7	5	5	5	5	5	5	5	4	5
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	350 Kegiatan	19	19	20	19	18	20	16	15	16	20	17	15

Nama : SITI PARLINAH
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4												
1	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar kegiatan pada administrasi umum	25 Kegiatan	4	5	4	8	10	12	16	10	11	13	18	16
2	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketetntuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah dokumen pada administrasi umum	20 Dokumen	0	0	0	0	0	4	4	1	0	0	1	0
3	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah kegiatan pada pencatatan dan penerimaan administrasi umum	125 Kegiatan	12	19	23	20	19	15	12	14	18	9	14	11
4	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen pada pengelompokkan administrasi umum	75 Dokumen	20	15	8	16	8	4	2	14	10	14	8	7
5	Melaporakan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30 Laporan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	350 Kegiatan	12	9	16	7	13	19	20	11	12	15	10	16

Nama : NASRULLAH, SHI
Jabatan : ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4												
1	Memberikan Saran Berdasarkan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pemanfaatannya utuk di sampaikan Kepada Pimpinan Unit	Jumlah Dokomen yang di kumpulkan	24 Dokomen	2	2	3	1	2	3	2	2	1	4	3	2
2	Membuat Laporan Statistik dan Bulanan Berdasarkan Hasil Kerja untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit	Jumlah Kegiatan yang di kumpulkan	35 Kegiatan	18	4	3	3	2	1	1	2	1	2	1	1
3	Pelaporan Informasi Pasar Kerja (IPK)	Jumlah Dokomen yang di kumpulkan	45 Dokomen	1	2	3	9	3	5	5	4	3	3	5	3
4	Mengumpulkan Bahan - Bahan Kerja sesuai dengan Prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Kegiatan yang di kumpulkan	24 Kegiatan	6	7	10	2		12	7	7	8	6	5	18
5	Menandatangani Kartu Ak.1 bagi Pencari Kerja pada waktu tertentu dapat bertindak sebagai Petugas Antar Kerja	Jumlah Dokomen yang di kumpulkan	450 Dokomen	40	29	37	44	65	31	38	44	48	29	56	34
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	60 Dokomen	3	6	6	5	6	7	5	1	6	8	4	4

Nama : DENNY SUPRIYADI, A.Md
Jabatan : PENGELOLA BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi					
				Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4						
1	Mengelola bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan sub kegiatan	Jumlah bahan yang dikeola	6 Kali	17	6	7	17	17	22
2	Mengumpulkan dan mengelola bahan laporan statistik bulanan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan yang dikumpulkan	6 Kali	6	122	20	14	11	11
3	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan	Jumlah terlaksananya tugas lain	6 Kali	6	22	20	14	11	11

Nama : M. AULIA RAHMAN, A.Md
Jabatan : PENGELOLA BAHAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi			
				September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4				
1	Mengelola bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan sub kegiatan	Jumlah bahan yang dikelola	3 Kali	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
2	Mengumpulkan dan mengelola bahan laporan statistik bulanan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan yang dikumpulkan	3 Kali	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
3	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan	Jumlah terlaksananya tugas lain	3 Kali	-	43 Kali	43 Kali	43 Kali

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA BULANAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TAHUN 2023

Nama : WIYANTI MELANSARI, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	32%	0	0	0	0	0	10%	0	0	0	15%	0	0

Nama : AKHMAD NASHAR, S.H
Jabatan : MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Membantu mengidentifikasi dan mendata PHK	Data Pemutusan Hubungan Kerja	7 Data	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0
2	Membantu mendata Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Laporan Pendaftaran / Perubahan Serikat Pekerja / Buruh	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Membantu melayani konseling / sosialisasi HI untuk masyarakat	Laporan Konseling / Sosialisasi Hubungan Industrial	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Membantu dokumentasi Mediasi dan Perjanjian Bersama	Dokumen Mediasi dan Perjanjian Bersama	3 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
5	Melaksanakan tugas lain sesuai kewenangan atas perintah atasan	Laporan Tugas	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nama : RANI YASODHARA, SKM
Jabatan : PENGANTAR KERJA AHLI MUDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Melakukan Pembimbingan Penyusunan Materi dan Membantu Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan	4 Dokumen	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0
2	Melakukan Pembimbingan Penyusuna Materi dan Membantu Pencatatan Perjanjian Kerja	Dokumen Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	100 Dokumen	0	377	248	300	86	129	134	187	232	165	261	105
3	Melakukan Pembimbingan dan Penyusunan Materi dan Membantu Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama	Dokumen Perjanjian Kerja Bersama	3 Laporan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Menyusun Rencana Pembinaan, Bimbingan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	Jadwal Monitoring ke Perusahaan	3 Berkas	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
5	Melaksanakan Penilaian Hubungan Industrial	Monitoring ke Perusahaan	12 Kali	0	0	1	0	0	0	9	12	0	0	11	0
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yangTerkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	4 Perusahaan	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0

Nama : FADLY FAUZAN, SH
Jabatan : MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Membantu Pencatatan Lembaga Ketenagakerjaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Dokumen Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	6 Dokumen	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Membantu Pencatatan Lembaga Ketenagakerjaan Lembaga Kerjasama Bipartit	Dokumen Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	6 Dokumen	-	1	-	2	1	-	1	-	4	2	1	-
3	Membantu Membuat Lembaga Ketenagakerjaan Lembaga Kerjasama Tripartit	Surat Keputusan Bupati	1 SK	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Membantu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perkara	3 Perkara	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-
5	Membantu Membuat Data PHK	Jumlah Laporan Pemutusan Hubungan Kerja	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Membantu Membuat Data Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan Lembaga Ketenagakerjaan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Membantu Membuat Data Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Laporan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Membantu melakukan Layanan Konseling Teknis Bidang Hubungan Industrial	Jumlah Konseling	12 Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Menyelenggaraan Hubungan Industrial yang Baik	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TANAH LAUT

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA BULANAN BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

Nama : NURMAYA SAVITRI, ST, MS
Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	100%	-	23.5	-	-	47	70.5	-	-	76.5	100	-	-
2	Menguatnya struktur industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukkan industri	65%	-	67.7	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-

Nama : ANDHIKA PUTRI PARAMITA, ST, MT.
Jabatan : PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Merumuskan konsep program penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah konsep program penyuluhan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Melaksanakan penyuluhan indag melalui pendataan/ sosialisasi/ temu wicara serta melayani jasa konsultasi industri bagi pengusaha atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	2 laporan
3	Melaksanakan kegiatan pelatihan pembangunan sumber daya industri bagi wirausaha baru/ pengusaha dan atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	4 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	-	-
4	Melaksanakan bimbingan penerapan manajemen mutu usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil fasilitasi manajemen mutu bagi IKM	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	5 laporan
5	Mengembangkan usaha indag melalui peran aktif partisipasi dalam event – event pameran indag	Jumlah laporan hasil fasilitasi keikutsertaan IKM dalam event pameran	2 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan	1 dokumen	proses	proses	proses	proses	proses	proses	proses	proses	proses	proses	proses	1 dokumen
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-

Nama : YASID ARAFAT, SKM
Jabatan : PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Merumuskan konsep program penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah konsep program penyuluhan	3 dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Melaksanakan penyuluhan indag melalui pendataan/ sosialisasi/ temu wicara serta melayani jasa konsultasi industri bagi pengusaha atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	4 laporan	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
3	Melaksanakan kegiatan pelatihan pembangunan sumber daya industri bagi wirausaha baru/ pengusaha dan atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	4 kegiatan	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
4	Melaksanakan bimbingan penerapan manajemen mutu usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil fasilitasi manajemen mutu bagi IKM	4 laporan	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
5	Mengembangkan usaha indag melalui peran aktif partisipasi dalam event – event pameran indag	Jumlah laporan hasil fasilitasi keikutsertaan IKM dalam event pameran	2 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
6	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha industri kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan	3 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Jumlah Dokumen Pengawasan Perizinan/Hasil Fasilitasi/Verifikasi Teknis Perizinan Sektor Industri.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Memfasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri lingkup kabupaten	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri/ Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota.	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Nama : HERMAN
Jabatan : PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
A	**KINERJA UTAMA**														
1	Membantu berkoordinasi, memfasilitasi kegiatan untuk Promosi Sumberdaya Industri Kecil/Menengah	Jumlah Laporan	45 Kegiatan	4	6	4	5	6	8	5	3	4	0	1	1
2	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Industri	Jumlah Dokumen	24 Dokumen	0	1	2	0	1	0	0	7	2	1	4	2
3	Membantu menyiapkan bahan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bantuan pinjaman kredit Gapura Karomah	Jumlah Laporan	50 Kegiatan	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	2
4	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis msupun lisan	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	80 Kegiatan	0	0	0	0	11	0	6	6	6	11	3	2
B	**KINERJA TAMBAHAN**														
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TANAH LAUT

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

PENGUKURAN KINERJA BULANAN UPT BALAI LATIHAN KERJA TAHUN 2023

Nama : AKHMAD NOPRIADI, A.P. M. Si
JABATAN : KEPALA UPT BLK

NO	KINERJA UTAMA		TARGET	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2		4	5											
1	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192 Orang	0	0	0	0	0	32	64	80	80	176	192	192
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur danPeningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	11 Lembaga	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	11

Nama : MUHDI, A.Md
JABATAN : KASUBBAG TU UPT BLK

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Merencanakan dan melaksanakan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi SDM SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional	0	0	**2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional**	0	0	**2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional**	0	0	**2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional**	0	0	**2 Buah Sepda Motor Dinas Operasional, 1 Buah Mobil Dinas Operasional**
		Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA	16 Orang PNS, 6 Orang PTT, dan 1 Orang TA
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan

Nama : SITI NORBAYAH
JABATAN : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah kegiatan yang dikerjakan	1000 Dokumen	52	15	226	163	77	119	274	253	38	52	33	98

2	Memberi lembar pengantar pada administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah kegiatan yang dikerjakan	300 Dokumen	7	10	10	6	2	5	5	7	1	0	0	0
3	Mengelompokkan administrasi keuangan atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah dokumen yang diarsipkan	500 Dokumen		31	9	6	7	5	54	6	6	6	47	31
4	Mendokumentasikan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib	Jumlah dokumen yang dibukukan	500 Dokumen		5	10	6	4	5	46	9	1	0	30	0
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan keuangan	30 Laporan	2	2	5	2	2	3	2	2	1	1	2	4
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang dikerjakan	1000 Kegiatan	19	124	48	22	155	56	108	72	80	128	119	66

Nama : MULYONO
JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah Kegiatan yang dikerjakan	100 Dokumen	9	7	3	10	17	4	10	7	8	29	31	-
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah Kegiatan yang dikerjakan	100 Dokumen	5	5	5	3	5	2	4	5	5	3	8	-
3	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah Dokumen yang diarsipkan	100 Dokumen	5	3	5	12	5	4	4	5	4	17	0	-
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah Dokumen yang dibukukan	100 Dokumen	4	4	4	3	6	3	4	5	5	0	18	-

5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Administrasi	30 Laporan	5	4	5	1	5	3	4	3	5	0	0	-
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan yang dikerjakan	200 Kegiatan	12	7	13	21	13	34	24	25	23	48	16	-

Nama : BUDIMAN SAPUTRA, ST
JABATAN : INSTRUKTUR MUDA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	menyusun program pelatihan tingkat dasar	Jumlah Naskah Program	2 Naskah	1	0	0	0	2		2	0	0	0	0	0
3	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas dalam satu paket untuk tingkat dasar	Jumlah Daftar Fasilitas	2 Daftar Fasilitas	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2		0
4	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar	Jumlah Daftar Bahan	2 Daftar Bahan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Memelihara peralatan pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan alat	12 Laporan	2	4	4	8	2	3	2	1	2	1	1	1
6	Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam	Jumlah Dokumen GBPP	2 GBPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan	Jumlah Set Job Sheet yang dibuat	10 Set Job Sheet	0	0	0	0	0	1		4		2	0	0
8	Melatih pada pelatihan tingkat dasar	Jumlah JP melatih	360 JP	0	0	0	0	0	128	16	0	80	72	152	0
9	Mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	6 Laporan	0	0	0	0	0	0	1	0	1		1	0
10	Membuat media atau alat peraga pelatihan berupa	Jumlah Media Pembelajaran/Alat peraga	2 Paket	1	1	14	18		3		0	0	1	0	0
11	Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Session Plan bahasan mata pelatihan	6 Lession Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yg diperintahkan pimpinan baik tertulis/ lisan	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	24 Kegiatan	0	8	2	3	4	0	0	2	0	0	0	0
13	Melakukan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Instruktur sesuai kewenangannya	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	12 Kegiatan	5	4	7	8	26	1	8	21	19	10	1	1

Nama : DITA AMARA, S.Kom
JABATAN : INSTRUKTUR PERTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi pada Level	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang disusun	1 Rencana Pelaksanaan Pelatihan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Menyusun Media Pembelajaran pada Level Operator	Jumlah Media pembelajaran yang disusun	2 Media Pembelajaran	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	Jumlah Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan yang disusun	1 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	Melatih dengan Tatap Muka pada Level Operator	Jumlah JP	159 JP	0	8	32	0	0	40	0	0	0	0	0	0
5	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan Pelatihan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Melakukan Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Instruktur	Jumlah Laporan Kegiatan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nama : HASYIM ASY'ARI YUSUF
JABATAN : INSTRUKTUR MUDA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Mengembangkan Program Pelatihan	Jumlah program pelatihan yang disusun	2 Program Pelatihan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang disusun	2 Rencana Pelaksanaan Pelatihan	4	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	Jumlah Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan yang disusun	2 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	Menyusun Modul Pelatihan	Jumlah modul yang disusun	6 modul	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
5	Menyusun perangkat evalusai untuk program pelatihan level operator	Jumlah naskah perangkat penilaian yang dibuat	12 naskah perangkat evaluasi	0	6	3	0		2	1	0	0	0	0	0
6	Membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya:	Jumlah jobsheet set	5 jobsheet set	0	0	0	3	5	2	0	0	0	0	0	0
7	Melatih dengan Tatap Muka	Jumlah JP	424 JP		48	204	32	24	128	84	0	16	56	32	0
8	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah laporan alat yang dipelihara	160 laporan	16	16	0	16	16	0	16	16	16	8	16	16

9	Memperbaiki Peralatan Pelatihan	Jumlah laporan alat yang diperbaiki	20 laporan	0	0	0	8	0	0	1	2	0	0	16	0
10	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Jumlah laporan kegiatan	2 laporan	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Instruktur	Jumlah laporan kegiatan	2 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Nama : MUHAMMAD QASTOLLANI, ST
JABATAN : INSTRUKTUR MUDA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah naskah program	4 Naskah Program	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
2	Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket	Jumlah Dokumen GBPP	4 GBPP	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0
3	Menyusun modul pelatihan pada level operator	Jumlah set modul	3 modul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	Menyusun media pembelajaran pada level operator	Jumlah media pembelajaran / alat peraga	4 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
5	Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Session Plan bahasan mata pelatihan	12 Session Plan	0	0	0	2	0	0	0	0	5	5	0	0
6	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan	Jumlah daftar fasilitas dan pralatan	4 Daftar Fasilitas	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0
7	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat operator	Jumlah Daftar Bahan	4 Daftar Bahan	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0
8	Membuat jobsheet Mata pelatihan sesuai dengan kewenangan nya	Jumlah lember kerja praktek yang disusun	24 Set jobsheet	0	6	0	0	0	6	0	4	3	5	0	0
9	Melatih dengan tatap muka pada level operator	Jumlah JP	700 JP	0	0	0	0	24	112	136	126	88	104	152	128
10	Mengevaluasi kemajuan peserta sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	12 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		6
11	Memelihara peralatan pelatihan	Jumlah pralatan yang di rawat	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	2
12	Memperbaiki peralatan pelatihan	Jumlah pralatan yangdiperbaiki	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2
13	Menyusun daftar usulan penetapan angka kredit	Jumlah Dokumen yangdisusun	2 Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Jumlah laporan kegiatan	2 laporan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Melakukan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Instruktur sesuai kewenangannya	Jumlah Kegiatan yang dijalankan	12 Kegiatan	0	0	0	8	0	0	55	0	0	0	0	0

Nama : NORSEHAT, S.Kom
JABATAN : INSTRUKTUR PERTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi pada Level Operator	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang disusun	1 Rencana Pelaksanaan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0
2	Menyusun Media Pembelajaran pada Level Operator	Jumlah Media pembelajaran yang disusun	2 Media Pembelajaran	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	Jumlah Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan yang disusun	1 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Melatih dengan Tatap Muka pada Level Operator	Jumlah JP	159 JP	0	0	40	0	0	0	40	0	24	60	20	0
5	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan Pelatihan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Melakukan Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Instruktur	Jumlah Laporan Kegiatan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nama : FITRIANSYAH
JABATAN : INSTRUKTUR PENYELIA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam 1 paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang di susun	2 Daftar bahan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam 1 paket	Jumlah daftar bahan yang di susun	2 Daftar bahan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangan nya	Jumlah job sheet yang di buat	2 set job sheet	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Melatih pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta pencari kerja SLTA / Pekerja pada level produksi	Jumlah jam pelajaran	480 jp	0	48	144	45	24	112	104	160	0	0	0	0
5	Merawat peralatan pelatihan	Jumlah alat yang di rawat	400 unit alat	105	98	110	65	126	85	100	110	100	110	110	95

6	Memperbaiki kerusakan ringan peralatan pelatihan	Jumlah unit alat yang di perbaiki	45 unit alat	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	10	5
7	Mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangan nya	Jumlah laporan evaluasi peserta pelatihan	6 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Menyusun program pelatihan tingkat dasar para pencari kerja	Jumlah program pelatihan	2 program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nama : GUNAWAN, A.Md
JABATAN : INSTRUKTUR MAHIR

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Satuan Pokok Bahasan Pelatihan Dalam Satu Paket sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Session Plan yang disusun	8 Session Plan	2	2	3	1	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang disusun	1 Daftar Fasilitas Pelatihan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar bahan pelatihan yang disusun	1 Daftar Bahan Pelatihan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Membuat Job Sheet Mata Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Job Sheet yang dibuat	17 Job Sheet	1	3	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0
5	Melatih Pada Pelatihan Tingkat Menengah Dengan Peserta Pencari Kerja SLTA Ke Bawah atau Pekerja Pada Level Pelaksana/Produksi	Jumlah Jam Pelatihan	240 Jam Pelatihan	0	0	0	0	0	128	72	0	0	0	40	0
6	Merawat Peralatan Pelatihan	Jumlah Unit Alat yang dirawat	160 Unit Alat	8	8	8	8	8	6	16	16	20	20	20	20
7	Memperbaiki Kerusakan ringan Peralatan pelatihan	Jumlah Unit alat yang diperbaiki	48 Unit Alat	6	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	6
8	Mengevaluasi Kemajuan Peserta Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah laporan Evaluasi peserta pelatihan	17 Laporan	0	0	0	0	0	6	11	0	0	0	0	0
9	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar Bagi Pencari Kerja	Jumlah Program pelatihan yang disusun	1 Program pelatihan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nama : PAUJI RAHMAN, Amd
JABATAN : INSTRUKTUR MAHIR

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Satuan Pokok Bahasan Pelatihan Dalam Satu Paket sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Session Plan yang disusun	18 Session Plan	0	0	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0
2	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang disusun	2 Daftar Fasilitas Pelatihan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar bahan pelatihan yang disusun	2 Daftar Bahan Pelatihan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Membuat Job Sheet Mata Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Job Sheet yang dibuat	24 Job Sheet	0	0	0	0	7	2	10	0	0	0	0	0
5	Membuat Media Atau Alat Peraga Pelatihan	Jumlah media atau alat peraga yang dibuat	2 Unit media atau alat peraga	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Melatih Pada Pelatihan Tingkat Menengah Dengan Peserta Pencari Kerja SLTA Ke Bawah atau Pekerja Pada Level Pelaksana/Produksi	Jumlah Jam Pelatihan	580 Jam Pelatihan	0	34	38	28	24	146	160	0	0	0	0	0
7	Merawat Peralatan Pelatihan	Jumlah Unit Alat yang dirawat	480 Unit Alat	32	40	32	32	0	0	64	0	0	0	0	0
8	Memperbaiki Kerusakan ringan Peralatan pelatihan	Jumlah Unit alat yang diperbaiki	36 Unit Alat	3	2	2	0	0	2	8	0	0	0	0	0
9	Mengevaluasi Kemajuan Peserta Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah laporan Evaluasi peserta pelatihan	18 Laporan	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0
10	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar Bagi Pencari Kerja	Jumlah Program pelatihan yang disusun	2 Program pelatihan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Nama : ZAINAL RAKHMAN, Amd
JABATAN : INSTRUKTUR MAHIR

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar fasilitas pelatihan yang disusun	2 Daftar Fasilitas Pelatihan	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan Dalam Satu Paket	Jumlah daftar bahan pelatihan yang disusun	2 Daftar Bahan Pelatihan	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
3	Membuat Job Sheet Mata Pelatihan Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Job Sheet yang dibuat	4 Job Sheet	0	0	0	0		0	4	0	0	0	0	0

4	Melatih Pada Pelatihan Tingkat Menengah Dengan Peserta Pencari Kerja SLTA Ke Bawah atau Pekerja Pada Level Pelaksana/Produksi	Jumlah Jam Pelatihan	360 Jam Pelatihan	0	0	0	0	36	128	32	0	88	80	152	0
5	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar Bagi Pencari Kerja	Jumlah Program pelatihan yang disusun	2 Program pelatihan	0	0	0		0	0	2	0	0	0	0	0
6	Merawat Peralatan Pelatihan	Jumlah Unit Alat yang dirawat	170 Unit Alat	22	27	40	20	15	0	10	15	9	16	0	23

Nama : SUGIANTORO, S.Kom
JABATAN : INSTRUKTUR PERTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit	Jumlah Dokumen yang Disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	Menyusun Program Pelatihan Tingkat Dasar	Jumlah Naskah Program	1 Naskah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Menyusun Daftar Kebutuhan Fasilitas dalam Satu Paket untuk Tingkat Dasar	Jumlah Daftar Fasilitas	1 Daftar Fasilitas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Menyusun Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan dalam Satu Paket untuk Tingkat Dasar	Jumlah Daftar Bahan	1 Daftar Bahan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Memelihara Peralatan Pelatihan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Alat	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan Setiap Unit Kompetensi untuk Tingkat Dasar	Jumlah Rencana Pelaksanaan Pelatihan yang Disusun	1 Rencana Pelaksanaan Pelatihan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Melatih dengan Tatap Muka pada Tingkat Dasar	Jumlah JP Melatih	159 JP	0	0	40	0	0	24	16	0	24	56	0	0
8	Menyusun Media Pembelajaran untuk Tingkat Dasar	Jumlah Media Pembelajaran/Alat Peraga	2 Media Pembelajaran	0	0	0	0	2	4	0	0	2	2	0	0
9	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diperintahkan Pimpinan Baik Tertulis/Lisan	Jumlah Kegiatan yang Dijalankan	24 Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Melakukan Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Instruktur Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kegiatan yang Dijalankan	12 Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nama : BUDI SUSILAWATI, SP
JABATAN : INSTRUKTUR MUDA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5											
1	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah program pelatihan dalam satu tahun	3 GBPP	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0
2	Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan pada setiap unit	Jumlah rencana pelatihan dalam satu tahun	3 Session Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan	Jumlah daftar fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam satu tahun	3 Daftar Fasilitas	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
4	Menyusun modul pelatihan pada level operator	Jumlah modul pelatihan dalam satu tahun	3 Modul	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Melatih dengan tatap muka pada level operator	Jumlah jam pelajaran pelatihan dalam satu tahun	460 Jam Pelajaran		48	128	48	24	88	44	7	6	49	72	0
6	Memelihara peralatan pelatihan	Jumlah alat yang dipelihara dalam satu tahun	30 Laporan	9	5	2	4	9	3	3	4	7	2	4	0
7	Memperbaiki peralatan pelatihan	Jumlah peralatan yang diperbaiki dalam satu tahun	12 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	Membuat job sheet mata pelatihan sesuai dengan	Jumlah job sheet pelatihan dalam satu tahun	3 Job Sheet	0	0	0	0	0	0	1		1	0	0	0
9	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas instruktur	Jumlah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas yang akan dilakukan	5 Laporan	4	3	3	4	6	3	0	11	7	6	7	0
10	Menyusun media pembelajaran pada level operator	Jumlah media pembelajaran yang akan dibuat selama satu tahun	3 Unit	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0
11	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah kegiatan kedinasan yang diperintahkan atasan selama satu tahun	12 Kegiatan	4	2	0	1	1	0	0	0	2	4	1	0
12	Mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya	Jumlah evaluasi kegiatan kemajuan siswa selama satu tahun	3 Laporan	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Pelaihari, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TANAH LAUT

MASTURI, S. STP
NIP. 19770705 199612 1 004

MATRIK KESELARASAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja		Tingkat partisipasi angkatan kerja		Tingkat partisipasi angkatan kerja	1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase peserta latih yang berkompeten		1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja, Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Pencari kerja yang mendapat pelatihan/bimbingan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas)		878,120,210	
															Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPT BLK)		1,070,355,407	
														Jumlah Perusahaan yang tergabung dalam FKJP	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		23,240,219	
															Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (UPT		54,942,152	
2	Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat kesempatan kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	1	Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan Tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan		1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Pelayanan Antar Kerja		69,422,145	
														Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Bimbingan dan Penyuluhan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		9,999,370	
														Jumlah Orang	Perluasan Kesempatan Kerja		39,919,830	

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
						NO	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Melaksanakan Penerbitan LPTKS dalam 1 daerah	Banyaknya monitoring ke LPTKS	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		3,000,000	
											3	Perlindungan PMI di Daerah Kab/Kota	Melaksanakan Perlindungan PMI di Daerah Kab/Kota	Jumlah Purna PMI yg mendapatkan Perlindungan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		24,778,500	
						2	Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja		1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana	Perusahaan yang menyusun Dokumen RTK Mikro	Penyusunan RTK Mikro		14,933,460	
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial		Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial		Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	1	Hubungan Industrial	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah Peraturan Perusahaan yg disahkan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		15,160,000	
														Jumlah Lembaga Jumlah Peserta BPJS	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial		821,682,600	
											2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.	Menyelenggaraan Hubungan Industrial yang Baik	Jumlah Kasus	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah kabupaten/kota		62,000,000	

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri		Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB		Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri		1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan sinkronasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri		11,550,000	
														Jumlah Klaster Industri	Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		71,538,071	
														Jumlah IKM yang menggunakan inovasi teknologi dalam kegiatan produksi Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan bagi pelaku IKM pangan dan perbengkelan	Koordinasi, Sinkronasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		310,000,045	
														Jumlah Gallery IKM	Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		456,311,880	
														Jumlah Laporan	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		9,471,948	
						2	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Menguatnya struktur industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukkan industri.		1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Memfasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri lingkup kabupaten	Jumlah IKM dan Industri Besar	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		80,016,376	

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
						NO	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota		Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (%)		1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi IUI	Jumlah rekomendasi IUI	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		9,480,000	
														Jumlah Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		6,840,000	

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Penunjang Urusan Pemeruintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Sakip Disnakerind dan Reformasi Birokrasi		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Perencanaan Penganggaran, dan Ealuasi Kinerja SKPD yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4,506,327	
														Jumlah Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6,727,933	
											2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Penyediaan gaji dan Tunjangan		7,209,532,981	
														Jumlah Dokumen dan Laporan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		6,012,240	
											3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		8,712,737	
														Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor (UPT. BLK)		8,901,944	
														Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		143,056,928	
														Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. BLK)		10,490,913	
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		17,075,542	
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. BLK)		12,464,964	

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
														Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		37,451,678	
														Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT. BLK)		4,656,705	
														Jumlah Bahan Material	Bahan Material		30,000,000	
														Jumlah Peserta dan Perjalanan Dinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD		277,470,000	

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
													Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta dan Perjalanan Dinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD (UPT BLK)		88,105,000	
											6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Meubel	Pengadaan Meubel (UPT. BLK)		23,726,052	
														Jumlah Sarpras Gd Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasaraa Gedung kantor (UPT. BLK)		29,682,500	

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanakan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah alat Komunikasi dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		134,200,000	
														Jumlah Jenis Jasa dan Alat komunikasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (UPT. BLK)		73,840,000	
														Jumlah alat kebersihan Jumlah Dokumen TU BMD Jumlah PTT Jumlah TA	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		500,327,016	
														Jumlah alat kebersihan Jumlah Dokumen TU BMD Jumlah PTT Jumlah TA	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor (UPT BLK)		176,775,672	

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik daerah	Jumlah Kendaraan R2 Jumlah Kendaraan R4	Penyediaan jasa pemeliharaan, Pajak dan ijin kendraan dinas operasional atau lapangan		114,075,810	
														Jumlah Jenis Barang Jumlah Peralatan	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya		11,850,000	
														Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor (UPT. BLK)		49,635,522	
JUMLAH																	**13,022,040,677**	**0**

Pelaihari, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

-

Monev Renstra

Capaian IKU 2018

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kompetensi, Produktivitas, Pelayanan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1 Tingkat partisipasi angkatan kerja	68%	67,08%	98,65%
2.	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	1 Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	35%	25%	71,4%
3.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	12.50%	12,85%	103%
4.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	1 Nilai Sakip Disnakerin	BB	B	98%

Capaian IKU 2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,90 %	69,68 %	99,68 %
2	Meningkatnya pelayanan penempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	5,2 %	5,13 %	98,65 %
3	Hubungan industrial harmonis dan kondusif	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	30 %	2,28 %	7,6 %
4	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	13,65 %	12,49 %	91,50 %
5	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Sakip Disnakerin	BB	BB	100%

Capaian IKU 2020

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,3 %	72,03%	102,46%
2	Meningkatnya Kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	3,5 %	96,43%	2755 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	35 %	18%	51,42%
4	Meningkatnya Produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14,17 %	12.29%	87%
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100%

Capaian PK 2021

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71 %	72,27 %	101,79%
2	Meningkatnya Kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	4 %	96,48 %	2412 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	37,5 %	64 %	171,43%
4	Meningkatnya Produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14,87 %	13,19 %	89 %
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100 %

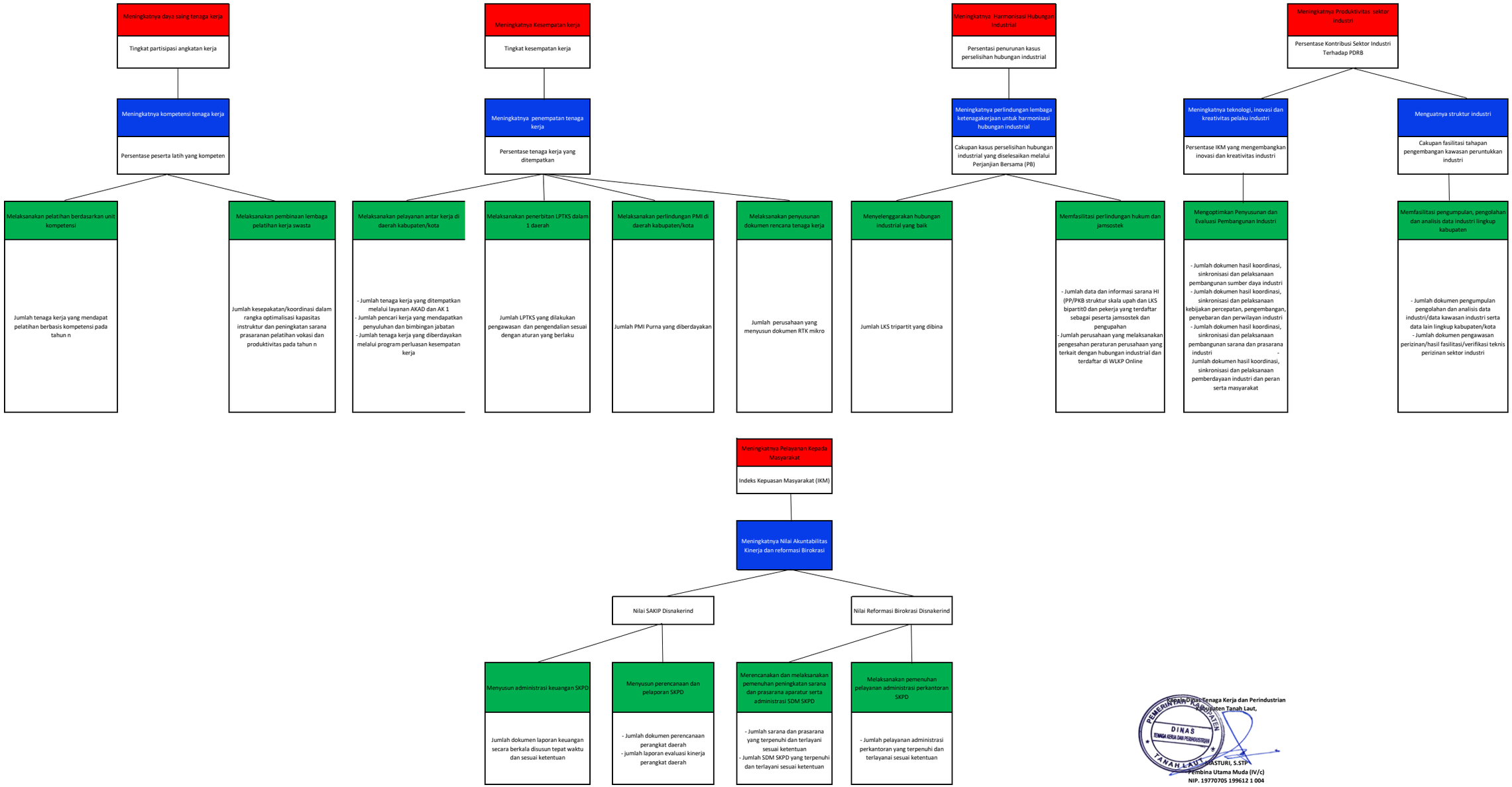
Capaian PK 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,12 %	70,92 %	99,72 %
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	90 %	95,83 %	106,48 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	40 %	40 %	100 %
4	Meningkatnya Produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	15,57 %	12,60 %	80,92%
5	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Memuaskan	100 %

Capaian PK 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,9%	69,61%	96,82%
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	6,5 %	96,42%	100 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	42,5%	20%	47,06%
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	16,35 %	12,6%	77,06%
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	90.33	100%

POHON KINERJA DISNAKERIND TAHUN 2023



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004